



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**ANALISIS DIPLOMASI PERTAHANAN NEGARA DALAM
PANDANGAN CHANAKYA
(STUDI TEKS ARTHASHASTRA SEBAGAI DASAR
STRATEGI
DILPOMASI PERTAHANAN)**

TESIS

**NI NYOMAN AYU NIKKI AVALOKITESVARI
NIM: 120170103020**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI DIPLOMASI PERTAHANAN**

**BOGOR
Desember 2018**



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**ANALISIS DIPLOMASI PERTAHANAN NEGARA DALAM
PANDANGAN CHANAKYA
(STUDI TEKS ARTHASHASTRA SEBAGAI DASAR
STRATEGI
DILPOMASI PERTAHANAN)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
dalam bidang Ilmu Pertahanan

**NI NYOMAN AYU NIKKI AVALOKITESVARI
NIM: 120170103020**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI DIPLOMASI PERTAHANAN**

**BOGOR
Desember 2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari

NIM : 120170103020

Program Studi : Diplomasia Pertahanan

Judul Tesis : **Analisis Diplomasia Pertahanan Negara dalam Pandangan Chanakya (Studi Teks Arthashastra Sebagai Dasar Strategi Diplomasia Pertahanan Negara)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Diplomasia Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Letjen TNI (Purn) Dr. I Wayan Midhio, M.Phil.

()

Pembimbing II : Letkol. Inf. Dr. Triyoga Budi Prasetyo, M.Si

()

Penguji I : Dr. Drs. Sutrimo, M.M., M.Si

()

Penguji II : Dr. Drs. Marsono, M.Si

()

Penguji III : Dr. Drs. H.M. Halkis, M.H

()

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 21 Desember 2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraph, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, 21 Desember 2018



Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari
Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari

NIM : 120170103020

Program Studi : Diplomasia Pertahanan

Fakultas : Fakultas Strategi Pertahanan

Jenis Karya : Tesis

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas ilmiah saya berjudul:

ANALISIS DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM PANDANGAN
CHANAKYA (STUDI TEKS ARTHASHASTRA SEBAGAI DASAR
STRATEGI DIPLOMASI PERTAHANAN NEGARA)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan *data* (*database*), merawat, dan memublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, 21 Desember 2018



Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Shri Krishna, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan tesis dengan judul: “Analisa Diplomasi Pertahanan Negara dalam Pandangan Chanakya (Studi Teks Arthashastra sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan Negara)” dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang senantiasa memberi dukungan semangat, doa serta dukungan moril dan materiil untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada Rektor Universitas Pertahanan, Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko S.IP., M.AP., Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Mayjen TNI Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si dan Sesprodi Diplomasi Pertahanan Dr. Jonni Mahroza, S.IP., M.A., M.Sc. Tak lupa penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen pembimbing, Letjen TNI (Purn) Dr. I Wayan Midhio, M.Phil. dan Letkol. Inf. Dr. Triyoga Budi P., M.Si. Serta kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan memberikan masukan, serta tambahan data guna penyelesaian tesis ini, yaitu:

1. Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, M.BA., selaku Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kemhan RI Periode 2014-2017, yang telah menjelaskan mengenai proses perumusan dan eksekusi strategi diplomasi pertahanan Indonesia.

2. Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D selaku Rektor IHDN Denpasar 2009-2014 yang telah menjelaskan mengenai gambaran detail pustaka Arthashastra
3. Drs. I Ketut Donder, M.Ag., Ph.D, selaku Secretary General of World Hindu Parisad, yang telah menjelaskan mengenai Pemikiran Chanakya
4. Brigjen TNI Dr. Rer Pol. Rodon Pedrason, M.A., selaku Kepala Sekolah Tinggi Intelegen Negara yang telah menjelaskan mengenai penerapan diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman secara global
5. Kolonel Kav. Oktaheroe Ramsi, S.IP., M.Sc. Selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama Multilateral Kemhan RI yang menjelaskan mengenai keterlibatan kemhan dalam diplomasi pertahanan Indonesia.
6. Guruji Anand Krishna, selaku Tokoh Hindu, Ahli Arthashastra, yang menjelaskan mengenai pendekatan holistic terhadap pandangan Chanakya dalam Arthashastra.
7. Ricky E.V. Ichsan, selaku Kepala Subdit Perlucutan Senjata Pemusnah Masal dan Senjata Konvensional Kemlu RI yang menjelaskan mengenai porsi keterlibatan kemlu dalam diplomasi pertahanan Indonesia.
8. Dr. (cand.) Ni Kadek Surpi Aryadharma, selaku Tokoh Hindu, Dosen IHDN Denpasar, yang menjelaskan mengenai relevansi pemikiran chanakya di masa kini.

Semoga Shri Krishna, Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait.

Bogor, 21 Desember 2018

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature appears to read 'Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari'.

Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari

ABSTRAK

ANALISIS DIPLOMASI PERTAHANAN NEGARA DALAM PANDANGAN CHANAKYA (STUDI TEKS ARTHASHASTRA SEBAGAI DASAR STRATEGI DIPLOMASI PERTAHANAN NEGARA)

NI NYOMAN AYU NIKKI AVALOKITESVARI

Diplomasi pertahanan merupakan kajian baru dalam ilmu HI, utamanya diplomasi. Hal ini membuat kajian-kajian yang berkembang dalam diplomasi pertahanan masih minim dan didominasi oleh konsep-konsep *western*. Padahal hal ini berpotensi menimbulkan bias teoretis jika diterapkan di negara-negara timur. Filsafat timur sesungguhnya memberikan banyak pilihan konsep terkait diplomasi dan ilmu pertahanan, seperti dalam Arthashastra karya Chanakya. Penelitian ini membahas mengenai analisa konsep diplomasi pertahanan negara dalam pandangan Chanakya melalui karyanya, Arthashastra. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pemetaan ancaman, *statecraft* dan juga diplomasi dalam Arthashastra dapat menjadi dasar strategi dan paradigma dalam Diplomasi Pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai konsep pemetaan ancaman, *statecraft* dan diplomasi dalam Arthashastra sebagai dasar strategi dan paradigma dalam diplomasi pertahanan. Metode yang digunakan adalah analisa isi kualitatif menggunakan analisis wacana kritis dan hermeneutika Gadamer. Konsep Diplomasi pertahanan dalam Pandangan Chanakya digali dari beberapa teori besar dalam Arthashastra mengenai pemetaan ancaman (Teori *Mandala*); mengenai *statecraft* (Teori *Saptanga*); dan mengenai Diplomasi (Teori *Mantrashakti*, *Ṣāḍguṇya* dan *catur upaya*). Pemetaan ancaman dalam teori mandala dipandang masih tradisional dan bersifat *military heavy*. Konsep *statecraft* dalam teori *saptangga* sebagian besar masih relevan, walau ada satu elemen yang perlu dimaknai kembali. Konsep diplomasi dalam teori *mantrashakti*, *Ṣāḍguṇya* dan *catur upaya* sebagian besar masih relevan dan dapat dijadikan dasar dalam paradigma diplomasi pertahanan. Secara umum konsep diplomasi pertahanan chanakya memiliki banyak kemiripan dengan diplomasi militer, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam strategi diplomasi militer. Namun untuk bisa diaplikasikan pada diplomasi pertahanan saat ini diperlukan penyesuaian terutama mengenai keterlibatan elemen nir-militer.

Kata Kunci: Diplomasi Pertahanan, Chanakya Arthashastra, Teori Mandala, Teori *Saptanga*, *Mantrashakti*, *Ṣāḍguṇya*, *Catur Upaya*.

ABSTRACT

ANALYSIS OF STATE DEFENSE DIPLOMACY IN THE COURSE OF CHANAKYA

(LITERATURE STUDY OF ARTHASHASTRA AS THE BASIC STRATEGY FOR STATE DEFENSE DIPLOMACY)

NI NYOMAN AYU NIKKI AVALOKITESVARI

Defense diplomacy is a new study in International Relations science, mainly diplomacy. This makes studies that develop in defense diplomacy are still mildly and dominated by western concepts. Even though this has the potential to cause theoretical bias if applied in eastern countries. Eastern philosophy actually provides many choices of concepts related to diplomacy and defense science, such as in Chanakya's Arthashastra. This study discusses the analysis of state defense diplomacy concept in the course of Chanakya through his work, Arthashastra. The research questions in this study are how the concept of threat mapping, statecraft and diplomacy in the Arthashastra can be the basis of strategies and paradigms in Defense Diplomacy. This study aims to provide an overview of the concept of threat mapping, statecraft and diplomacy in Arthashastra as the basis of strategies and paradigms in defense diplomacy. The method used is qualitative content analysis using critical discourse analysis and Gadamer's hermeneutics. The concept of defense diplomacy in the course of Chanakya was explored from several major theories in the Arthashastra concerning the mapping of threats (Mandala Theory); regarding statecraft (Saptanga Theory); and the Diplomacy (Theory of Mantrashakti, Śāḍguṇya and catur upaya). Mapping threats in the mandala theory is seen as still traditional and military heavy. The concept of statecraft in the saptangga theory is still largely relevant, although there is one element that needs to be reinterpreted. The concept of diplomacy in the mantrashakti, Śāḍguṇya and catur upaya theory is still largely relevant and can be used as a basis in the defense diplomacy paradigm. In general, the concept of defense diplomacy has many similarities to military diplomacy, so that it can be used as a reference in military diplomacy strategies. However, to be applied to defense diplomacy, adjustments are currently needed, especially regarding the involvement of non-military elements.

Keywords: Defense Diplomacy, Chanakya Arthashastra, Mandala theory, Saptanga theory, Mantrashakti, Śāḍguṇya, Catur Upaya.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoretis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II	KAJIAN TEORETIK	
2.1	Deskripsi Kontekstual.....	11
2.1.1	Teori Ancaman.....	11
2.1.2	Teori <i>Statecraft</i>	13
2.1.3	Konsep Diplomasi Pertahanan.....	17
2.1.4	Teori Hermeneutik Hans-Georg Gadamer.....	21
2.1.5	Paradigma Realisme.....	25
2.2	Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan	26
2.3	Kerangka Pemikiran	30
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Desain Penelitian.....	32
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.2.1	Tempat Penelitian.....	33
3.2.2	Waktu Penelitian.....	34
3.3.	Subjek dan Objek Penelitian	35
3.3.1	Subjek Penelitian.....	35
3.3.2	Objek Penelitian	36
3.4	Teknik Pengumpulan Data	36
3.4.1	Studi Literatur	37
3.4.2	Wawancara Mendalam	37
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37
3.6	Teknik Analisis Data	39

BAB IV	PEMBAHASAN	
4.1	Hasil Penelitian	41
4.1.1	Gambaran tentang Teks Arthashastra.....	41
4.1.2	Pemetaan Ancaman dalam Pandangan Chanakya Arthashastra	45
4.1.3	Konsep Tata Pemerintahan (<i>Statecraft</i>) dalam Arthashastra	52
4.1.4	Konsep Diplomasi dalam Arthashastra	62
4.2	Pembahasan	77
4.2.1	Konsep Pemetaan Ancaman dalam Arthashastra sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan.....	77
4.2.2	Konsep Tata Pemerintahan (<i>Statecraft</i>) dalam Arthashastra sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan.....	90
4.2.3	Konsep Diplomasi dalam Arthashastra sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan Negara.....	99
4.2.3.1	Analisis Konsep Diplomasi Pertahanan dalam Arthashastra sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan Negara.....	100
4.2.3.2	Korelasi Konsep Diplomasi Pertahanan Dalam Pandangan Chanakya Arthashastra Dan Praktik Diplomasi Pertahanan Negara Republik Indonesia.....	109
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1	Kesimpulan.....	124
5.2	Rekomendasi.....	127

DAFTAR PUSTAKA.....	129
LAMPIRAN.....	136
LAMPIRAN 1. SURAT IJIN PENELITIAN.....	137
LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA.....	139
LAMPIRAN 3. CONTOH JAWABAN TRANSKRIP WAWANCARA...	143
LAMPIRAN 4. DOKUMEN PENDUKUNG.....	152
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 Konstelasi Geopolitik dalam Teori Mandala.....	48
Gambar 4.2 Ilustrasi Teori Mandala.....	29
Gambar 4.3 Ilustrasi Saptanga Teori	53
Gambar 4.4 Saptanga (Tujuh Elemen yang membentuk negara).....	54
Gambar 4.5 Ilustrasi Tiga Shaktis menurut Chanakya.....	61
Gambar 4.6 Ilustrasi <i>Ṣādgunya</i>	65
Gambar 4.7 Ilustrasi <i>Catur Upaya</i> menurut Chanakya.....	72
Gambar 4.8 Elemen yang Pembentuk Kekuatan Nasional pada Grand Strategy.....	91
Gambar 4.9 Konstruksi Diplomasi Pertahanan Negara dalam Pandangan Chanakya Arthashastra.....	111
Gambar 4.10 <i>Blueprint</i> Diplomasi Militer 2019-2014.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Defence Diplomacy Activities	18
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	26
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian.....	34
Tabel 4.1	Perbandingan Sistem Pemetaan Ancaman Antara Konsep Barat dengan Pandangan Chanakya dalam Arthashastra..	77
Tabel 4.2	Perbandingan Teori Statecraft dan Kekuatan Nasional Menurut Pandangan Chanakya dalam Arthashastra Dengan Konsep Barat	95
Tabel 4.3	Perbandingan DIME, <i>Ṣāḍgunya</i> dan <i>Power Option</i>	101
Tabel 4.4	Perbandingan Konsep Diplomasi Pertahanan.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan lingkungan strategis global pasca Westphalia telah menciptakan sebuah keadaan dunia internasional yang berbeda. Negara tidak lagi saling menyerang satu sama lain sebagai sebuah bentuk untuk memperluas kekuasaan wilayah mereka. Kedaulatan negara telah diakui sebagai sebuah hak yang wajib dihormati oleh negara lain dan tidak boleh dilanggar atau diakuisisi tanpa aturan. Seiring perkembangan globalisasi, konsep Westphalia tidak lagi dipandang seperti dulu. Apa yang disebut batas negara, mulai kabur. Kabur bukan dalam artian negara kemudian tidak memiliki batas wilayah yang jelas, namun sekat antar negara tidak lagi seketat dulu. Perpindahan orang, arus informasi dan pengaruh dapat terjadi dengan cepat dan relatif mudah dari satu negara ke negara lain. Bahkan tidak jarang kejadian yang terjadi di sebuah negara di belahan bumi utara memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap negara-negara di belahan bumi selatan. Globalisasi ini juga memberikan kesempatan penyebaran dan proliferasi ancaman yang semakin cepat terhadap negara-negara di dunia.

Perkembangan dunia internasional yang dinamis mempengaruhi perkembangan ilmu politik dan hubungan internasional. Teori-teori yang dijadikan pisau analisis sebuah kasus ataupun fenomena hubungan antar negara menjadi dipertanyakan dan ditantang secara berkelanjutan. Banyak teori yang kemudian gugur, dianggap sudah tidak relevan lagi, lalu tergantikan dengan mazhab atau pemikiran-pemikiran baru yang dianggap lebih *compatible* dengan keadaan zaman sekarang. Dan demikian pula sebaliknya, pemikiran-pemikiran tokoh jaman dahulu yang dianggap sudah ketinggalan jaman, diinterpretasikan kembali, lalu menjadi sebuah paradigma yang ternyata masih relevan hingga saat ini.

Perkembangan paradigma yang dinamis ini tidak hanya terjadi pada para filsuf-filsuf barat semata. Namun juga pada karya-karya filsuf timur yang umurnya tidak kalah jauh lebih tua, tetapi ternyata pembahasannya bisa dikatakan lebih komprehensif daripada pemikir-pemikir barat. Seperti *Magnum Opus* dari Chanakya atau Kautilya berjudul Arthashastra. Arthashastra disusun oleh Chanakya berdasarkan sejumlah buku politik Hindu kuno, tradisi politik, dan pengalaman hidupnya. Arthashastra karya Chanakya terdiri dari 32 bagian, 15 *adikarana* dengan 150 bab dan 6000 sloka. Dengan demikian Arthashastra dapat pula dikatakan sebagai sebuah kompendium tentang bagaimana mengelola suatu Negara secara lengkap dan detail. Atas karya yang begitu monumental ini, Chanakya dianggap sebagai tokoh politik Hindu yang legendaris, sehingga kejeniusannya sering disepadankan dengan para filsuf dan negarawan barat seperti Plato, Aristoteles, dan Machiavelli.

Menurut Max Weber (1978) dalam kuliah politiknya yang terkenal yaitu "*Politics of Vocation*", pemikiran Machiavelli justru bukanlah pemikiran yang brutal melainkan moderat, jika dibandingkan dengan pemikiran Sun Tzu dalam "*The Arts of War*" dan pemikiran Chanakyadalam "Arthashastra".¹ Kedua pemikiran ini juga berisikan anjuran dalam *statecraft* (seni memerintah) yang bahkan lebih kejam dengan menggunakan konsep penggunaan mata-mata, membunuh seorang musuh politik, penggunaan tentara bayaran, bahkan penyiksaan. Bahkan sebenarnya konsep penggunaan tentara bayaran sudah dikenal oleh Aristoteles (tentang tirani Pisistratus) dan Tacitus (tentang penguasa Tiberius) namun Machiavelli baik dalam kedua tulisannya tidak menganjurkan pemimpinnya untuk melakukan hal demikian. Machiavelli bahkan terkesan lebih lunak hanya

¹ Max Weber, "Politics as a Vocation," dalam *Weber: Selections in Translation*, ed W.G. Runciman, trans. Eric Matthews. (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), hlm 212–25.

dengan menganjurkan paham oportunisme politik yang berlandaskan pada sikap tamak, kejam, tidak dapat dipercaya, congkak dan keras kepala.²

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran-pemikiran dari “dunia timur” seperti Arthashastra ini masih menjadi pilihan kedua atau bahkan alternatif dalam analisa ilmu hubungan internasional. Menurut Amitav Acharya hal ini disebabkan karena sumber pemikiran barat dalam paradigma hubungan internasional didominasi oleh *Westphalian treaty* serta sumber-sumber Mediterania klasik seperti Romawi dan Yunani kuno. Para penstudi hubungan internasional yang belum melihat teori besar seperti itu dari masa lalu Sumeria, Mesir, Cina atau bahkan India kemudian menjadi terjebak pada gagasan bahwa Chanakya adalah *Indian Machiavelli* (Machiavelli nya India) ketimbang Machiavelli menjadi *ChanakyaEuroMediterran* (Chanakya nya EuroMediterania).³ Navnita Behera dari Universitas Delhi menjelaskan bahwa Hubungan Internasional dengan sifatnya yang *western* telah memperoleh hegemoni ala Gramsci atas dasar-dasar epistemologis dalam paradigma Hubungan internasional. Lebih lanjut, hal itu telah mempertahankan praktik-praktik disiplin *gatekeeping* yang secara langsung ataupun tidak telah mengendalikan dan membatasi akses ide-ide maupun konsep non barat untuk masuk dan menjadi teori utama dalam paradigma Hubungan Internasional.⁴ Diplomasi pertahanan sebagai salah satu ilmu baru yang banyak menerapkan paradigma-paradigma hubungan internasional tentu juga terimbas dengan hal ini. Paradigma dalam diplomasi pertahanan menjadi terkesan didominasi paradigma *western*.

² Roger Boesche, “Moderate Machiavelli? Contrasting The Prince With The Arthashastra of Kautilya”, *Critical Horizon*, Volume 3, Nomor 2 (Leiden, 2002), hlm. 253-276.

³ Amitav Acharya, “Dialogue and Discovery: In Search of International Relations Theories Beyond the West”, *Millennium: Journal of International Studies*, Volume 39, Nomor 3, May 2011, hlm. 619–637.

⁴ Navnita Chadha Behera, “Re-imagining IR in India”, *International Relations of the Asia-Pacific*, Volume 7, Nomor 3, 2007, hlm. 341–368.

Terlepas dari semua itu, penggalian dan interpretasi lebih mendalam membuat Arthashastra menemukan relevansinya ditengah perubahan jaman yang kian dinamis saat ini. Pemikiran-pemikiran Chanakya dalam Arthashastra jika diinterpretasikan secara harfiah mungkin akan terlihat ketinggalan jaman dan tidak relevan lagi. Namun jika interpretasinya disesuaikan dengan perkembangan saat ini keadaannya masih dapat dikatakan relevan. Misalkan mengenai teori mandala para pemikir barat hanya menekankan bahwa “*setiap negara tetangga adalah musuh (sumber ancaman), dan musuh dari musuhmu adalah teman mu*”.⁵ Jika dilihat dari pengertian ini semata, maka teori mandala Chanakya akan terlihat begitu realis dan sulit untuk diterapkan pada masa sekarang. Hal ini menjadi kontradiktif dengan rezim regionalisme yang secara tidak langsung menuntut negara-negara yang bertetangga untuk bekerjasama satu sama lain demi tujuan bersama. Bahkan saat ini sebuah negara akan sulit bahkan sangat jarang menunjukkan kondisi yang bermusuhan secara langsung dan terang-terangan dengan negara tetangga mereka.

Sebagaimana kita lihat Indonesia dengan negara-negara tetangganya dalam lingkup ASEAN. Baik Indonesia maupun negara anggota ASEAN lain yang saling berbatasan, justru terikat dalam sebuah kesepakatan regional. Kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan, menangkal ancaman bersama dan upaya menuju tujuan-tujuan bersama dalam kerangka kerjasama ASEAN. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing negara sama-sama terlibat dalam kompetisi untuk mempertahankan dan memperjuangkan *national interest*-nya, tidak serta merta kemudian negara-negara yang bertetangga ini mendeklarasikan permusuhan satu sama lain. Sementara itu R.P Kangle (1986) menegaskan bahwa Chanakya sesungguhnya tidak memukul rata seluruh negara yang menjadi tetangga adalah musuh. Hal ini dibahas pada buku ketujuh, bab 18 sutra ke-29, bahwa

⁵ L.N. Rangarajan, *The Arthashastra: Edited, Rearranged, Translated and Introduced*, (New Delhi, India: Penguin Books India Ltd, 1992) hlm viii.

Para pangeran negara tetangga, *samantas*, biasanya dianggap bermusuhan. Tetapi ada kemungkinan bahwa beberapa dari mereka mungkin memiliki perasaan ramah terhadap *vijigisu* (negara tengah), sementara yang lain mungkin bahkan tunduk padanya. Negara-negara tetangga terbagi ke dalam tiga kategori; *aribhavin* (dari disposisi bermusuhan), *mitrabhavin* (dari disposisi ramah) dan *bhrytyabhavin* (dari disposisi persaudaraan).⁶

Dilihat dari penyampaian tersebut maka sesungguhnya sebuah negara perlu memetakan cara yang akan dipakai untuk menghadapi negara-negara tetangganya. Bagaimana negara memetakan negara-negara sebagai *competitor* untuk digalang dalam kerjasama dan mana yang perlu diberikan perhatian khusus. Serta mana yang berpotensi memberi ancaman laten, dan mana yang berpotensi memberikan keuntungan bersama.

Dalam Arthashastra, Chanakya menawarkan diskusi yang luas dan benar-benar menarik mengenai perang dan diplomasi. Chanakya dalam Arthashastranya mengulas tentang dinamika kebijakan moneter dan fiskal dan kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, hubungan internasional, serta strategi perang. Menurut Kautilya, jika sebuah Negara ingin memiliki kekuasaan dalam hubungan dengan negara lain, ingin memenangkan perang, maka Negara tersebut harus memiliki ekonomi yang kuat. Chanakya juga memberikan penekanan pada sosok pemimpin yang energik dan dinamis yang dibutuhkan suatu negara untuk meningkatkan kharisma dan pengaruh negara itu. Karena jika pemimpinnya energik, rakyat dan ekonominya juga akan bergeliat, sementara jika pemimpinnya malas dan lamban, hal yang sama akan terjadi pada negara.

Meskipun telah diakui sebagai salah satu buku yang memberikan pemahaman terhadap diplomasi dan pertahanan Negara, namun sampai saat ini belum banyak penstudi di Indonesia baik itu para penstudi ilmu politik maupun penstudi ilmu hubungan internasional yang membahas dan mengenal baik konsep-konsep Arthashastra. Bahkan nyaris tidak ada buku

⁶ R.P. Kangle, 1986. *The Kautilya Arthasastra, Part 3*, no. 14, hlm. 250

teks Hubungan Internasional berbahasa Indonesia yang menyinggung Chanakya Arthashastra dalam fokus bahasannya. Kebanyakan buku teks hubungan internasional di Indonesia hanya berfokus pada kajian-kajian hubungan internasional dengan perspektif barat. Demikian halnya dengan konsep konsep mengenai diplomasi dan pertahanan negara di Indonesia terasa masih begitu *western oriented*. Padahal tak dapat dipungkiri bahwa dominasi teori barat dalam ilmu hubungan internasional maupun diplomasi pertahanan mengandung *bias* teoretis karena faktor nilai budaya yang berbeda dengan keadaan di Indonesia.

Padahal jika diamati lebih jauh pendekatan yang digunakan dalam Sistem Pertahanan Indonesia pun tidak selalu berkiblat kepada teori-teori barat. Sistem pertahanan yang diterapkan TNI di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Penggunaan falsafah Jawa Kuna dalam manajemen serta praktik kepemimpinan pada masa awal pembentukan TNI di Indonesia memberikan warna tersendiri pada militer di Indonesia. Pada masa Presiden Soeharto misalnya, falsafah Jawa Kuno seperti "*Hasta Brata*" yang di padukan dengan *Sapta Marga* dan kemudian dikemas dalam konsep "*ngluruk tanpo wadyo bolo, menang tanpo ngasorake dan weweh tanpo kelangan*" serta "*waspodo purbowaseso*" menjadi dasar manajerial negara Indonesia saat itu.⁷

Demikian juga dengan penggunaan terminologi-terminologi berbahasa Sansekerta (yang diadopsi dengan penulisan Jawa Kuno) pada Doktrin Pertahanan Militer serta doktrin yang berlaku di masing-masing matra TNI. Doktrin Pertahanan Militer Indonesia adalah *Tri Dharma Eka Karma*, yang dijabarkan ke dalam tiga matra yaitu, Doktrin Pertahanan Militer Matra Darat "*Kartika Eka Paksi*", Doktrin Pertahanan Militer Matra Laut "*Eka Sasana Jaya*" dan Doktrin Pertahanan Militer Matra Udara "*Swa Bhuana Paksa*". Hal ini membuat peneliti ingin meneliti lebih jauh

⁷ Suharono, "Strategi manajemen dan kepemimpinan Soeharto pada masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia: Studi eksploratori formulatif dan kepustakaan" *Disertasi Doktorat*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, 2012).

kemungkinan fusi ataupun asimilasi nilai-nilai dari pustaka-pustaka yang berasal dari India, dalam hal ini Arthashastra untuk dapat dijadikan paradigma dalam melakukan strategi Diplomasi pertahanan. Peneliti ingin melihat bagaimana nilai-nilai serta konsep yang terkandung pada teks Arthashastra karya Chanakya dapat menjadi dasar pada konsep diplomasi pertahanan, khususnya dalam konteks diplomasi pertahanan negara Republik Indonesia.

Menurut Konvensi Montevideo tahun 1993, sebuah negara harus mempunyai empat unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan juga kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.⁸ Dengan demikian, dalam upaya merumuskan sistem pertahanan negara utamanya strategi diplomasi pertahanan negara, unsur-unsur ini diperlukan sebagai landasan berpikir. Sebuah sistem pertahanan negara yang baik harus mampu melindungi penduduk dan juga wilayah kedaulatannya dari ancaman, maka konsep mengenai pemetaan ancaman dibutuhkan. Berikutnya sebuah negara harus memiliki pemerintahan yang berdaulat berikut dengan sistem tata pemerintahannya, maka konsep mengenai tata pemerintahan dibutuhkan. Lebih lanjut terkait dengan keharusan keempat mengenai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain, maka dibutuhkan konsep mengenai diplomasi. Dengan demikian peneliti memandang untuk bisa merumuskan konsep diplomasi pertahanan negara dari pandangan Chanakya dalam bukunya Arthashastra, diperlukan beberapa konsep dasar yang dapat memenuhi unsur-unsur di atas. Unsur pemerintahan berdaulat melalui konsep *statecraft*, unsur kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain dengan konsep diplomasi dan unsur untuk mempertahankan penduduk serta wilayah negara adalah konsep pemetaan ancaman. Perumusan konsep diplomasi pertahanan

⁸ Pasal 1 Konvensi Montevideo dalam Lazarusli, Budi dan Syahmin A.K. 1986. *Suksesi Negara dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional*. Bandung: Remaja Karya. hlm. 7

dalam pandangan Chanakya ini dipandang penting. Karena dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan strategi diplomasi pertahanan negara yang berasal dari sumber *non-western*. Sehingga dapat memperkaya khasanah konsep dalam sistem pertahanan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Cresswel (2010) rumusan masalah untuk penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor kompleks yang berada disekitar fenomena utama dan menyajikan prespektif atau makna-makna yang beragam dari para partisipan.⁹ Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Konsep Pemetaan Ancaman dalam Arthashastra dapat menjadi dasar strategi dalam Diplomasi Pertahanan?
2. Bagaimanakah konsep Tentang Tata Pemerintahan (*State Craft*) dalam Arthashastra dapat menjadi dasar strategi dalam Diplomasi Pertahanan?
3. Bagaimanakah konsep Diplomasi dalam Arthashastra sebagai dasar strategi Diplomasi Pertahanan Negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian menurut Locke et al. (2007) berarti menunjukkan “mengapa anda ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin anda capai”.¹⁰ Tujuan penelitian hanya mengacu pada rumusan masalah penelitian untuk mengungkapkan keinginan peneliti dalam suatu penelitian.¹¹ Sehingga mengacu pada rumusan pertanyaan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

⁹ Cresswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, edisi Ketiga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁰ L.E. Locke, et al, *Proposals That Work: A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals 5th edition*. (Thousand Oaks, CA: Sage, 2007).

¹¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, edisi kedua. (Jakarta: Kencana, 2012).

1. Menganalisis Konsep Pemetaan Ancaman dalam Arthashastra untuk dapat menjadi dasar strategi dalam Diplomasi Pertahanan,
2. Menganalisis konsep Tata Pemerintahan (*Statecraft*) dalam Arthashastra untuk dapat menjadi dasar strategi dalam Diplomasi Pertahanan, dan
3. Menganalisis konsep Diplomasi dalam Arthashastra untuk menjadi paradigmm Pada Diplomasi Pertahanan.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Soekidjo (2010) manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang dihasilkan, baik bagi kepentingan pengembangan program ataupun kepentingan ilmu pegetahuan. Secara spesifik manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu manfaat teoretis atau akademis serta manfaat praktis atau aplikatif.¹² Adapun Manfaat teoritis dan Praksis dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, dan ide bagi pengembangan konsep diplomasi pertahanan non-barat. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai nilai dan konsep pada Arthashastra mengenai pemetaan ancaman, statecraft dan diplomasi yang dapat dijadikan benang merah berupa paradigma/konsep diplomasi pertahanan menurut Arthashastra, sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu diplomasi pertahanan di Indonesia. Selain itu manfaat teoretis penelitian ini adalah sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para penstudi diplomasi pertahanan yang menginginkan pendekatan *non-western* mengenai diplomasi pertahanan. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan awal dari pengkajian yang lebih mendalam bagi mahasiswa yang memiliki

¹² Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

minat dalam membahas pendekatan diplomasi pertahanan yang *non-western oriented*. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi kementerian dan lembaga terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan bagian yang memuat uraian garis besar isi penelitian tesis ini. Adapun penelitian tesis ini terdiri dari lima bab antara lain:

- BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan
- BAB II : Kajian Teoretik yang terdiri dari deskripsi konseptual (ancaman, *statecraft*, diplomasi pertahanan, hermeneutik Hans-Georg Gadamer), hasil penelitian terdahulu, dan juga kerangka pemikiran.
- BAB III : Metodologi Penelitian yang terdiri dari Jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil dan Pembahasan. Merupakan penyajian hasil penelitian dan upaya menjawab rumusan masalah yang ada mengenai konsep pemetaan ancaman, *statecraft*, dan diplomasi dalam Arthasastra dapat menjadi dasar strategi dalam diplomasi pertahanan Indonesia.
- BAB V : Penutup yang berisi Kesimpulan serta rekomendasi yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB II KAJIAN TEORETIK

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Teori Ancaman

Banyu Perwita (2006) dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa secara tradisional ancaman muncul dari eksternal (luar negara). Namun perkembangan kekinian menarik *The Origin of Threats* menjadi lebih luas, di mana ancaman tidak hanya datang dari eksternal (luar negara), namun juga dari dalam negara atau domestik. Sementara itu dalam tataran sifat atau *nature*, secara tradisional ancaman selalu bersifat militeristik, sehingga pendekatan yang digunakan juga selalu melibatkan unsur militer. Sementara konsep ancaman non-tradisional yang mengikuti perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional mengembangkan ancaman menjadi lebih luas, kompleks dan komprehensif karena mencakup berbagai aspek lainnya seperti ideologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya, pertahanan dan juga keamanan (ipolesosbudhankam).¹³

Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015), kompleksitas ancaman bagi Indonesia digolongkan ke dalam pola dan jenis ancaman yang multi dimensional berupa ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida, yang kemudian dapat dikategorikan lagi menjadi ancaman dalam bentuk nyata dan belum nyata. Pertahanan Negara Indonesia kemudian dikembangkan untuk membangun keterpaduan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi.¹⁴

¹³ Banyu Perwita, dan Y.M Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2006) hlm 123-125

¹⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Ancaman dapat datang dari darat, udara maupun laut, sehingga pertahanan Indonesia dikembangkan dalam sebuah pengembangan kapasitas pertahanan yang saling berkait, komprehensif dan holistik melalui penetapan *Minimum Essential Force* (MEF) yang mencakup upaya peremajaan dan penambahan alutsista yang dimiliki masing-masing matra TNI, baik darat, laut maupun udara.

Chanakya, dalam Arthashastra menawarkan teori bahwa "*an immediate neighbouring state is an enemy and a neighbour's neighbour, separated from oneself by the intervening enemy, is a friend*".¹⁵ Mengapa Chanakya menganggap wilayah Negara yang berdekatan secara langsung adalah musuh, sementara yang berjauhan adalah kawan. Untuk menjelaskannya Chanakya membuat cara pandang yang disebut teori Mandala, di mana negara tetangga yang berdekatan dianggap sebagai musuh/ kompetitor alami (potensi ancaman yang berasal dari negara tetangga yang berdekatan itu lebih besar, dianggap lebih mudah melakukan penyerangan karena jarak wilayah yang berbatasan itu dekat. Tetapi negara manapun yang wilayahnya dihalangi oleh negara musuh/ kompetitor dianggap sebagai sekutu, atau, musuh dari musuh saya adalah teman bagi saya.

Chanakya menggambarkan Mandala atau Lingkaran Negara-negara (*Circle of States*) seperti sebuah roda dengan penakluk sebagai sentralnya. Sekutu-sekutunya ditarik menuju posisinya di sepanjang jari-jari roda meskipun mereka dipisahkan oleh wilayah musuh.¹⁶ Ketika dianggap tepat, *Vijigīṣu* (raja penakluk) menerapkan enam metode kebijakan luar negeri, yang umumnya dikenal sebagai enam kebijakan politik, *Ṣāḍgunya*, (*the six-fold policy*), terhadap berbagai komponen dalam Mandala Negara-negaranya. Metode tersebut bekerja saling terkait dan mengikat satu sama lain kepada penakluknya sehingga sang *Vijigīṣu* (raja penakluk) dapat melakukan apapun yang diinginkan selama itu perlu

¹⁵ L.N. Rangarajan, *op.cit.* hlm. 542.

¹⁶ *ibid.* hlm. 561

menurutnya. Enam kebijakan politik luar negeri Chanakya (*Ṣāḍgunya*) merupakan penentu kebijakan yang akan diambil apakah akan mundur, stabil/berdiam diri atau maju.

2.1.2 Teori *Statecraft*

Studi tentang elit dan pemimpin politik merupakan salah satu pilar penting dalam ilmu politik. *Statecraft* merupakan sebuah kerangka kerja untuk mempelajari hal tersebut. Teori *statecraft* pertama kali dikembangkan oleh Jim Bupitt, seorang akademisi dari Inggris pada tahun 1986. Pendekatan kenegaraan/*statecraft* berkaitan dengan bagaimana elit politik menghadapi, menanggapi dan mengatur tantangan yang muncul.¹⁷ Dr. John Lenczowski, *Founder and President of The Institute of World Politics (IWP)* menyatakan bahwa *statecraft* merupakan seni dalam menggunakan instrumen kekuatan nasional untuk mencapai tujuan membela kepentingan nasional yang vital (*vital national interest*), melancarkan hubungan internasional, dan akhirnya menjadi penyebab perdamaian di dunia. Berbagai instrument yang termasuk ke dalamnya antara lain: strategi militer, seni diplomasi, berbagai jenis diplomasi publik yang melibatkan hubungan dengan orang-orang dan juga dengan pengaruh asing sebagai lawan dari diplomasi tradisional yang melibatkan hubungan dengan para penguasa. Seni *statecraft* lainnya termasuk intelegen dan kontra intelegen.¹⁸

Bagi Machiavelli *statecraft* merupakan sebuah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang negarawan. *Statecraft* ini terkait pula dengan cara ia menggunakan kekuasaan yang dimiliki, untuk mencapai tujuan yang lebih besar (tujuan negara). Machiavelli menyatakan bahwa negara yang jaya dan besar merupakan negara yang disegani oleh banyak negara-negara lainnya. Disegani merujuk pada artian dihormati dan ditakuti namun sekaligus dapat dimintai bantuan perlindungan. Untuk mencapai hal

¹⁷ Toby S James, "Neo-Statecraft Theory, Historical Institutionalism and Institutional Change", *University of East Anglia*, 2016 Dalam https://ueaeprints.uea.ac.uk/54729/1/James_GOV_for_web.pdf diakses pada 17 Juni 2018

¹⁸ John Lenczowski, What is Statecraft. The Institution of World Politics, 2017, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=GdN4Sh1RjkU> diakses pada 17 Juni 2018

tersebut negara harus memiliki tentara yang kuat yang dibentuk dari rakyatnya sendiri melalui pelatihan wajib militer. Negara yang kuat dan jaya juga wajib memiliki penguasa yang cakap dan cerdas sehingga bisa mempertahankan kekuasaannya dari konspirasi maupun usaha-usaha kudeta baik yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun dilakukan dengan bantuan asing. Hal terpenting lainnya adalah sang penguasa ini harus memiliki rakyat yang taat pada penguasa dan siap membela negara dan penguasa dari berbagai jenis ancaman yang membahayakan eksistensi yang penguasa dan negara mereka.¹⁹

Sementara itu, seni kenegaraan atau statecraft Indonesia pada jaman kerajaan dulu banyak dibahas dalam karya “Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX” karya Soemarsaid Moertono (2018). Hubungan antara rakyat dan raja/ penguasa disini disebut sebagai *kawulo lan gusti*. Seorang raja tanpa ada rakyat maka kekuasaan yang dimiliki jadi tak berguna. Raja hendaknya memiliki sifat bijaksana agar disegani oleh rakyat. Sifat bijaksana mencakup perilaku adil dalam penyelesaian masalah, serta bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpin. Sifat lain yang harus dimiliki pemimpin itu juga tertanam dalam konsep *astabrata*. Bangsawan/ Priyayi juga memiliki peranan yang penting dalam tata negara di kerajaan jaman mataram yang dijadikan bahan pembahasan oleh Moertono. Kaum priyayi merupakan kaki tangan raja. Mereka bertugas mengurus semua kondisi dalam suatu wilayah kerajaan. Wilayah kerajaan pada masa konsep pemerintahan ini terbagi menjadi dua, *Negaragung* dan *mancanegara*. Daerah *mancanegara* ini dipimpin oleh seorang bupati, yang merupakan abdi dari Raja, dan harus tunduk pada perintah raja.²⁰

Terkait dengan upaya mendapat atau memperluas wilayah raja memiliki tiga jenis cara. Pertama adalah dengan melakukan kekerasan atau peperangan. Kedua adalah dengan cara memaksa orang yang

¹⁹ Herbert Butterfield, *The Statecraft of Machiavelli*. (New York: Collier Books, 1967).

²⁰ Soemarsaid Moertono, *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018).

berpengaruh pada wilayah tertentu (yang akan dikuasai) untuk tinggal dalam istana dalam jangka waktu tertentu sementara wilayahnya dibiarkan diurus oleh pejabat keraton. Sedangkan cara terakhir adalah dengan menjalin persekutuan melalui perkawinan.²¹

Di sisi lain, menurut Chanakya dalam Arthashastra, tata pemerintahan tercakup ke dalam teori yang disebut sebagai *Teori Saptanga*. *Sapta* dalam Bahasa Sansekerta berarti tujuh dan *anga* berarti bagian-bagian tubuh. Maka *saptanga* merujuk pada pengertian tujuh bagian tubuh. Negara dalam artashastra dianalogikan sebagai organisme yang berkembang dan *prakritis* adalah bagain tubuhnya.²² Tujuh bagian ini antara lain: *Swamin* (*Ruler, Raja/ Penngusaha/ Pemimpin negara*); *Amatya* (*concilors/ anggota dewan/ mereka yang mewakili institusi negara*); *Janapada* (*Territory/ resources/ sumber daya negara, termasuk wilayah dan penduduk*); *Durg* (*Well-fortified Sovereign entity/ entitas berdaulat yang dibentengi*); *Kosa* (*Treasury/ Perbendaharaan*); *Danda/ Bala* (*Military/ Army and order keeping/ Militer dan penjagaan ketertiban*); dan *Mitra* (*Friend/ Ally/ teman dan sekutu negara*).²³

Sebagai bagian tubuh, ketujuh elemen ini tidak dapat terpisahkan dan dibutuhkan untuk pertumbuhan negara secara menyeluruh. Setiap bagian tersebut memainkan peranan yang penting. Secara umum urutan kepentingannya bersifat menurun dalam artian *Swamin* lebih penting dari *amatya*, lalu *janapada*, *durga*, *kosa*, *bala*, lalu terakhir *mitra*. Namun dalam kenyataannya urutan ini tidak terlalu penting, terlebih jika negara dihadapkan terhadap ancaman tertentu, urutan ini bisa berubah secara dinamis. Karena bagi Chanakya kehati-hatian lebih penting dari aturan. Dia tidak menganggap remeh apapun. Sehingga ia menulis “[*Lastly*] a calamity which threatens to destroy all other elements shall be considered as [the

²¹ *Ibid.*

²² Sukra, *Sukraniti*, Mumbai: Khemraj Shrikrisnadass, 2012, chapter 1, sutra 62

²³ Kautilya Arthashastra 6:1

most] serious, irrespective of what position the element occupies in the list of priorities".²⁴

Statecraft menurut Chanakya dalam Arthashastra ditujukan untuk mencapai apa yang disebut sebagai *yogakshema* yang berarti menikmati kedamaian yang didapat dari kesejahteraan/ kemakmuran, yaitu menikmati kesejahteraan serta keamanan secara bersamaan. Menurut Chanakya, negara yang tidak aman dapat ditaklukkan dengan mudah, dan dengan demikian akan berada di bawah kekuasaan penguasa asing dan menghadapi eksploitasi. Chanakya percaya bahwa keamanan nasional sangat penting untuk kemakmuran dan memiliki pasukan yang baik merupakan faktor penting dalam penyediaan keamanan nasional. Dia juga memahami bahwa kemakmuran sangat penting untuk keamanan nasional. Karena negara miskin tidak dapat memiliki sumber daya untuk mempertahankan keamanannya. Dengan demikian, ia percaya bahwa kemakmuran dan keamanan nasional saling bergantung.²⁵

Berbicara tentang kekuasaan suatu negara, atau "kekuatan nasional" dengan kata lain, Chanakya melalui Arthashastra mengidentifikasi tiga *shaktis*: *utsahashakti*, *prabhavashakti* dan *mantrashakti*. *Utsahashakti* berarti kekuatan untuk memberikan dorongan, energi, dan arah kepada negara dan unsur-unsurnya, dan terutama berhubungan dengan penguasa atau raja. Di zaman modern, bisa disamakan dengan kepemimpinan suatu negara. *Prabhavashakti* berarti kekuatan untuk menghasilkan 'efek' yang menguntungkan negara, dan berkaitan dengan ekonomi dan kekuatan militer suatu negara. Akhirnya, *mantrashakti* berarti kekuatan untuk mempengaruhi, menarik, mendorong dan mengurung. Dalam pengertian kontemporer, hal ini berkaitan dengan nasihat dan diplomasi yang baik.²⁶

²⁴ Kautilya Arthashastra 8:1.63

²⁵ Malay Mishra, "Kautilya's Arthashastra: Restoring its Rightful Place in the Field of International Relations", *Journal of Defence Studies*, Volume 10, Nomor 2, April-June 2016, hlm. 77-109

²⁶ Rangarajan.*op. cit.* hlm. 559

2.1.3 Konsep Diplomasi Pertahanan

Dalam kajian pertahanan negara, dikenal sebutan Diplomasi Pertahanan yang tujuannya adalah melakukan upaya diplomatik baik ke dalam atau pun keluar, yang menggunakan perspektif pertahanan negara. Upaya diplomatik ini bisa saja kerja sama antar negara atau pun intra negara yang melibatkan peran militer atau pun nirmiliter.

Secara umum terdapat beberapa definisi dari diplomasi pertahanan. Rajeswari Pillai Rajagopalan (2008) mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai *“categorized under such heads as defence exchanges to include joint training with the militaries of foreign countries”*.²⁷ Rajagopalan memandang diplomasi pertahanan sebagai tindakan yang mengikutsertakan pertukaran pertahanan (militer) sebuah negara serta latihan bersama dengan negara asing. Pengertian ini merujuk kepada pengertian harfiah diplomasi pertahanan yang bersifat militeristik. Sedangkan Matsuda Yasuhiro (2006) memberikan pengertian diplomasi pertahanan sebagai, *“all diplomatic activities relating to national security and military diplomatic activities”*.²⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian dari Matsuda ini lebih luas di mana diplomasi pertahanan tidak hanya soal pertukaran militer tapi lebih kepada segala bentuk aktivitas yang ditujukan untuk mewujudkan keamanan nasional serta aktivitas diplomatik militer. Dilain pihak, Mayor Laut (P) Salim (2012) memberikan pengertian diplomasi pertahanan sebagai tindakan *“untuk saling memperkuat Confidence Building Measure (CBM) dan sekaligus memperkuat stabilitas kawasan”*.²⁹ Sehingga dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa diplomasi pertahanan merupakan seluruh kegiatan diplomatik yang

²⁷ Pillai Rajeswari Rajagopalan., *Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*, 2008, dalam https://www.academia.edu/17696780/Military_Diplomacy_The_Need_for_India_to_Effectively_Use_In_Its_Conduct_of_Diplomacy, diakses pada 18 Juni 2018

²⁸ Matsuda Yasuhiro, *“An Essay on China’s Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy”*, (Japan: NIDS Security Report No.7 December 2006.) Hlm. 1-40

²⁹ Salim. *Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan*. (Jakarta: Pusat Pengkajian Maritim Seskoal, 2012)

berkaitan dengan keamanan nasional dan kegiatan militer dengan negara-negara lain yang bertujuan untuk memperkuat CBM sebuah negara terhadap negara lainnya serta untuk memperkuat stabilitas kawasan.³⁰

Banyak cendekiawan yang telah membuat daftar kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh sebuah negara dalam upayanya menjalankan diplomasi pertahanan negara tersebut. Hal tersebut dijabarkan oleh Andrew Cottey dan Anthony Foster (2004) dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Defence Diplomacy Activities	
✚	Bilateral and multilateral contacts between civilian defence officials and senior military officers
✚	Appointment of defence attachés to foreign countries
✚	Bilateral defence cooperation agreements
✚	Training of foreign civilian and military personnel
✚	Provision of advice and expertise on democratic civilian control over the armed forces, defence management and military technical areas
✚	Contacts and exchanges between military personnel and units, port calls
✚	Placement of liaisons officers in defence and military establishment of partner countries
✚	Deployment of training teams
✚	Provision of military equipment and other material assistance
✚	Bilateral or multilateral military exercise or training

Source: Andrew Cottey and Anthony Foster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, Adelphi Paper No. 365 (London: IISS, 2004), p. 7.

Diplomasi pertahanan memiliki beberapa tujuan di dalam implementasinya. Adapun tujuan dari diplomasi pertahanan seperti pertemuan pasukan di berbagai kegiatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan setiap negara untuk menghilangkan permusuhan, membangun dan menjaga kepercayaan, dan membantu dalam angkatan bersenjata yang bertanggung jawab secara demokratis, serta berkontribusi terhadap pencegahan dan penyelesaian konflik.³¹ Secara operasional, kegiatan di

³⁰ Budi Hartono, Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Arms Trade Treaty (ATT) di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tesis Magister. (Bogor: Prodi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, 2016).

³¹ Wolfgang Koerner, "Security Sector Reform: Defence Diplomacy", *Parliamentary Information and Research Service: Library of Parliament*, 2006, dalam

atas meliputi langkah-langkah membangun kepercayaan dan keamanan, bantuan terhadap negara-negara (materil maupun non-materil), dan pengontrolan senjata (*arms control*).³²

Sementara itu bagi Chanakya atau Kautilya yang memiliki pemikiran realis, diplomasi merupakan senjata lain yang digunakan dalam peperangan berkepanjangan yang selalu terjadi ataupun direncanakan akan terjadi (*Diplomacy was just another weapon used in the prolonged warfare that was always either occurring or being planned for*). Hal ini disebabkan karena Chanakya berasumsi bahwa negara itu hidup pada dunia hubungan internasional di mana hanya ada dua pilihan, antara menaklukkan atau ditaklukkan. Sehingga ia tidak lagi mengatakan “bersiaplah berperang namun tetap mengharapakan perdamaian.” Justru Chanakya menyatakan sebaliknya, “bersiaplah untuk berperang dan berencanalah untuk menaklukkan”. Ketika Carl Von Clausewitz menyatakan bahwa perang hanyalah perpanjangan dari politik domestic, Chanakya justru berpendapat bahwa diplomasi merupakan tindakan perang yang halus, serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh dan mendapatkan keuntungan bagi negara itu sendiri, segalanya dilakukan dengan mata menuju upaya penaklukkan.

*In this way, the conqueror should establish in the rear and in front, a circle (of kings) in his own interest. ... And in the entire circle, he should ever station envoys and secret agents, becoming a friend of the rivals, maintaining secrecy when striking again and again. The affairs of one, who cannot maintain secrecy, ... undoubtedly perish, like a broken boat in the ocean.*³³

Bagi Chanakya kebijakan luar negeri hanyalah perpanjangan perang sebuah negara. Karena tujuan kebijakan luar negeri bukanlah untuk menghentikan perang, namun lebih kepada upaya guna menangkis

[https://lop.parl.ca/Content/LOP/Research Publications/prb0612-e.pdf](https://lop.parl.ca/Content/LOP/Research%20Publications/prb0612-e.pdf) diakses pada 18 Juni 2018

³² United Kingdom, “Defence Diplomacy”, *Ministry of Defence Policy Paper No. 1*, 2014. Hlm 2-3.

³³ Kangle, *op.cit.* hlm. 366.

kekalahan dan memastikan keberhasilan negara tersebut dalam peperangan berikutnya. Bagi Chanakya, prinsip kebijakan luar negeri ini - bahwa negara-negara bertindak dalam kepentingan politik, ekonomi, dan militer mereka - merupakan kebenaran abadi dari ilmu politiknya, atau Arthashastra. Dia tidak percaya bahwa negara-negara tidak pernah bertindak dengan cara yang altruistik - memang, Chanakya menganjurkan tindakan kemanusiaan yang juga bertepatan dengan kepentingan pribadi - tetapi ia percaya bahwa seseorang harus berasumsi, jika dipercayakan dengan kekuatan politik atau militer, bahwa tetangganya pada akhirnya akan bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri.

Terkait dengan Diplomasi dan Kebijakan luar negeri, Chanakya mencetuskan teori *Ṣāḍgunya* atau yang lebih dikenal dengan Six-fold Foreign Policy atau enam metode kebijakan politik luar negeri. Enam kebijakan politik luar negeri Chanakya merupakan penentuan (kebijakan) mundur, stabil/ berdiam diri dan maju. Keenam kebijakan politik tersebut adalah membuat perdamaian (*sandhi*), melakukan peperangan (*vigraha*), tinggal diam/netral (*asana*), mempersiapkan diri untuk perang/siaga (*yana*), mencari dukungan/aliansi (*samsraya*), dan kebijakan ganda yaitu membuat perdamaian dengan negara satu sementara itu juga mengadakan peperangan dengan negara lainnya.³⁴ Kondisi yang sedang berlangsung akan menentukan kebijakan apa yang sebaiknya akan digunakan.

Untuk mengadakan perdamaian, kita harus terlibat dulu dalam suatu kesepakatan atau perjanjian dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Perjanjian tanpa syarat umumnya digunakan untuk memperoleh informasi tentang musuh, sehingga raja bisa melakukan serangan setelah mempelajari titik lemah 'lawan-lawannya'. Perjanjian dengan kewajiban tertentu memungkinkan seorang "*raja bijaksana membuat raja negara tetangga memerangi negara tetangga lainnya untuk mencegah kemungkinan mereka bersatu dan kemudian menyerang negaranya*". Hal

³⁴ Kautilya Arthashastra 7.13. 42-44: 366

ini menunjukkan kondisi negara melakukan upaya antisipatif tertentu agar negara mereka tetap aman dan terhindar dari ancaman serangan negara tetangga.

2.1.4 Teori Hermeneutik Hans-Georg Gadamer

Hermeneutika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “*hermeneuein*” yang merujuk kepada arti “menafsirkan”. Dalam tradisi Yunani Kuno, kata *hermeneuein* digunakan dalam tiga makna yakni: mengatakan (*to say*), menjelaskan (*to explain*), dan menerjemahkan (*to translate*).³⁵ Hermeneutika dipahami sebagai seni dan ilmu menafsirkan khususnya tulisan-tulisan berkewenangan, terutama berkenaan dengan kitab suci dan atau identik dengan tafsir. Selain itu Hermeneutika juga dipahami sebagai suatu filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan “*understanding of understanding*” atau pemahaman pada pemahaman terhadap sebuah teks, utamanya teks Kitab suci yang datang dari kurun waktu, tempat dan situasi sosial yang asing bagi para pembacanya.³⁶

Pada dasarnya hermeneutik berhubungan dengan bahasa. Kita berpikir melalui Bahasa; berbicara dan menulis dengan Bahasa; kita mengerti dan menginterpretasi dengan Bahasa. Gadamer menyatakan bahwa Bahasa tidak boleh kita pikirkan sebagai yang mengalami perubahan. Bahasa harus kita pikirkan atau kita pahami sebagai sesuatu yang memiliki ketertujuan (teleologi) di dalam dirinya. Dalam artian kata-kata atau ungkapan secara aksidental tidak pernah memiliki kebakuan. Baik kata-kata ataupun ungkapan memiliki tujuan (*telos*) tertentu dan penuh dengan maksud. Sebagaimana dikatakan oleh Wilhelm Dilthey, bahwa setiap kata tidak pernah tidak bermakna.³⁷

³⁵ Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*. (Evanston: Northwestern University Press, 1996) hlm.. 23

³⁶ Edi Susanto, 2016. *Hermeneutika: Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2016) hlm.2

³⁷ E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*. (Yogyakarta: Kanisius, 2018) hlm. 26-7

Gadamer (1977) menyatakan bahwa hermeneutik adalah sebuah seni, dan bukanlah sebuah proses mekanis. Lebih lanjut, jika pemahaman merupakan jiwa dari hermeneutik, maka pemahaman tidak dapat dijadikan pelengkap proses mekanis. Karena hermeneutik merupakan sebuah seni, maka hermeneutik semacam ini tidaklah dapat dipersiapkan lebih dulu sebelum dibuat, tidak dapat diramalkan atau dikatakan sebelumnya.³⁸ Hermeneutika merupakan ontologi dari fenomenologi pemahaman. Sementara kunci dari pemahaman adalah partisipasi dan keterbukaan, bukan manipulasi apalagi pengendalian. Sedangkan pemahaman kita senantiasa merupakan suatu hal yang bersifat historis, peristiwa dialektis dan peristiwa kebahasaan. Inilah sebabnya kemudian hermeneutika kemudian selalu berhubungan dengan pengalaman, bukan hanya pengetahuan, dialektika dan bukan metodologi. Karena metodologi hampir selalu memprastrukturkan kegiatan ilmiah seorang peneliti. Sementara hermeneutika dialektis membimbing manusia untuk menyingkap hakikat kebenaran, serta menemukan hakikat realitas segala sesuatu secara sebenarnya.³⁹

Pokok-pokok pemikiran Hermeneutika Gadamer tergambar ke dalam empat teori, yakni Teori Kesadaran Keterpengaruh oleh Sejarah (*Historically Effected Consciousness*); Teori Pra-Pemahaman (*Preunderstanding*); Teori Penggabungan/Asimilasi Horison (*Fussion Of Horisons*) Dan Teori Lingkaran Hermeneutik (*Hermeneutical Circle*); Dan Teori Penerapan (*Application*).⁴⁰

a. Teori Kesadaran Keterpengaruh oleh Sejarah (*Historically Effected Consciousness*)

Berdasarkan teori ini, pemahaman seorang penafsir dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang melingkupinya, baik itu

³⁸ Hans-G Gadamer, *Philosophical Hermeneutics*, trans. Dan ed. David E. Linge. (Berkeley: The University of California Press. 1977)

³⁹ Kaelan. 2017. *Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermeneutika*. (Yogyakarta: Paradigma), hlm.285

⁴⁰ Susanto, Edi. *Op. cit.*. hlm. 52-55

berupa tradisi, kultur, maupun pengalaman hidup. Maka dari itu, ketika sedang menafsirkan teks, seorang penafsir seyogyanya menyadari bahwa dia berada pada posisi tertentu yang bisa sangat mewarnai pemahamannya terhadap suatu teks yang sedang ditafsirkan. Maka dari itu penafsir harus mampu mengatasi subyektivitasnya ketika dia menafsirkan suatu teks.

b. Teori Pra-Pemahaman (*Preunderstanding*)

Pra pemahaman merupakan posisi awal seorang penafsir, yang memang pasti ada bahkan harus ada ketika ia membaca teks. Prapemahaman ini disebut sebagai *vorverständnis* dan ditujukan agar seorang penafsir mampu mendialogkannya dengan isi teks yang ditafsirkan. Tanpa pra-pemahaman seseorang tidak akan berhasil memahami teks dengan baik. Namun menekankan bahwa pra-pemahaman ini tidak boleh kaku. Ia harus terbuka dan siap untuk dikritisi, direhabilitasi dan dikoreksi oleh penafsir itu sendiri ketika ia sadar atau mengetahui bahwa pemahamannya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh teks yang ditafsirkan. Sehingga kesalahpahaman terhadap pesan teks dapat dihindari, hasil dari rehabilitasi atau koreksi terhadap prapemahaman ini disebut dengan istilah *vollkommenheit des vorverständniss* (kesempurnaan pra-pemahaman).

c. Teori Penggabungan/Asimilasi Horison (*Fussion Of Horisons*) Dan Teori Lingkaran Hermeneutik (*Hermeneutical Circle*)

Dalam proses penafsiran seseorang harus ada bahwa ada dua horizon, yakni (1) cakrawala pengetahuan atau horizon dalam teks dan (2) cakrawala pemahaman atau horizon pembaca. Kedua horizon ini pasti muncul dalam proses penafsiran. Yang perlu digarisbawahi adalah dalam proses penafsiran ini seorang pembaca teks akan memulainya dengan cakrawala hermeneutiknya (pra-pemahamannya), namun ia juga harus memperhatikan bahwa teks juga memiliki horizonnya sendiri yang

sangat mungkin berbeda dari horizon sang pembaca. Contoh mudahnya adalah ketika seseorang membaca teks yang berasal dari masa lalu, maka dia harus memperhatikan horizon historis di mana teks tersebut muncul, disusun, ditulis ataupun diungkapkan. Dengan demikian memahami teks berarti membiarkan teks tersebut berbicara. Interaksi antar horizon inilah yang disebut Gadamer sebagai “lingkaran hermeneutik”. Di mana horizon pembaca hanya berfungsi sebagai titik awal pijakan dalam memahami teks. Titik pijak ini merupakan suatu “pendapat” atau “kemungkinan” bahwa teks ini berbicara tentang suatu hal. Titik pijak ini harus bisa membantu memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh teks. Bukan malah mengungkung teks dan memaksanya untuk berbicara sesuai dengan titik pijak pembaca. Dengan kata lain objektivitas teks lebih diutamakan daripada subjektivitas pembaca

d. Teori Penerapan (*Application*)

Menurut Gadamer, seorang pembaca, disamping harus memahami dan menafsirkan teks, juga harus mampu melakukan “penerapan” (*anwendung*) dari pesan-pesan atau ajaran-ajaran ketika teks kitab suci tersebut ditafsirkan. Menurut Gadamer pesan yang harus diaplikasikan pada masa penafsir bukanlah makna literal (harfiah) dari teks, namun lebih kepada *meaningful sense* (makna yang berarti) atau pesan yang lebih mendalam daripada sekadar makna literal teks tersebut.

Hermeneutik menurut Gadamer lebih merujuk pada usaha memahami dan menginterpretasi sebuah teks. Sehingga hermeneutik merupakan bagian dari keseluruhan pengalaman mengenai dunia. Hermeneutik sendiri berhubungan dengan suatu teknik tertentu (*techne/kunstlehre*) dan berusaha kembali ke susunan tata bahasa, aspek kata-kata retorik dan aspek dialektis sebuah Bahasa. Karena *techne* inilah maka hermeneutik juga dipandang sebagai sebuah filsafat praktis yang juga

berarti sebuah ilmu pengetahuan tentang segala hal yang universal yang mungkin untuk diajarkan.⁴¹

2.1.5 Paradigma Realisme

Realisme merupakan salah satu paradigma yang dominan dalam ilmu Hubungan Internasional. Realisme memandang bahwa negara selayaknya manusia, memiliki sifat alamiah untuk mendominasi negara-negara lainnya. Negara dalam pandangan Hans. J Morgenthau adalah entitas yang selalu berupaya mencari *power* (kekuasaan, pengaruh, kekuatan). Negara mementingkan juga selayaknya *nature* manusia mementingkan diri sendiri dan pada tataran tertentu mengambil tindakan ekstrim untuk kepentingannya sendiri.⁴²

Terdapat beberapa asumsi dasar dalam paradigma realisme ini. pertama realisme meletakkan dasar asumsinya pada pesimisme dan skeptisme terhadap *nature* dari negara sebagaimana *nature* manusia. Asumsi kedua adalah karena *nature* yang pesimistik dan skeptik ini, kemajuan politik internasional dan politik domestik itu peluangnya sangat kecil. Asumsi ketiga adalah dunia sebenarnya terdiri atas negara-negara berdaulat yang saling terlibat konflik anarkis satu sama lain, sehingga perang sering kali menjadi upaya akhir dalam penyelesaian konflik. Asumsi keempat adalah negara selalu berupaya menjunjung tinggi keamanan nasional serta kelangsungan hidup negaranya.⁴³

Terdapat beberapa premis utama dalam realisme. Pertama, negara selayaknya manusia, juga mementingkan diri sendiri, berusaha mencapai posisi terkuat untuk dapat mengendalikan negara-negara lainnya. Upaya mencari *power* (kekuatan, kekuasaan, pengaruh) yang dilakukan oleh negara adalah perjuangan tiada henti untuk mendapatkan dominasi serta legitimasi atas keamanan. Kedua, hubungan internasional dan politik dunia

⁴¹ Sumaryono *op.cit.* hlm. 83-4

⁴² M Saeri, "Teori Hubungan Internasional: Sebuah Pendekatan Paradigmatik" dalam *Jurnal Transnasional Volume 3*, Nomor 2. Februari 2012, hlm. 5

⁴³ Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 88.

bersifat anarki. Negara adalah aktor utama dan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara. Ketiga, penyelesaian konflik maupun kompetisi internasional antar aktor negara sering kali diselesaikan melalui peperangan. Dengan demikian penguatan militer merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh negara. Setiap negara harus bisa mempertahankan negaranya sendiri (*self-help*).

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan ini dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan Hal ini dapat dijadikan rujukan dan juga perbandingan penelitian. Adapun dalam penelitian ini, peneliti merujuk empat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dijalankan oleh peneliti sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Judul Penelitian	<i>The Arthashastra: Assessing the Contemporary Relevance of an Ancient Indian Treatise on Statescraft</i>	The Ultimate Pragmatist: Kautilya's Philosophy on SMART Power in National Security	Diplomatic Theory of Kautilya and Sun Tzu: Assessing Interpretations	Model Diplomasi Pertahanan Indonesia
Penulis	Major Abhishek Kumar	Breena Coates and Col. Jeffrey Caton	Anusmita Dutta dan Manish S Dabhade	Agung Nurjana

Tahun Terbit	2016	2010	2017	2016
Penerbit	<i>Faculty of U.S Army Command and General Staff College</i> (Thesis)	International Society for Military Ethics (ISME) program, University of San Diego	SAGE Publication	Universitas Pertahanan
Teori	National Power and Security Dilemma, Theory of Power in International System, Kautilyan Foreign Policy.	Soft Power and Smart Power, Kautilya's Raj Mandala Model of Diplomacy, Hard Power,	Theory Diplomacy, and Hermeneutik	Teori Diplomasi Pertahanan
Hasil Penelitian	Prioritas Chanakya terhadap unsur-unsur kekuatan nasional negara dan fokusnya pada peningkatan kekuatan negara,	Ide Kautilya mendukung <i>smart power</i> yang dikombinasikan dengan diplomasi dan oportunisme, ide Kautilya tentang raja	Menelusuri mengenai aspek teori diplomatik dalam Hubungan internasional beserta pergeserannya. Menjelaskan	Menjelaskan mengenai model diplomasi Indonesia. Praktik Diplomasi Pertahanan Indonesia dilaksanakan dalam

	menemukan kesamaan dalam pilihan kebijakan Cina kontemporer. Tulisan ini juga menjabarkan mengenai analisa lingkungan geopolitik kontemporer tiongkok dalam doktrin kautilya.	mandala merupakan sebuah model di mana raja/ pemimpin negara bisa memutuskan antara bekerjasama , melakukan kolusi, aliansi, akuisisi atau perusakan dalam berhubunga n dengan negara lain. Tulisan ini menjelaskan arthashastra dengan <i>soft power</i> , dan juga <i>hard power</i> .	mengenai pemahaman non barat mengenai teori diplomatik, menjabarkan pendekatan sudut pandang Chanakyadan juga Sun Tzu melalui analisis hermeneutik	kerangka Bilateral dan multilateral baik dalam cakupan regional ataupun global. Mencakup tiga lembaga yang saling berkait satu sama lain yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan juga Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Sigifikansi terhadap penelitian tesis	Tulisan ini dijadikan rujukan bagi peneliti untuk	Tulisan ini dijadikan rujukan bagi peneliti	Tulisan ini membantu peneliti untuk melihat teori	Tulisan ini menjadi bahan rujukan

	mendalami bagaimana nilai serta konsep-konsep dalam Arthashastra dan relevansinya terhadap upaya menakar ancaman dalam analisa lingkungan geopolitik kontemporer.	untuk mendalami penggunaan <i>hard power</i> , <i>soft power</i> dan <i>smart power</i> dalam Arthashastra	diplomatik dari Chanakya yang dilihat dari perspektik hermeneutik. Dan meberikan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif karena penelitian ini juga memberikan pandangan baik dari pemikiran Chanakya maupun pemikiran sun Tzu.	peneliti untuk mengetahui model diplomasi pertahanan indonesia agar kemudian dapat di telaah menggunakan nilai dan konsep yang ada dari Arthasastra.
Perbedaan dengan penelitian	Belum membahas mengenai Diplomasi Pertahanan dalam Pandangan	Belum membahas mengenai Diplomasi Pertahanan dalam Pandangan	Belum membahas mengenai Diplomasi Pertahanan dalam Pandangan	Belum membahas mengenai Diplomasi Pertahanan dalam Pandangan

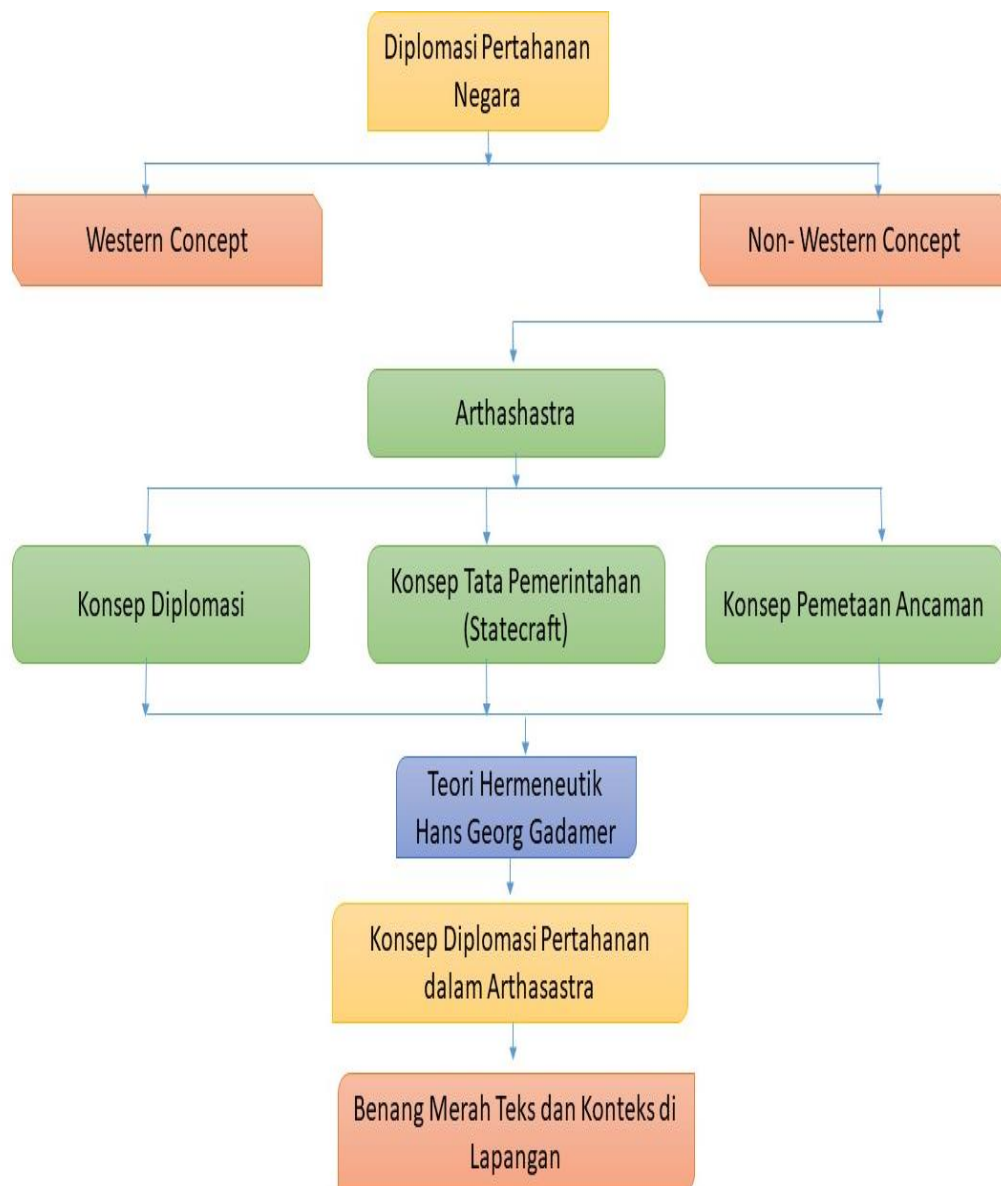
	Chanakya/ Kautilya Arthashastra	Chanakya/ Kautilya Arthashastra	Chanakya/ Kautilya Arthashastra	Chanakya/ Kautilya Arthashastra
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Sumber: Hasil Olah Peneliti dari Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, 2018

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah diagram yang menjelaskan mengenai garis besar alur logika yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah penelitian.⁴⁴ Adapun kerangka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Diplomasi pertahanan merupakan disiplin ilmu baru. Sebagian besar teori-teori serta konsep yang dikembangkan dalam kajian diplomasi pertahanan lebih dominan kepada konsep dan teori-teori *western oriented*. Padahal konsep non western yang membahas mengenai konsep diplomasi dan pertahanan negara juga ada. Salah satunya adalah Arthashastra. Dalam Arthashastra terdapat tiga teori besar yang membahas mengenai diplomasi, tata pemerintahan serta konsep pemetaan ancaman, yang jika dianalisis menggunakan teori Hermeneutik Hans G Gadamer dapat menghasilkan sebuah konsep diplomasi pertahanan dalam Arthashastra yang dapat dijadikan rujukan lain dalam paradigma diplomasi pertahanan. Setelah diperoleh konsep diplomasi pertahanan dalam Arthashastra ini, kemudian peneliti berupaya untuk mencari benang merah antara teks dan konteks dari praktek diplomasi pertahanan Indonesia yang terjadi di Lapangan. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 mengenai Kerangka Pemikiran.

⁴⁴ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2018

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Setiadi (2007) merupakan gambaran ataupun tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam upayanya untuk memudahkan jalannya penelitian serta penyusunannya. Desain penelitian mencakup metode atau langkah langkah peneliti dalam bekerja dan menjalankan proses penelitian.⁴⁵ Secara umum desain penelitian ini adalah penelitian analisis isi (*content analysis*) dengan metode kualitatif.

Desain penelitian analisis isi menurut Holsti (dalam Kriyanto, 2006) merupakan suatu teknik penelitian yang memperoleh kesimpulan melalui pengidentifikasian berbagai karakteristik khusus dari suatu pesan tertentu secara objektif, sistematis serta generalis.⁴⁶ Analisis isi umumnya digunakan sebagai metode untuk melakukan analisis terhadap isi teks (informasi tertulis atau tercetak) sehingga lebih lumrah digunakan dalam penelitian kualitatif. Krippendorff (2014) mengemukakan bahwa analisis isi kualitatif terdiri dari empat jenis. Pertama adalah analisis wacana (*discourse analysis*), model yang paling sering digunakan dari jenis ini adalah pendekatan dari Teun Van Dijk. Kedua adalah analisis retorika (*rhetorical analysis*), karya monumental yang menggunakan analisis ini adalah *Kathleen Hall Jamieson's book Packaging the Presidency*. Ketiga adalah analisis etnografis (*ethnographic content analysis*), metode analisis ini pertama kali dikemukakan oleh Altheide. Keempat adalah analisis percakapan (*conversation analysis*) yang dilakukan pertama kali oleh Harvey Sack.⁴⁷

⁴⁵ Setiadi, *Konsep dan Penulisan Riset Keperawatan*, (Yogyakarta : Graha, 2007) hlm. 38-42

⁴⁶ Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 70-3

⁴⁷ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*, Second Edition, (California: Sage Publication, 2004) hlm. 14-17

Menurut Strauss dan Corbin (1997) sebagaimana dikutip oleh Basrowi dan Sukidin (2002) bahwa *qualitative research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.⁴⁸

Penelitian ini merupakan penelitian teks dan mengkaji nilai-nilai serta gagasan mengenai ancaman, *statecraft*, dan diplomasi yang terdapat dalam teks arthashastra. Penelitian teks di fokuskan untuk mencari hubungan intrateks yang terdapat dalam bab-bab Arthashastra yang membahas mengenai ancaman, *statecraft* dan diplomasi untuk disarikan sebagai sebuah konsep diplomasi pertahanan berdasarkan pandangan Chanakya. Penulis juga berupaya melihat konteks diplomasi pertahanan yang di jalankan oleh Indonesia (kemhan dan kemlu). Adakah yang sesuai dengan bahasan dari Arthashastra, dan seperti apa kesesuaiannya serta kemungkinan untuk menerapkan diplomasi pertahanan dalam Arthashastra pada upaya pembuatan strategi diplomasi pertahanan negara dalam sebuah sistem pertahanan negara di Indonesia.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat atau Lokasi penelitian merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah penelitian. Nasution (2003) menyatakan bahwa tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat ataupun lokasi yang dituju oleh peneliti, yang dicirikan dengan adanya beberapa unsur seperti pelaku, tempat serta kegiatan yang dapat diobservasi guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.⁴⁹

⁴⁸ Basrowi dan Sukidin. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. (Surabaya. Insan Cendekia, 2002, hlm. 1

⁴⁹ Nasution. *Metode Research*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara 2003).

Penelitian ini berupaya untuk mencari benang merah antara teks dari nilai-nilai Diplomasi pertahanan yang terdapat pada Arthashastra yang mencakup konsep mengenai pemetaan ancaman, statecraft, serta diplomasi (hubungan antar negara) dengan konteks Pengejawantahan Diplomasi Pertahanan Indonesia di lapangan. Sehingga tempat yang dipilih untuk melihat pengejawantahan diplomasi pertahanan Indonesia di lapangan yang paling sesuai menurut peneliti adalah Direktur Kerjasama Internasional (Dirkersin) Direktorat Jendral Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Indonesia (Ditjen Strahan Kemhan) serta Kementerian Luar Negeri RI.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian menurut Bungin (2012) adalah keseluruhan waktu yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Mulai dari tahapan awal, pengumpulan data, analisis data, hingga penyajian hasil penelitian.⁵⁰ Adapun waktu penelitian ini akan dijabarkan dalam tabel rencana waktu penelitian di bawah ini.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2018							2019
		Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pembuatan Proposal Penelitian								
2	Proses Bimbingan								
3	Ujian Komprehensif (Pra Proposal)								
4	Seminar Proposal Penelitian								
5	Perbaikan Proposal Penelitian								
6	Pengumpulan Data								
7	Analisis Data								
8	Penyusunan Tesis								

⁵⁰ Burhan H.M Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik, dan Ilmu social*, (Jakarta : Kencana Prenama Media Group, 2012) hlm 76-7

9	Seminar Hasil (Pra Tesis)								
10	Ujian Tesis								
11	Perbaikan Tesis								
12	Penyerahan Tesis								

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2018

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1. Subjek Penelitian

Arikunto (2007) dalam karyanya berjudul *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi. Revisi VI* menyatakan bahwa subjek dalam sebuah penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting. Subjek ini dapat berupa benda, tempat, hal, ataupun orang yang diamati dalam rangka mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian⁵¹. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para ahli Arthashastra dan tokoh Hindu yang paham mengenai Arthashastra, serta para praktisi diplomasi pertahanan baik dari Kementerian Pertahanan maupun dari Kementerian Luar Negeri RI. Berikut ini merupakan daftar narasumber yang dijadikan subjek dalam penelitian.

1. Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D (Professor Bidang Weda, Mantan Rektor IHDN)
2. I Ketut Donder Ph.D (Secretary General of Wolrd Hindu Parisad, Dosen Pascasarjana IHDN Denpasar)
3. Dr. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag., M.Hum. (Penulis Refleksi Filsafat Politik dalam ChanakyaArthashastra, Dosen Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar/ Peneliti LIPI)
4. Dr. I Gde Suwantana, Dosen IHDN Denpasar
5. Dr. (Cand.) Ni Kadek Surpi, M.Fil.H., Dosen IHDN Denpasar, Kepala Peneliti The Hindu Center of Indonesia
6. Anand Krishna (Penulis Buku Nitishastra: *Ancient Wisdom for Modern Leaders*)

⁵¹ Arikunto, S., , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi. Revisi VI* hlm1 134, (Rineka Apta, Jakarta. 2007) Hlm., 152

7. Letjan TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, M.BA., (Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan RI 2014-2017)
8. Kolonel Kav. Oktaheroe Ramsi (Kasubdit Multilateral Dirjen Strahan Kemhan RI)
9. Letkol Ihwan Solihin (Subdit Bilateral, Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan RI)
10. Brigjen TNI Dr. Rer. Pol. Rodon Pedrason, M.A., (Kepala Sekolah Tinggi Intelejen Negara)
11. Ricky E.V. Ichsan (Kepala Subdit Perlucutan Senjata Pemusnah Masal dan Senjata Konvensional Kemlu RI)

3.3.2. Objek Penelitian

Sugiono (2012) menyatakan bahwa objek penelitian adalah atribut, sifat ataupun nilai dari orang, objek, ataupun kegiatan yang memiliki variasi-variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu kemudian dapat ditarik kesimpulannya.⁵² Adapun objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah diplomasi pertahanan negara dalam pandangan Chanakya dan juga praktik Diplomasi Pertahanan Republik Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diharapkan, maka diperlukan data penelitian yang memadai. Menurut Cresswell (2010), langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik dalam bentuk terstruktur atau tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam ataupun mencatat informasi. Penelitian ini akan berfokus pada dua teknik pengumpulan data yaitu Studi Literatur dan juga Wawancara.

⁵² Sugiyono, *Op. cit* hlm. 38

3.4.1 Studi Literatur

Menurut Sugiyono (2012) studi literature atau metode kepastakaan (*library method*), merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan kajian dan penelusuran terhadap sumber-sumber kepastakaan yang dijadikan subjek penelitian.⁵³ Teks Arthashastra karya Chanakya akan menjadi sumber kajian utama dalam penelitian ini. Selain itu sumber lainnya berupa kajian, komentar serta interpretasi ahli mengenai konsep yang terdapat dalam Arthashastra dalam bentuk buku, jurnal, disertasi ataupun tulisan ilmiah terdahulu lainnya.

3.4.2 Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara atau *interview guide*. Pedoman wawancara menurut Silalahi (2010), umumnya berisi daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, atau jawaban bebas agar diperoleh jawaban yang lebih luas serta mendalam.⁵⁴ Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara mendalam.

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur *snowball sampling*. Bungin (2012) menyatakan bahwa dalam prosedur *snowball* atau rantai rujukan dengan siapa peserta atau informan pernah dikontak atau pertama kali bertemu dengan peneliti merupakan hal yang penting untuk menggunakan jaringan sosial mereka untuk merujuk peneliti kepada orang lain yang berpotensi untuk dapat berpartisipasi atau berkontribusi dan memberikan informasi kepada peneliti.

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data atau uji validitas data merupakan bagian yang penting dalam metode penelitian. Validitas kualitatif menurut Cresswell adalah upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian

⁵³ Sugiyono, *op.cit* hlm 111-3

⁵⁴ Ulbert Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama 2010) hlm. 67-9

dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Validitas ini didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, ataupun pembaca secara umum.⁵⁵

Menurut Moleong (dalam bungin, 2007) Keabsahan data kualitatif dapat diuji dalam beberapa cara antara lain: memperpanjang keikutsertaan (kehadiran peneliti dalam menghimpun data); menemukan siklus kesamaan Data; meningkatkan ketekunan pengamatan; Triangulasi antara peneliti, metode, teori dan sumber data; pengecekan melalui diskusi; kajian kasus negatif, pengecekan anggota tim; kecukupan referensi; uraian rinci; dan auditing.⁵⁶

Adapun dalam pemeriksaan keabsahan data penelitian ini peneliti mengedepankan metode triangulasi. Menurut Moleong (2009) metode triangulasi dalam penelitian kualitatif merujuk pada teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memandaatkan suatu hal lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut⁵⁷. Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa metode triangulasi terbagi ke dalam empat jenis. Pertama adalah triangulasi data, di mana peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi berbeda. Jika data-data yang diperoleh konsisten, maka validitas telah ditegakkan. Kedua adalah triangulasi antar peneliti di mana terdapat pelibatan beberapa peneliti berbeda dalam proses analisis data. Biasanya berbentuk sebuah tim evaluasi yang terdiri dari rekan sejawat yang menguasai metode spesifik dalam sebuah FGD. Jika setiap evaluator menafsirkan sama, maka validitas telah ditegakkan. Ketiga adalah triangulasi teori di mana peneliti menggunakan berbagai perspektif untuk menafsirkan data-data yang telah di kumpulkan. Beragam teori ini memberikan pemahaman yang lebih baik saat peneliti berupaya memahami data. Jika beragam teori yang digunakan berujung pada kesimpulan analisis yang sama, maka validitas ditegakkan.

⁵⁵ Creswell, *Op. cit.* hlm. 284-286.

⁵⁶ Bungin, 2007. *Op. cit.* hlm. 262-269.

⁵⁷ Moleong, Lexy J. 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 330

Sedangkan yang keempat adalah triangulasi metodologi. Pemeriksaan validitas ditegakkan oleh metode pengumpulan data yang berbeda seperti misalnya penggabungan metode kualitatif dengan data kuantitatif yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang sama.⁵⁸

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian terpenting dari kegiatan penelitian. Pada bagian depan sudah ditegaskan bahwa penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif.⁵⁹

Lebih lanjut strategi analisis yang akan diterapkan dalam analisis ini adalah tekstual analysis atau analisis tekstual. Altheide (1992:2) dalam Kriyantono (2006)⁶⁰ menyatakan bahwa analisis isi kualitatif disebut pula sebagai *Ethnographic Content Analysis* (ECA) yaitu, perpaduan analisis isi objektif dengan observasi partisipan. Artinya, istilah ECA adalah periset berinteraksi dengan material-material dokumentasi atau bahkan melakukan wawancara mendalam sehingga pernyataan-pernyataan yang spesifik dapat diletakkan pada konteks yang tepat untuk dianalisis. Pendekatan analisis isi kualitatif berdasarkan tujuan penelitian terdiri dari tiga kelompok besar. Pertama adalah kelompok metode analisis teks dan Bahasa, kedua adalah kelompok analisis tema-tema budaya, dan yang ketiga adalah kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi. Penelitian ini termasuk kedalam kelompok pertama, yakni kelompok metode analisis teks dan bahasa.

Secara garis besar kelompok metode analisis teks dan bahasa ini terbagi lagi kedalam tujuh jenis analisis yang berbeda.⁶¹ Pertama adalah analisis isi atau *content analysis*. Kedua adalah analisis bingkai atau *framing analysis*. Ketiga adalah analisis semiotik. Keempat adalah analisis

⁵⁸ M.B. Milles dan M.A. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (London: Sage Publication, 1984) hlm. 91-8

⁵⁹ Bungin *op. cit.* hlm 290

⁶⁰ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 249

⁶¹ Bungin, 2012. *Op. cit.* hlm 161-2

konstruksi sosial media massa. Kelima adalah hermeneutik. Keenam adalah analisis wacana dan penafsiran teks. Ketujuh adalah wacana kritis. Dalam menjalankan analisis ini terdapat beberapa model yang dikemukakan oleh berbagai ahli, salah satunya adalah analisis wacana menurut Teun Van Dijk.

Analisis Wacana Teun Van Dijk memiliki dimensi atau bangunan berupa: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis dari Van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana di atas ke dalam sebuah kesatuan analisis. Pada dimensi tekstual, hal yang diteliti berupa bagaimana struktur dari teks tersebut dan strategi wacana yang digunakan untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial, yang dipelajari adalah proses produksi teks yang melibatkan kognisi individu dari sang peneliti. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat atau penerapan dari wacana tersebut terhadap suatu masalah di masyarakat.⁶²

Analisis Wacana dari Van Teun Dijk yang akan digunakan peneliti untuk menganalisa teks dalam Arthashastra. Menganalisis validitas data disini berupa untuk mencari hubungan makna antar teks dalam satu bab yang masing-masing membahas mengenai ancaman, *statecraft*, serta diplomasi secara terpisah. Selanjutnya juga digunakan untuk menganalisis validitas hubungan makna interteks yang terdapat antar bab dalam Arthashastra yang membahas mengenai ancaman, *statecraft*, serta diplomasi untuk kemudian ditarik benang merah yang dapat mengejawantahkan nilai-nilai diplomasi pertahanan pada Karya Arthashastra ini.

⁶² Sobur, Alex *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan analisis Framing*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Tentang Pustaka Arthashastra

Secara garis besar Arthashastra merupakan sebuah kompendium, sebuah risalah mengenai tata pemerintahan sebuah negara. Risalah yang sangat komprehensif ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan masalah serta fungsi-fungsi yang dibutuhkan pada administrasi dalam negeri sekaligus hubungan luar negeri sebuah negara. Kompendium ini memberikan pendidikan kepada penguasa negara tentang cara untuk mencapai tujuan nasional negara seperti perluasan pengaruh dari kerajaannya. Kompendium ini tidak hanya luas, namun juga terperinci. Bagaikan sebuah panduan praktis yang tak terlalu mengikat dan baku untuk dapat menghadapi kondisi lingkungan strategis yang selalu berubah-ubah dari sebuah negara.

Chanakya atau Kautilya sebagai penulis risalah ini merupakan seorang perdana menteri sekaligus penasihat politik utama Raja Chandragupta dan anaknya, Bindusara di Kerajaan Maurya. Naskah yang disusun sekitar 300 SM ini memuat doktrin kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan keinginan raja ambisius untuk menjadi penakluk/penguasa dataran India.⁶³ Raja atau pemimpin negara berupaya mengakumulasi power negaranya untuk jadi yang terkuat. Dengan demikian negaranya akan aman dari serangan negara lain. Arthashastra disusun oleh Chanakya dengan latarbelakang sistem internasional yang anarki, tanpa adanya supremasi yang lebih tinggi dari negara. Keadaan ini diperparah dengan ketiadaan kesepakatan bersama mengenai penghormatan atas kedaulatan dan batas-batas suatu negara, selayaknya

⁶³ Satish Karad, "Perspective of Kautilya's Foreign Policy: An Ideal of State Affairs", *Modern Research Studies*. Volume 2. Nomor 2, June 2015. hlm. 322-332

yang berkembang pada masa modern saat ini. Pada masa dinasti Candragupta, sistem yang ada mengembangkan apa yang disebut sebagai pandangan realisme, yang mengedepankan *self-help*, upaya negara untuk terus mengakumulasi power agar *sustainability* negara tetap terjaga. Pandangan yang berkembang antar negara adalah pilihan hanya ada dua, antara menaklukkan atau ditaklukkan. Pengembangan power atau growth negara bisa terjadi ketika negara berhasil mengakuisisi wilayah kerajaan tetangganya atau kerajaan lainnya. Karena dengan akuisisi ini kerajaan mendapat tidak hanya penambahan wilayah, namun juga perbendaharaan yang diperoleh melalui upeti dari raja yang telah dikalahkan, dan juga sumber daya alam yang terdapat pada kerajaan yang telah ditaklukkan tersebut.

Vittal (2011:11) menyatakan, bahwa Arthashastra terbagi menjadi tiga bagian besar. Bagian pertama berhubungan dengan administrasi sebuah negara. Bagian ini menggambarkan organisasi yang terdapat pada negara, apa saja tugas tugas dan tanggung jawab dari setiap pejabat utama negara, baik itu dalam bentuk upaya menjaga ketertiban ataupun mengumpulkan pendapatan bagi negara. Bagian kedua berkaitan mengenai kode hukum dan keadilan. Bagian ini mencakup penjelasan mengenai hukum perdata dan hukum pidana serta upaya penegakkan hukum. Sementara itu, bagian ketiga berhubungan dengan kebijakan luar negeri yang tujuan utamanya adalah akuisisi wilayah melalui penaklukan. Ketiga bagian itu merujuk kepada tiga tujuan negara yaitu kekayaan/ kesejahteraan (ekonomi), keadilan (hukum dan ketertiban) dan pertumbuhan (perluasan wilayah/ kuasa). Negara yang stabil dan makmur hanya bisa aman jika memiliki administrasi yang adil dan efisien. Karena hal tersebut yang menetapkan kondisi yang tepat untuk akumulasi kekayaan dan perluasan wilayah.⁶⁴ Pada zaman tersebut perluasan wilayah

⁶⁴ Vinay Vittal, "Kautilya's Arthashastra: A Timeless Grand Strategy", *Tesis Magister*, (Alabama: School of Advanced Air and Space Studies Maxwell Airforce Base) 2011, hlm. 11

atau pertumbuhan dimaknai dengan menginvasi wilayah negara lain, namun jika dibawa ke keadaan politik internasional zaman sekarang, keadaan ini tentu tidak dapat dimaknai secara harfiah. Perluasan atau *growth* sebuah negara tidak dapat dimaknai semata pencaplokan sebuah negara secara fisik (melakukan invasi). Namun, lebih kepada perluasan kekuasaan negara terhadap negara lain di luar teritorinya, atau perluasan cakupan *power/* pengaruh dari negara yang bersangkutan tersebut.

Arthashastra disusun oleh Chanakya berdasarkan sejumlah buku politik Hindu kuno, tradisi politik, dan pengalaman hidupnya. Arthashastra karya Chanakya terdiri dari 32 bagian, 15 *adikarana* (buku) dengan 150 bab, 180 *Prakarana* (bagian yang ditujukan untuk topik tertentu) dan 6000 sloka. *Adhikarana* (buku) pertama membahas mengenai Raja, pelatihan yang harus dilewati oleh Raja, prosedur pengangkatan menteri serta pejabat negara, keamanan dan juga keselamatan negara. *Adhikarana* kedua menjabarkan mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para pejabat eksekutif negara. Buku kedua ini juga menguraikan mengenai peran negara dalam kegiatan pertanian, pertambangan, dan rekreasi. Buku ketiga bicara mengenai hukum dan administrasi peradilan serta menyediakan sebuah kode-kode hukum. *Adhikarana* keempat membahas mengenai deteksi kejahatan beserta penindakannya serta kontrol negara atas para pedagang, pengrajin, penyiksaan dan hukuman. *Adhikarana* kelima merupakan kumpulan dari berbagai topik-topik berbeda mulai dari skala gaji pejabat negara, saran kepada perdana menteri mengenai kerberlangsungan tahta kerajaan. Sementara *adhikarana* keenam terbagi ke dalam dua bahasan besar yaitu mengenai unsur-unsur yang membangun sebuah negara dan bahasan satu lagi mengenai kebijakan luar negeri yang dapat dilakukan oleh negara. Pada *adhikarana* ketujuh Chanakya menjabarkan mengenai teori mandala, lingkaran negara (*Raj Mandala Theory/ the circle of state theory*) dan juga teori enam kebijakan luar negeri (*Ṣaḍguṇya/ Six fold Foreign Policy*) yang dapat digunakan dalam

berbagai situasi. Teori-teori ini digunakan untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan, yakni memastikan kesejahteraan negara.⁶⁵

Adhikarana kedelapan membahas mengenai *vyasanas* atau malapetaka/ ancaman/ kekurangan ataupun kelemahan yang dapat mempengaruhi fungsi unsur pembentuk negara secara negatif. *Adhikarana* kesembilan menjabarkan tentang persiapan menuju medan perang, mencakup jenis-jenis pasukan yang akan dimobilisasi pada sebuah ekspedisi, tindakan pencegahan yang harus diperhatikan dan bahaya-bahaya yang harus diwaspadai. Sementara itu *Adhikarana* kesepuluh menjelaskan mengenai cara memerangi musuh, jenis-jenis pertempuran, jenis kesatuan tempur, dan juga kamp pertempuran utama. *Adhikarana* kesebelas membahas mengenai bagaimana cara *Vijigīṣu* (pemimpin negara yang memiliki hasrat sebagai penakluk) harus mampu menundukkan *samghas* atau oligarki yang diatur oleh sekelompok pemimpin. Pada *adhikarana* keduabelas Chanakya menunjukkan bagaimana seharusnya raja yang lemah itu bersikap ketika diancam oleh raja yang lebih kuat. Sedangkan *adhikarana* ketigabelas membahas mengenai tata cara menaklukkan ibu kota negara musuh yang dibentengi baik dengan mengandalkan akal/ dalih/ negosiasi (diplomasi) ataupun dengan cara bertempur (berperang). Bagian ini juga membahas mengenai bagaimana cara memerintah wilayah yang telah ditaklukkan. Sementara itu, pada *adhikarana* keempatbelas, Chanakya membahas mengenai cara-cara rahasia yang dapat digunakan untuk menghancurkan pasukan musuh, mulai dari obat-obatan hingga cara-cara gaib. Kemudian pada *adhikarana* kelimabelas Chanakya membeberkan penjelasan mengenai 32 jenis *tantrayukti* atau metode untuk memperlakukan subjek, alat-alat yang dipakai dalam olah-ilmu.⁶⁶ Dalam Arthashastra, Chanakya menguraikan

⁶⁵ Rangarajan, *op. cit.* hlm. 10

⁶⁶ Made Astana, dan C.S. Anomdiputro, *Kautilya (Cāṇakya) Arthaśāstra: Masalah Politik, Ekonomi, Hukum, Budaya dsbg., Buku Pegangan Para Pemimpin Negara*, (Surabaya: Paramita, 2015). hlm 677-83

dengan dengan cukup detail mengenai cara dan metode untuk membangun sebuah negara dan melestarikan kekuatannya dalam lingkungan yang kompetitif secara strategis dan dalam kekuasaan adversarial dengan bahaya *inheren* dari subversi politik serta ketidakstabilan sosial.⁶⁷

4.1.2 Pemetaan Ancaman dalam Pandangan Chanakya Arthashastra

Chanakya berasumsi bahwa negaranya saat itu hidup dalam dunia hubungan luar negeri yang hanya memiliki dua pilihan antara menaklukkan atau ditaklukkan. Maka dari itu, sebagai seorang dengan pemikiran yang begitu realis, ia tak lagi mengatakan “bersiaplah untuk berperang, namun tetaplah berharap untuk sebuah perdamaian” ia dengan “cukup radikal” menyatakan “bersiaplah untuk berperang dan berencanalah untuk menaklukkan.” Raja harus dapat memetakan ancaman-ancaman potensial yang mungkin dapat menyulitkan negaranya.

Secara garis besar, Chanakya membahas mengenai ancaman pada *adhikarana* kedelapan. Chanakya merujuk bencana atau ancaman dengan terminologi *vyasana*. Bencana atau ancaman ini sumbernya bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ancaman dari dalam negeri termasuk di dalamnya adalah pemberontakan, kelaparan, wabah penyakit, epidemi, perselisihan internal, dekadensi penguasa, pedagang/ pejabat yang tidak jujur (korup), masalah perekonomian, penghianatan yang dilakukan oleh petinggi negara (menteri/ pejabat tinggi negara), paceklik/ kekeringan, kelaparan, bencana alam (banjir, kebakaran hutan), dan kejahatan domestik (perampokan, pencurian). Sedangkan bencana dari luar negara dapat berupa upaya musuh untuk menaklukkan/ menginvasi sang *vijigṛṣu* / negara, sekutu yang membelot, dan infiltrasi agen dari negara asing ke dalam negeri.⁶⁸

⁶⁷ Shounak Set, “Ancient wisdom for the Modern World: Revisiting Kautilya and His Arthashastra in the Third Millenium”, *Journal of Strategic Analysis*, Volume 39, Number 6, 2015, hlm.710-714.

⁶⁸ Astana *op.cit.* hlm.483-531

Chanakya menyatakan ancaman baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sama-sama harus ditangani secara baik. Raja atau penguasa bertugas untuk melindungi rakyatnya. Dalam Arthashastra karya Chanakya, kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat merupakan hal mendasar dan utama yang harus terus berupaya diwujudkan dan dijaga oleh Raja/ penguasa. Sebagaimana dijelaskan pada bagian pembuka Arthashastra:

In the happiness of his subjects lie the king's happiness; in their welfare his welfare. he shall not consider as good only that which pleases him but treat as beneficial to him whatever pleases his subjects. (Arthashastra 1.19.34)

Hal ini juga di tegaskan oleh beberapa narasumber⁶⁹ bahwa tugas raja/ penguasa tidak hanya untuk mencari kesenangan pribadinya, namun juga bagaimana mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Bila penguasa sejahtera namun rakyatnya tidak, maka sesungguhnya penguasa tersebut telah gagal untuk mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu kesejahteraan rakyat. Pemimpin negara harus berusaha mencegah gangguan timbul, mengatasi ancaman yang sudah muncul, serta menghancurkan dan menghentikan bahaya yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan negara. Baik perekonomian dan keamanan negara merupakan hal yang saling melengkapi dan penting bagi negara. Keadaan ini juga tersurat dalam Arthashastra 8.4.50 serta pada 8.5.21:

In the interest of the Prosperity of the country, a king should be diligent in foreseeing the possibility of calamities, try to avert them before they arise, overcome those which happen, remove all obstructions to economic activity and prevent loss of revenue to the state. (Arthashastra 8.4.50, 8.5.21)

Kutipan di atas menunjukkan, bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan negara penguasa perlu memetakan kemungkinan malapetaka yang terjadi, mencoba mencegah hal tersebut sebelum terjadi, dan menanganinya ketika malapetaka tersebut terjadi. Upaya menjaga perekonomian negara tidak hanya melibatkan sisi ekonomi namun juga sisi keamanan dan pertahanan negara yang dibantu oleh militer. Pemimpin

⁶⁹ Wawancara Prof. Dr. I Made Titib (2 Oktober 2018) dan Dr. I Gede Suwantana

negara harus mampu mengelola dan memegang kekuasaan penuh atas perbendaharaan atau perekonomian serta pengelolaan angkatan bersenjata atau militernya. Chanakya menyatakan dengan jelas, bahwa baik militer maupun ekonomi memiliki signifikansi yang sama-sama penting dalam menanggulangi ancaman keamanan dan pertahanan negara. Militer dibutuhkan untuk menjaga negara dari serangan musuh dan menjaga kekayaan yang telah dimiliki oleh negara, namun militer juga membutuhkan sokongan ekonomi untuk menjalankan tugas dan fungsinya.⁷⁰

Dalam pandangan Chanakya, ancaman secara eksternal yang paling potensial adalah dari negara yang berbatasan langsung dengan negaranya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara tetangga merupakan musuh paling potensial di mana ancaman eksternal terhadap negara paling tinggi berasal dari negara tetangga ini. Pemetaan ancaman utamanya ancaman dari luar negara dijabarkan dalam teori Mandala. Posisi geografis dari sebuah negara yang berdekatan/berbatasan langsung dikategorikan sebagai musuh alami dan paling potensial. Kemudian setiap negara yang beraliansi dengan negara tetangga tersebut juga akan dikategorikan sebagai musuh.⁷¹ Di lain pihak, musuh dari negara tetangga tersebut selayaknya diajak bekerjasama karena dikategorikan sebagai kawan. Bahasa mudahnya adalah “musuh dari musuhmu adalah teman, dan teman dari musuhmu adalah musuh.”

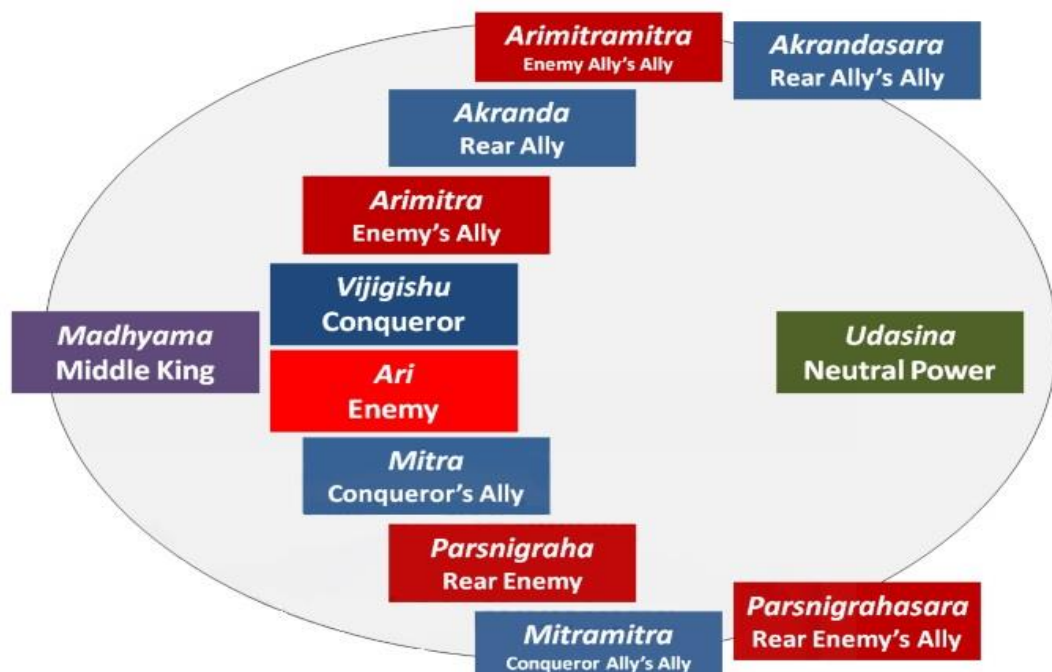
Mandala Theory – The Circle of State Theory, menjabarkan konstelasi geopolitik dari sebuah negara⁷². Teori Mandala ini menyertakan setidaknya 12 kategori negara dalam lingkaran negara/ *circle of a state*. Pertama, *vijigīṣu* (*the would be conqueror*) atau negara yang berhasrat untuk menaklukkan negara lain. Kedua, *ari* (*enemy*) musuh utama negara

⁷⁰ R Shamasastri, *Kautilya's Arthashastra*, 2013, Hlm. 447-8 dalam https://archive.org/details/Arthashastra_English_Translation/page/n1 diakses pada 20 September 2018

⁷¹ RP Kangle, *The Arthashastra Part II* (Delhi: Motilal Banaridass, 1992), hlm 318. Adhikarana 6. Bab 2. Sutra 13

⁷² Merujuk kepada *Vijigīṣu*/ raja/ negara penakluk, yang diposisikan berada ditengah negara-negara lain dalam konstelasi percaturan politik internasional dunia yang berupaya saling menaklukkan/ mempengaruhi satu sama lain.

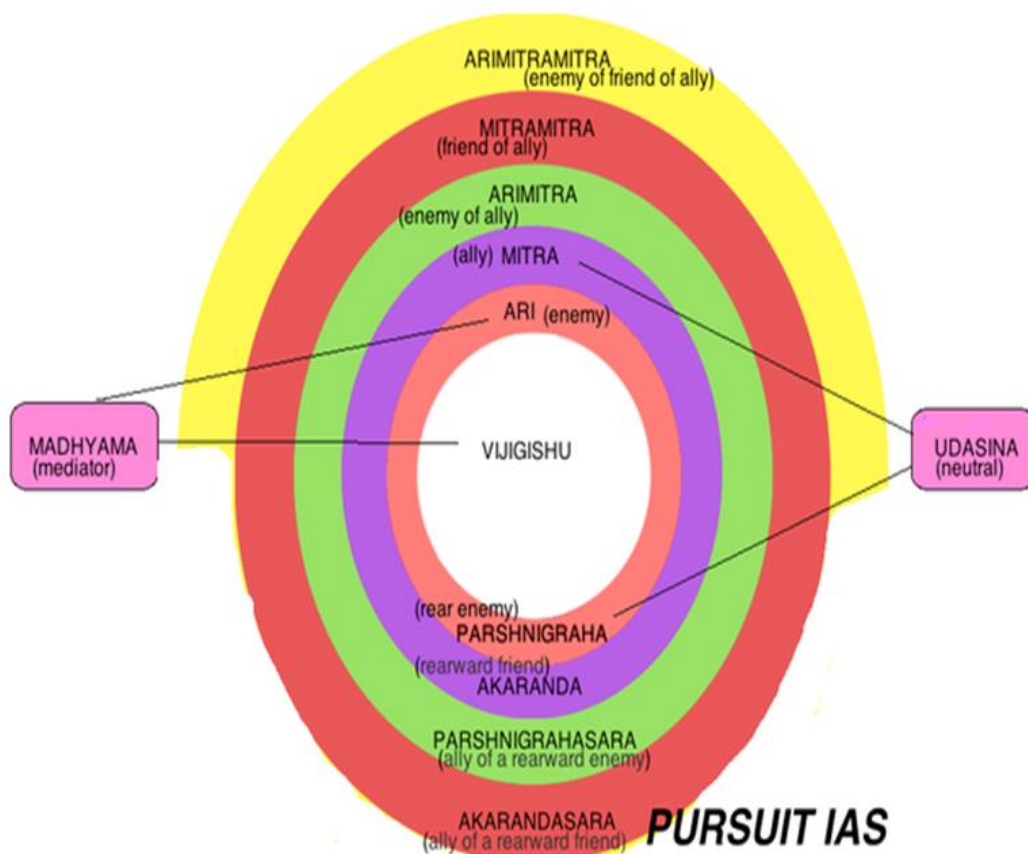
penakluk. Ketiga, *mitra* (*the vijigīṣu's ally*) sekutu dari sang vijigīṣu. Keempat, *arimitra* (*ally of enemy*) sekutu dari musuh. Kelima, *mitramitra* (*friend of ally*) kawan dari sekutu sang vijigīṣu. Keenam, *arimitramitra* (*ally of enemy's friend*) kawan dari sekutu sang musuh. Ketujuh, *parasnigraha* (*enemy in the rear of the vijigīṣu*) musuh di garis belakang sang vijigīṣu. Kedelapan, *akranda* (*vijigīṣu's ally in the rear*) sekutu dari sang vijigīṣu di garis belakang. Kesembilan, *parasnigrahasara* (*ally of parasnigraha*) sekutu dari musuh di garis belakang sang vijigīṣu. Kesepuluh, *akrandasara* (*ally of akranda*) sekutu dari akranda. Kesebelas, *madhyama* (*middle king bordering both vijigīṣu and the ari*) negara tengah yang berbatasan dengan vijigīṣu serta *aria tau* musuh. Sementara itu yang keduabelas, *udasina* (*lying outside, indifferent/ neutral, more powerful than vijigīṣu, ari and madhyami*) negara netral/ acuh tak acuh, berada diluar dari lingkaran, biasanya lebih kuat dari vijigīṣu, ari, dan juga *madhyami*.⁷³ Gambaran konstelasi geopolitik dalam *mandala theory* dapat dilihat dari ilustrasi pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Konstelasi Geopolitik dalam teori mandala
sumber: Vittal, 2011

⁷³ R.P. Kangle, 1986 *op. cit.* hlm. 248

Namun hal yang perlu digaris-bawahi adalah dalam konstelasi geopolitik ini tidak serta merta kemudian secara harfiah menyatakan bahwa sang *vijigīṣu* atau negara yang berniat untuk menaklukkan menjadi pusat dari negara-negara lainnya. Ilustrasi di atas merupakan bentuk simbolis semata, di mana dalam keadaan nyata sangat memungkinkan terbentuknya mandala yang saling tumpang tindih, tergantung pada konstelasi arah kerjasama ataupun analisa lingkungan strategis dalam percaturan politik regional maupun global. Konstelasi geografis ini bersifat dinamis, di mana negara tetangga bisa saja bermusuhan, ramah atau bersifat hubungan vasal (negara bawahan)⁷⁴.



Gambar 4.2 Ilustrasi Teori Mandala
sumber: <https://www.pursuitias.org>, 2018

⁷⁴ Kangle, 1986, *Op. cit.* hlm 249

Hal ini ditegaskan oleh R.P Kangle (1986), bahwa Chanakya sesungguhnya tidak memukul rata seluruh negara yang menjadi tetangga adalah musuh. Hal ini dibahas pada *adhikarana* ketujuh, bab 18 sutra ke-29, bahwa:

Para pangeran negara tetangga, *samantas*, biasanya dianggap bermusuhan. Tetapi ada kemungkinan bahwa beberapa dari mereka mungkin memiliki perasaan ramah terhadap *vijigīṣu* (negara yang berhasrat menaklukkan), sementara yang lain mungkin bahkan tunduk padanya. Negara-negara tetangga terbagi ke dalam tiga kategori; *aribhavin* (dari disposisi bermusuhan), *mitrabhavin* (dari disposisi ramah) dan *bhrytyabhavin* (dari disposisi persaudaraan).⁷⁵

Dilihat dari penyampaian tersebut maka sesungguhnya sebuah negara perlu memetakan cara yang akan dipakai untuk menghadapi negara-negara tetangganya.

Hal tersebut dibenarkan oleh para narasumber⁷⁶ bahwa kategorisasi negara ini berdasarkan kepada beberapa hal seperti: tindakan/perilaku yang ditunjukkan para negara tetangga terhadap *vijigīṣu*, kesamaan tujuan yang ingin dicapai, perbedaan kepentingan, muatan politis aliansi negara tetangga tersebut dengan negara lainnya dan lain sebagainya. Lebih Jauh, dalam pandangan Chanakya negara tetangga secara alami dipandang sebagai musuh potensial, namun tidak serta merta semua negara tetangga adalah musuh. Jika negara tetangga selalu menunjukkan sikap dan kebijakan-kebijakan yang berseberangan dan merugikan sang *vijigīṣu* bahkan berpotensi mengancam, maka negara tetangga tersebut dikategorikan sebagai *aribhavin*. Sementara, jika negara tetangga tersebut bersikap kooperatif dengan sang *vijigīṣu*, melakukan banyak kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, memiliki visi bersama akan keamanan dan perdamaian kawasan, maka negara tetangga tersebut bukanlah musuh, melainkan sebagai *mitrabhavin*.

⁷⁵ R.P. Kangle. 1986. *Op. cit.* hlm. 250

⁷⁶ Wawancara Prof. Dr. I Made Titib (wawancara 2 Oktober 2018) dan Dr. Yoga Segara (4 Oktober 2018)

Jika ditelaah lebih jauh terlihat bahwa teori mandala merupakan salah satu dasar dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang dijalankan pada masa dinasti Maurya di bawah supervisi dari *Acharya* Chanakya. *Mandala theory* yang diungkapkan oleh Chanakya, sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran di atas merupakan konstelasi geopolitik dari negara-negara yang berdampingan dengan negara *vijigīṣu*. Teori ini menyatakan bahwa ancaman potensial muncul dari negara yang berbatasan langsung atau negara bertetangga. Dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Chanakya selalu mengingatkan pemerintahan dinasti Maurya untuk berpedoman terhadap teori ini dalam menentukan posisi negara yang akan diajak bekerjasama ataupun akan ditaklukkan.

Dengan demikian, menurut beberapa narasumber⁷⁷, *Acharya* Chanakya selalu menekankan bahwa dalam menjalankan diplomasi, raja/pemimpin negara selayaknya selalu berpedoman pada beberapa hal. Terutama adalah teori mandala, mengenai konstelasi geopolitik negara yang akan diajak bekerjasama atau akan ditaklukkan. Pasca menentukan posisi dari negara yang ditargetkan tersebut, langkah selanjutnya adalah kebijakan apa yang akan diambil untuk menghadapi negara tersebut yakni *ṣāḍguṇya* atau *six fold foreign policy*. Berikutnya, baru diputuskan upaya apa yang akan ditempuh sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri tersebut (*catur upaya*), apakah *sama*, *dama*, *bedha* dan atau *danda*. Tetapi, yang perlu ditekankan adalah sifat dari kebijakan dan arahan dari Chanakya ini tidak bersifat kaku dan harus sama dengan yang tertulis. Justru kalau dipandang dan diaplikasikan demikian, filsafat politik dari Chanakya ini akan mudah usang dan termakan zaman. Maka dari itu, fleksibilitas dan dinamisme-nya harus tetap dijalankan sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan konstelasi perpolitikan internasional yang terjadi.

Bagi Chanakya dalam membuat sebuah strategi termasuk strategi diplomasi pertahanan pengetahuan mengenai pemetaan ancaman adalah

⁷⁷ Wawancara Dr. Yoga Segara (4/11/2018), I Ketut Donder Ph.D dan Dr. (cand.) Ni Kadek Surpi Aryadharm

hal yang sangat penting. Raja/ pemimpin negara harus mampu memetakan ancaman yang dapat terjadi kedepannya melalui pola-pola tindakan ataupun isu yang berkembang baik dalam skala regional maupun global. Di sinilah peranan dari *secret agent* atau intelijen negara bertindak. Intelijen negara sebagai perpanjangan mata dan telinga raja harus mampu mencari informasi-informasi yang penting bagi raja.

Pada zaman dahulu, sistem telik-sandi digunakan oleh para intelijen kerajaan sehingga persebaran informasi penting bisa sampai ke telinga raja dengan lebih cepat namun tetap terjaga kerahasiaannya. Mandala-mandala yang diciptakan oleh negara itu sesungguhnya juga menjadi sasaran dasar kerja intelijen pada masa itu. Pada negara sahabat (*mitra*) intelijen berfungsi untuk memperoleh informasi yang sekiranya dapat mendeteksi apakah ada kemungkinan mitra ini membelot menjadi musuh. Sementara pada negara musuh (*ari*) intelijen ini tidak hanya untuk mencari kelemahan lawan, tak jarang pula Chanakya menyarankan operasi intelijen di negara musuh yang bertujuan untuk mengacaukan dan melemahkan sang musuh agar lebih mudah ditaklukkan saat diserang nantinya.⁷⁸

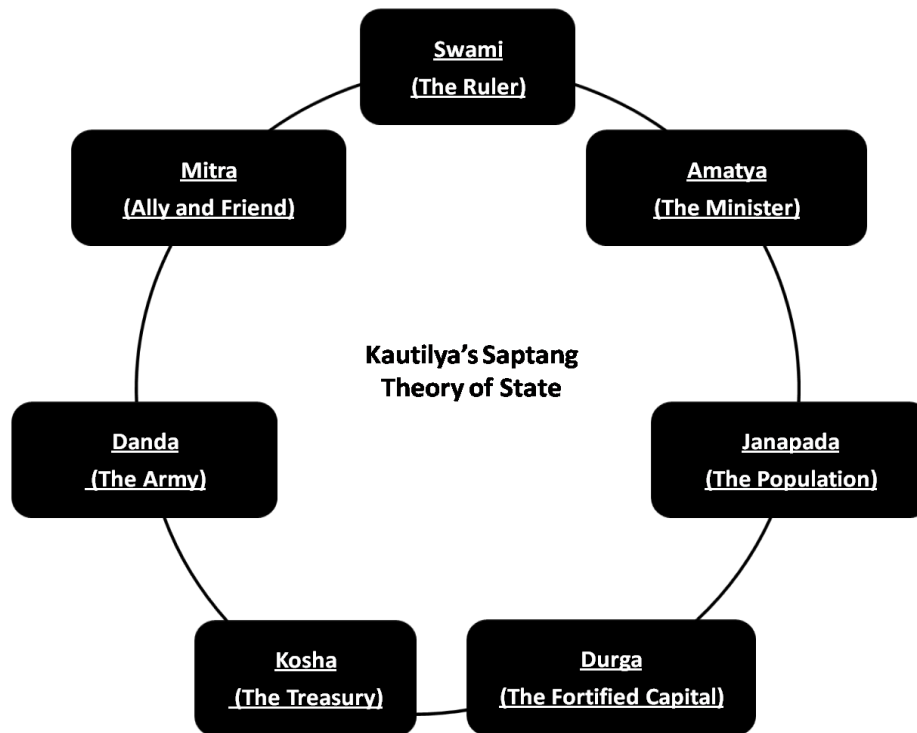
4.1.3 Konsep Tata Pemerintahan (*Statecraft*) dalam Arthashastra

Saptanga Theory menggambarkan mengenai tujuh elemen yang membentuk sebuah negara. Negara dalam Arthashastra dianalogikan sebagai organisme yang berkembang dan *prakritis* adalah bagian tubuhnya⁷⁹. Tujuh bagian ini antara lain: *Swamin* (*Ruler*, Raja/ Penguasa/ Pemimpin negara); *Amatya* (*concilors*/ anggota dewan/ mereka yang mewakili institusi negara); *Janapada* (*Territory/ resources*/ sumber daya negara, termasuk wilayah dan penduduk); *Durg* (*Well-fortified Sovereign entity*/ entitas berdaulat yang dibentengi); *Kosa* (*Treasury*/ Perbendaharaan); *Danda/ Bala* (*Military/ Army and order keeping*/ Militer

⁷⁸ Wawancara Dr. I Gde Suwantana, Dr. (Cand.) Ni Kadek Surpi Aryadharma dan I Ketut Donder Ph.D

⁷⁹ Sukra, *Sukraniti*, (Mumbai: Khemraj Shrikrisnadass, 2012) chapter 1, sutra 62

dan penjagaan ketertiban); dan *Mitra* (*Friend/ Ally/ teman dan sekutu negara*).⁸⁰ Ilustrasi dari saptanga ini dapat dilihat pada Gambar 4.3 tentang ilustrasi *saptanga* Teori.

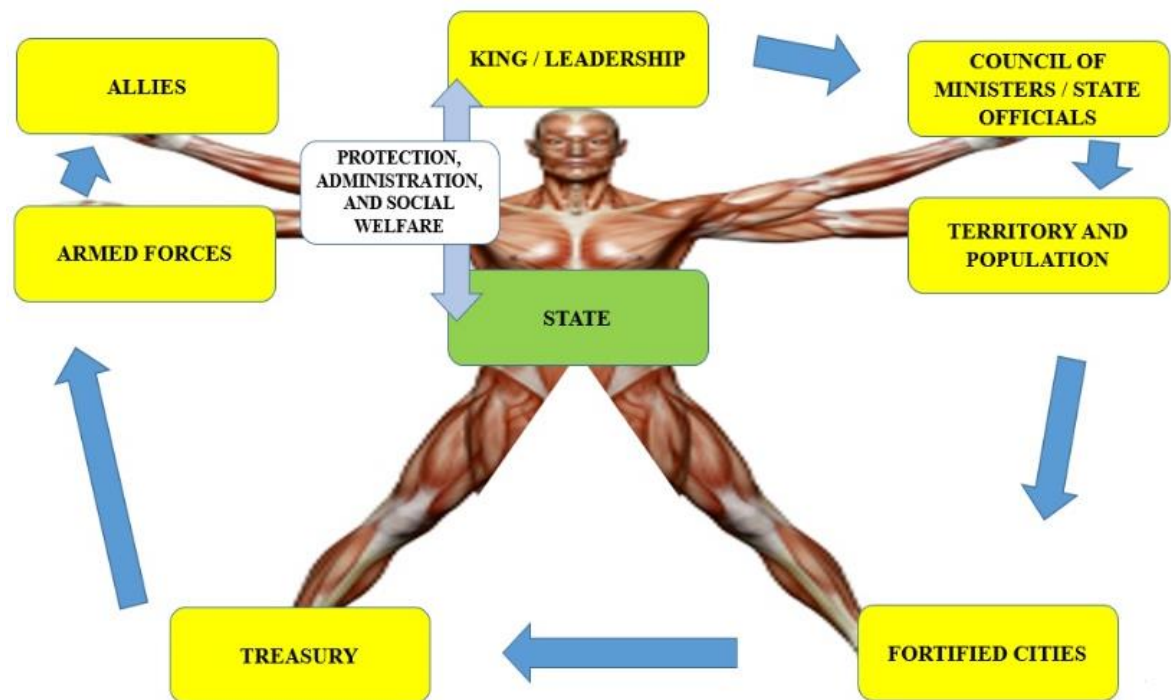


Gambar 4.3 Ilustrasi Saptanga Teori
Sumber: <http://www.defencestudies.co>, 2017

Ketujuh elemen ini saling terhubung. Hirarki derajat kepentingan setiap elemen secara berurut dimulai dari *Swami* atau pemimpin negara; *Amatya* atau pejabat legislatif negara; *Janapada* atau populasi dan wilayah; *Durga* atau kota yang dibentengi; *Kosha* atau perbendaharaan negara; *Danda* atau angkatan bersenjata, kapabilitas militer negara, dan yang terakhir adalah *Mitra* atau sekutu. Secara garis besar derajat kepentingan merujuk pada skala prioritas ketika terjadi ancaman terhadap elemen-elemen negara ini. Sehingga ketika terjadi ancaman terhadap Pemimpin negara (*swami*) dan juga Pejabat legislative negara (*Amatya*) maka perlindungan terhadap Pemimpin negara menjad jauh lebih penting daripada perlindungan terhadap Pejabat Legislatif negara. bentuk hirarki ini dapat

⁸⁰ Kautilya Arthashastra 6.1.1

dilihat pada Gambar 4.4 mengenai Saptanga (Tujuh elemen yang membentuk negara)



Gambar 4.4 Saptanga (Tujuh Elemen yang membentuk Negara)
Sumber: Kumar, 2003

Namun yang perlu di tekankan adalah Chanakya sendiri tidak menganjurkan negaranya untuk mengikuti hirarki ini secara membabi-buta. Analisis dan berbagai pertimbangan tetap menjadi dasar dalam menentukan derajat kepentingan. Ancaman terhadap salah satu elemen atau lebih tetap harus disikapi dengan hati-hati, penuh kewaspadaan sehingga tidak mengganggu stabilitas dan sustainabilitas negara.

Bagian Pertama dari *Saptanga* adalah *Swami/ Ruler/ King/* Pemimpin Negara. Bagian ini menempati posisi paling penting. Bagi Chanakya kekuatan dan kesejahteraan negara itu bergantung paling banyak dari kualitas pemimpinnya. Bagi Chanakya pemimpin negara merupakan sumber perkembangan sosial dan kesejahteraan sebuah negara.

Hal ini ditegaskan oleh beberapa narasumber⁸¹ bahwa dalam konsep Hindu, termasuk juga dalam Arthashastra karya *Acharya Chanakya*, raja atau pemimpin negara itu sangat krusial posisinya. Kualitas seorang raja atau pemimpin menentukan kesejahteraan dan keberlangsungan negara itu sendiri. Pemimpin harus memiliki kualitas yang baik sebagaimana disebutkan dalam sastra-sastra Hindu yaitu *Astabrata*. Di mana pemimpin memiliki kualitas-kualitas delapan dewata.⁸²

Kualitas *astabrata* ini juga diharapkan dalam pola kepemimpinan jawa sebagaimana dibahas oleh Soemarsaid Moertono.⁸³ Raja-raja jawa pada abad XVI-XIX dituntut untuk menjadi raja yang adil, bijaksana dan memiliki kualitas kepemimpinan yang disebut sebagai *astabrata*. Pemimpin juga harus mampu memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya. Raja atau pemimpin negara harus memiliki ketegasan dan merupakan pribadi yang *visioner*. Mampu memetakan ancaman yang kira-kira dapat mengancam keberlangsungan negara kedepannya dan mampu merancang strategi yang tepat untuk menghalau ancaman tersebut agar tidak terjadi dan merusak negara di kemudian hari. Pemimpin negara harus memiliki kecerdasan emosional, ketegasan, kecakapan, kesigapan dan cekatan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus mampu mempelajari kesejarahan, dalam arti mampu belajar dari masa lalu mengenai pola-pola

⁸¹ Wawancara Dr. I Ketut Donder (15 November 2018), Prof. Dr. I Made Titib (2 oktober 2018) dan Dr. I Gede Suwantana

⁸² *Asta brata*: konsep kepemimpinan yang mengambil contoh pedoman dari delapan sifat dewata: (1) *Indrabrata*: pemimpin seperti Dewa Indra, memberi kesejahteraan, (2) *Yama Brata*: pemimpin seperti Dewa Yama: mampu menegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. (3) *Surya Brata*: Pemimpin seperti Dewa Surya/Matahari: memberikan sinar secara adil dan merata pada seluruh rakyat. (4) *Candra Brata*: Pemimpin seperti Dewa Candra/ Bulan: memperlihatkan wajah tenang berseri-seri, menenangkan. (5) *Bayu Brata*: Pemimpin seperti Dewa Bayu/ Angin: punya kemampuan menyelidiki hingga ke celah-celah tersembunyi. (6) *Kuvera Brata*: Pemimpin seperti Dewa Kuvera: Bijaksana menggunakan dana/ keuangan dan selalu berhasrat mensejahterakan rakyat. (7) *Baruna Brata*: Pemimpin Seperti Dewa Baruna: mampu memberantas segala bentuk penyakit yang berkembang di masyarakat. (8) *Agni Brata*: Pemimpin seperti Dewa Agni: seallau mampu memotivasi tumbuhnya semangat dan sifat ksatria

⁸³ Soemarsaid Moertono, *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018), hlm. 49-58

ancaman yang bisa terjadi, pola-pola/pattern yang terdapat dalam analisa konstelasi politik global, sehingga negara akan tetap eksis dan semakin kuat kedepannya.

Bagian kedua dari tujuh elemen yang membentuk negara adalah *Amatya* atau *Minister* (Menteri). Chanakya menyatakan bahwa tidaklah mungkin bagi seorang raja untuk memerintah secara efisien dan berhasil jika berjalan sendiri. Sama halnya seperti kereta tidak mungkin berjalan hanya dengan satu roda saja. Jumlah menteri ini tidak diberi patokan khusus, pengangkatannya disesuaikan dengan kebutuhan negara saat itu. Menteri menurut Chanakya harus memiliki kualitas berikut ini, seperti: penduduk asli negara tersebut, *visioner*, bijaksana, memiliki ingatan yang baik, lahir dari keluarga besar, berpengaruh, terlatih dalam seni, waspada, fasih, berani, cerdas dan memiliki antusiasme, kekuatan, serta ketekunan.⁸⁴

Janapada merupakan bagian ketiga dari tujuh elemen yang membentuk negara. *Janapada* merujuk pada pengertian dua elemen sekaligus yakni wilayah dan juga populasi. Namun Dr. Gde Suwantana dalam wawancara pada 15 November 2018 menegaskan bahwa ada hal yang perlu dicermati pada bagian ini. Jika kita melihat konteks kerajaan zaman dahulu yang masih bersifat *land-base* maka luas wilayah/ teritori dari sebuah negara akan menentukan seberapa kaya-nya negara tersebut. Semakin luas wilayah teritorinya maka semakin berkuasalah negara tersebut. Dengan demikian, bentuk perluasan kekuasaan pada masa itu merujuk kepada invasi atau pencaplokan wilayah negara lain untuk memperluas teritori sekaligus mengambil alih seluruh sumber daya yang terdapat dalam teritori wilayah negara yang diakuisisi tersebut. Namun semenjak perjanjian Westphalia, di mana kedaulatan negara dijamin dan tidak ada satupun negara yang boleh melakukan invasi terhadap negara lainnya, maka terjadi pergeseran yang sangat berarti dalam konteks

⁸⁴ Mohinder Kaur, "Political and Administrative Ideas of Manu and Kautilya: A Comparative Study", *Doctoral Dissertation*. (Patiala: Department of Political Science, Punjabi University, 2011) hlm. 72-85

kekuasaan ini. Kekuasaan tidak lagi secara harfiah dengan cara menduduki wilayah negara lain, namun lebih kepada penguasaan simbolis terhadap tiga hal mendasar yaitu penguasaan terhadap ekonomi (termasuk sumber daya alam), Teknologi (termasuk *cyber*), dan juga penguasaan terhadap ilmu pengetahuan.⁸⁵

Durga (Fortified Cities) adalah kota yang dibentengi menjadi bagian keempat dalam tujuh elemen penting pembentuk negara. Untuk dapat mengerti mengapa benteng ini penting kita harus mampu melihat situasi keadaan kerajaan Maurya saat itu. Situasi geografis di India utara dan sifat pertempuran di zaman kuno membuat ibu kota yang dibentengi itu menjadi dianggap sangat penting bagi keamanan dan keselamatan kerajaan.⁸⁶

Bagian kelima adalah *Kosa (treasury)* perbendaharaan atau perekonomian negara. Sumber utama pendapatan suatu negara pada zaman dahulu adalah perpajakan masih sama seperti saat ini. Chanakya telah mengembangkan prinsip-prinsip tertentu untuk membimbing raja dalam kebijakan perpajakannya. Pengambilan pajak dari rakyat ini tidak boleh terlalu ringan ataupun terlalu berat. Sebagaimana lebah yang mengambil madu dari bunga tanpa merusaknya, maka demikian pula raja/pemimpin negara harus bisa mengambil pajak dari rakyatnya tanpa membahayakan ataupun terlalu membebani mereka.⁸⁷

Bala (Army) atau tentara/angkatan bersenjata merupakan bagian keenam dari tujuh elemen pembentuk negara. Chanakya bahkan menjelaskan cukup terperinci mengenai bagian ini. Bagaimana tentara yang baik, pasukan yang berkualitas dibentuk oleh para *Kshatriya*, namun tidak menutup kemungkinan *varna* lainnya seperti *waisya* dan *sudra* juga diperbantukan dalam tentara jika dibutuhkan.⁸⁸

⁸⁵ Wawancara Dr. I Gede Suwantana, 16 November 2018

⁸⁶ Wawancara Dr. I Ketut Donder, Ph.D, 15 November 2018.

⁸⁷ Kaur, *Op.cit.* hlm. 38-9

⁸⁸ Kaur, *op.cit.* hlm. 40

Bagian terakhir dari tujuh elemen pembentuk negara adalah *Mitra* (*ally*) adalah sekutu atau pihak yang diajak bekerjasama. Keberadaan *Mitra* atau sekutu, pihak yang diajak bekerjasama atau membentuk aliansi sebagai bagian dari elemen pembentuk negara tentu menjadi hal yang terlihat sedikit berbeda dari konsep barat. Bagi umat Hindu pada zaman dahulu negara merupakan entitas konkret yang berdiri dalam hubungan yang memiliki derajat kedekatan tertentu dengan entitas lain yang memiliki sifat yang sama. Hubungan kerjasama atau aliansi. Mitra ini sangatlah statis dan begitu dinamis.

Chanakya menggambarkan ketujuh elemen pembentuk negara itu sebagai eksposisi dari teori Mandala (*circle of state*) yang kemudian membentuk dasar dari kebijakan luar negeri di lingkungan yang didominasi oleh ekspansionisme teritori atau penaklukan teritori. Maka dari itu, sebelum melanjutkan sebuah ekspedisi untuk menaklukkan wilayah lain, raja atau pemimpin negara harus menggunakan langkah-langkah preventif dan defensif untuk menghalau bahaya/ ancaman yang mungkin melemahkan salah satu unsur penyusun negaranya sendiri. Menurut Chanakya, raja harus selalu berusaha dengan sangat gigih untuk melakukan tugas dan tanggung-jawabnya terhadap rakyat negaranya. Tugas dan tanggung jawab tersebut meliputi memberikan perlindungan, melayani administrasi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Ketujuh elemen ini kemudian secara tidak langsung juga menjadi pedoman ukuran mengenai kekuatan nasional yang komprehensif dari sebuah negara. Kualitas raja atau pemimpin menentukan apakah negara tersebut akan bisa memiliki power yang baik atau tidak. Maka dari itu, Chanakya menetapkan serangkaian prasyarat yang tinggi, berupa kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh seorang raja sebagai pemimpin negara, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Raja yang ideal menurut Chanakya merupakan perwujudan dari kualitas kepemimpinan yang mumpuni, energi intelektual yang besar, serta karakter

pribadi yang adi luhur. Raja sebagai pimpinan negara juga harus aktif dalam manajemen perekonomian negara.

Chanakya menyatakan bahwa semua kegiatan negara itu bergantung pada perbendaharaan atau perekonomian negara. Tak dapat dipungkiri bahwa dari kekayaan ini pula kekuatan pemerintah bisa muncul. Perbendaharaan ini pula yang kemudian mendanai angkatan bersenjata untuk kemudian dapat bertugas melindungi negara sekaligus juga dimanfaatkan untuk memperoleh wilayah atau teritori baru melalui ekspedisi penaklukan. Maka dari itu kemudian Chanakya menyarankan agar pemimpin negara atau raja memastikan kontrol aktif terhadap perbendaharaan dan militer ini.

Chanakya juga menegaskan bahwa administrasi pemerintahan yang efisien merupakan prasyarat bagi perekonomian negara yang sedang berkembang. Maka dari itu, Chanakya kemudian menyarankan seorang raja selayaknya memastikan pemerintahannya berjalan dengan administrasi yang efektif, hukum dan ketertibannya terjaga. Dengan hukum dan ketertiban yang terjaga ini muncul stabilitas keamanan dan juga perekonomian. Singkat kata ketujuh elemen ini harus dijaga sedemikian rupa agar tidak melemah, agar tercipta keamanan, kesejahteraan dan juga prestise negara yang baik di mata internasional.

Konsep *Saptanga* teori ini tidak hanya dipandang sebagai tujuh elemen yang harus dimiliki negara yang menginginkan kekuatan yang mumpuni bagi bangsanya. Dalam interpretasi yang lain Konsep *Saptanga* juga dimaknai sebagai *Elements of Sovereignty*.⁸⁹ Di mana sebuah negara selayaknya menjaga ketujuh elemen ini dari ancaman yang bisa melemahkan salah satunya. Karena pelemahan salah satu elemen dalam *saptanga* ini dapat memicu kelemahan pada elemen-elemen lainnya. Dengan demikian, untuk mencapai kekuatan nasional yang komprehensif

⁸⁹ Col. Harjeet Singh, *The Military Strategy of The Arthashastra*, (New Delhi: Pentagon Press, 2012) hlm 32

negara selayaknya mampu menjaga dan bahkan memperkuat kualitas ketujuh elemen saptanga ini.

Tujuh *prakritis* bersama-sama termanifestasi menjadi Shakti atau kekuatan bagi negara. Arthashastra mengidentifikasi tiga *shakti*: *Prabhava-shakti*, *Mantra-shakti* dan *Utsaha-shakti*. *Prabhava-shakti* dimaknai sebagai kekuatan untuk menghasilkan "efek" yang menguntungkan negara yang berkaitan dengan ekonomi dan juga kekuatan militer suatu negara. Dengan demikian, dalam pendekatan ilmu Hubungan Internasional saat ini, dapat diasosiasikan dengan konsep *hard power*. *Mantra-shakti* dimaknai sebagai kekuatan untuk mempengaruhi, memberi nasihat, dan mendorong negara lain untuk dikooptasi oleh sang *vijigīṣu*.

Dalam ilmu Hubungan Internasional, konsep ini sering diidentikkan dengan *soft power* berupa diplomasi dan juga kemampuan negosiasi, mempengaruhi dan meyakinkan kawan serta mencurangi lawan.⁹⁰ Uniknya, Arthashastra memperkenalkan *utsaha-shakti* mewakili kekuatan pribadi pemimpin yang memberikan dorongan, energi, dan arah ke enam *prakritis* lainnya. Chanakya menetapkan *mantra-shakti* sebagai yang paling penting dari ketiganya. Tiga kekuatan berinteraksi secara "kualitatif" untuk menghasilkan *comprehensive national power*. Gambaran lebih jelas mengenai posisi dari ketiga power ini dapat dilihat pada gambar 4.5 mengenai ilustrasi tiga *shakti* menurut Chanakya dalam bukunya, Arthashastra.

⁹⁰ Rangarajan. *op.cit* hlm. 559.



Gambar 4.5 Ilustrasi Tiga Shakti menurut Chanakya
Sumber : Mishra, Malay, 2017

Dalam penjelasan berikutnya, Chanakya menjelaskan bahwa *prabhava shakti* ini menjadi lebih penting dan tinggi kedudukannya dari pada *utsaha shakti*. Jika dilihat berdasarkan definisi yang diberikan mengenai *prabhava shakti*, kekuatan ini dapat diasosiasikan sebagai sebuah *deterrence effect* yang dimiliki negara⁹¹. Di mana baik itu kekuatan ekonomi dan militer yang cakap dapat membuat negara memiliki posisi daya tawar dan daya tangkal yang lebih kuat dibandingkan negara yang tidak memiliki kualitas cukup dalam kedua aspek tersebut. Demikian pula yang berkembang pada masa saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan militer dan ekonomi sebuah negara menjadi *power* tersendiri yang sering kali membuat negara memenangkan diplomasi yang dilaksanakan di atas meja.

Konsep kekuatan nasional menurut Chanakya berangkat dari keadaan *saptanga* (tujuh elemen pembentuk negara) yang sehat dan kuat.

⁹¹ Malay Mishra, "Unique Approach to Comprehensive National Power Through the Lens of Kautilya's Arthashastra", *Journal of The United Service Institution of India*, Vol. CXLVII, Nomer 607, Januari-March 2017.

Dengan demikian, sudah menjadi tugas penguasa negara untuk memajemen elemen-elemen ini dan mengoptimalkan posisinya hingga mencapai keunggulannya masing-masing. Coates dan Caton (dalam Adityakiran, 2015) berargumen, memiliki kesamaan yang mencolok dengan konsep 'soft - hard power' Nye: *mantrashakti* tidak lain adalah *soft power*, sementara *prabhavashakti* adalah *hard power*, dan di atasnya, Chanakya melayani dimensi lain *utsahashakti* untuk memberikan kekuatan pendorong untuk mengarahkan dua lainnya bersama dengan energi yang terfokus dan kokoh.⁹²

Pemikiran mengenai *shakti* yang dibangun 2.300 tahun yang lalu, termasuk kekuatan pendorong *utsahashakti*, menemukan relevansi bahkan sampai hari ini. Genre para pemimpin nasional masa kini seperti Cina, India, Jepang mewakili para *swami* atau penguasa negara menurut Chanakya. Sementara manifestasi *utsahashakti* mereka adalah ciri khas dari kebangkitan Cina, India, dan Jepang dalam percaturan politik global abad sekarang ini.⁹³

4.1.4 Konsep Diplomasi dalam Arthasashastra

Terkait dengan hubungan antarnegara dan diplomasi, terdapat beberapa pandangan-pandangan Chanakya dalam Arthashastra yang sering kali di rujuk. Salah satunya adalah *Ṣāḍḡuṇya theory* atau lebih sering dikenal dengan *six fold foreign policy*. *Ṣāḍḡuṇya* teori ini merupakan enam kebijakan yang diterapkan oleh negara sesuai dengan keadaan lingkungan strategis dari negara tersebut terhadap negara-negara lain dalam lingkup percaturan politik internasional. Keenam kebijakan itu antara lain: *saṃdhi*, *vigraha*, *asana*, *yana*, *samsraya* dan *dvaiddibhava*. Sementara jika terkait dengan aplikasi dan pendekatan dari diplomasi, Chanakya

⁹² G. Adityakiran, "Kautilya's Pioneering Exposition of Comprehensive National Power in the Arthashastra", dalam P. K. Gautam, Saurabh Mishra and Arvind Gupta (eds), *Indigenous Historical Knowledge: Kautilya and His Vocabulary*, Volume I. (New Delhi: IDSA, Pentagon Press, 2015,) hlm. 28–29

⁹³ Malay Mishra, *op.cit.* 77-109

menjabarkannya ke dalam *upaya*. *Upaya* ini merupakan pendekatan, alat, ataupun cara untuk merealisasikan tujuan atau objek dari diplomasi. *Upaya* ini terdiri dari empat bagian yaitu, *sama, dama, bedha, danda*.⁹⁴

Diplomasi secara umum dalam Arthashastra karya Chanakya dibahas dengan apa yang disebut sebagai *mantrashakti* yang merupakan bagian dari tiga *shakti* atau kekuatan atau *power* yang harus dimiliki sebuah negara untuk mencapai kekuatan nasional yang paripurna. *Mantrashakti* merupakan kekuatan yang dibangun di atas kecerdasan dan kekuatan narasi manusia termasuk perkataan dan tulisan. *Mantrasahakti* dalam Arthashastra dikenal sebagai *soft power diplomacy*, yakni menasehati, mengarahkan, sesuatu melalui kekuatan lisan yang membuat seseorang ataupun sebuah negara bersedia melakukan sesuatu ataupun bersepakat akan suatu hal yang membawa dampak positif terhadap tujuan negara.

Kebahagiaan dan kesejahteraan merupakan tujuan utama negara sedangkan *power* (kekuasaan atau kekuatan) bagi Chanakya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Guna memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan melalui penggunaan dan pemanfaatan *power* yang lebih besar, Chanakya kemudian menjabarkan enam kebijakan yang harus diikuti oleh *vijigīṣu* sesuai dengan kebutuhan, keadaan serta tujuan yang hendak dicapai. Keenam kebijakan ini dikenal dengan nama *ṣāḍgunya* dan digunakan untuk mengimplementasikan teori mandala lebih tepat dan sesuai dengan keadaan yang terjadi/muncul pada situasi politik tertentu.

Ṣāḍgunya Theory (Six Fold Foreign Policy) atau Enam kebijakan politik luar negeri, menurut Chanakya merupakan penentuan (kebijakan) dari sebuah negara apakah akan mundur, stabil/berdiam diri atau maju pada sebuah keputusan terkait dengan hubungan luar negeri. Keenam kebijakan politik tersebut adalah membuat perdamaian (*saṃdhi*),

⁹⁴ PK. Gautam, "Relevance of Kautilya's Arthashastra". *Journal of Strategic Analysis*, volume 37, Number 1, (Taylor and Francis, 2013), hlm. 21-28.

melakukan peperangan (*vigraha*), tinggal diam/netral (*asana*), mempersiapkan diri untuk perang atau siaga (*yana*), mencari dukungan atau aliansi (*samsraya*), dan kebijakan ganda (*dvoidibhava*) yaitu membuat perdamaian dengan negara satu sementara itu juga mengadakan peperangan dengan negara lainnya.⁹⁵

Sebuah negara bisa menjalankan lebih dari satu kebijakan di saat yang bersamaan dengan beberapa negara sekaligus. Karena konsep aplikasi dari *ṣāḍgunya* ini tidak berlaku secara kaku sesuai urutan. Namun sesuai perkembangan kondisi lingkungan strategis negara saat itu. Dengan demikian, kondisi yang sedang berlangsung akan menentukan kebijakan apa yang sebaiknya akan digunakan. Ilustrasi bagian-bagian dari *ṣāḍgunya* ini dapat dilihat pada gambar 4.6 mengenai ilustrasi *ṣāḍgunya*.



Gambar 4.6 Ilustrasi *ṣāḍgunya*

Sumber: Hasil Olah Peneliti dari Pemikiran LN Rangarajan, “*The Arthashastra*”, 2018

Bagian Pertama dari *ṣāḍgunya* adalah *saṁdhi* atau pembuatan perjanjian yang mengandung syarat dan ketentuan tertentu. Prinsip umum

⁹⁵ Kautilya Arthashastra 7.13. 42-44: hlm. 366

dalam kebijakan luar negeri adalah ketika sebuah negara berada pada posisi yang relatif lemah dibandingkan kompetitornya, kebijakan perdamaian (*saṃdhi*) haruslah diambil. *Saṃdhi* sendiri berarti aliansi atau penyesuaian diri, di mana raja/negara berusaha saling menyesuaikan diri/kebijakan dan tidak menyelesaikan permasalahan melalui cara-cara yang bermusuhan atau melalui kekerasan. *Saṃdhi* bisa saja bersifat sementara namun bisa juga permanen, tergantung dari lingkungan strategis, situasi, kekuatan, serta kepentingan relatif para raja/negara.⁹⁶

Secara garis besar *saṃdhi* terbagi menjadi beberapa jenis sebagaimana dijabarkan dibawah ini.⁹⁷

a. *Hinasaṃdhi*: Ketika *saṃdhi* didefinisikan sebagai Perjanjian Damai (*Treaty of Peace*), maka *hinasaṃdhi* kemudian terklasifikasi lagi menjadi tiga bagian antara lain:

1. *Dandopanata*: Perjanjian damai di mana tentara menjadi subjek utama dalam perjanjian. Contoh modern dari *dandopanata* antara lain: *Strategic Arms Reduction Treaty* (START) atau perjanjian mengenai perlucutan senjata dan *Strategic Arms Limitation Treaty* (SALT) yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.
2. *Kosapanata*: perjanjian damai di mana keuangan atau perekonomian menjadi subjek utama dalam perjanjian. Ketika dua negara menandatangani perjanjian mengenai keuangan seperti misalnya menentukan *common budget*, penghapusan hambatan perdagangan (*trade barrier*) serta perjanjian dagang hal hal tersebut dikategorikan ke dalam *Kosapanata*.
3. *Desopanata*: perjanjian damai di mana tanah atau wilayah menjadi subjek utamanya. Salah satu contoh perjanjian damai *desopanata* terjadi pada tahun 1903, ketika Prancis

⁹⁶ Satish Karad, *op.cit.* hlm. 328

⁹⁷ Tridib Chakraborti, "Contemporary Relevance of Kautilya's Mandala Theory and Diplomacy", *Politico*, 2016. Volume 3. Number 2, hlm 10-16

memutuskan untuk memberikan Inggris kebebasan di Mesir sementara sebagai gantinya Inggris setuju untuk mengakui Maroko sebagai protektorat Perancis.

b. Jenis kedua adalah ketika *sam̄dhi* digunakan dalam bentuk aliansi dan perjanjian yang berdasarkan pada aliansi maka *sam̄dhi* terbagi menjadi lima jenis, antara lain:

- 1) *Mitrasam̄dhi*: Perjanjian dengan sekutu mengenai beberapa syarat dan ketentuan. *Mitrasam̄dhi* merupakan aliansi pertemanan. Contoh *mitrasam̄dhi* zaman modern adalah Perjanjian persahabatan Indo Soviet (*Indo Soviet Treaty of Friendship*) pada tahun 1971. Perjanjian tersebut ditandatangani antara India dan Uni Soviet yang didasarkan pada beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Perjanjian ini dibentuk sebagai respon atas ditandatanganinya perjanjian aliansi Pakistan dengan Amerika Serikat. Dengan demikian, jika Amerika Serikat menyerang India dalam upayanya mendukung Pakistan sebagai aliansinya, maka Uni Soviet akan membantu India.
- 2) *Hiranyasam̄dhi*: terjadi ketika dua negara menandatangani perjanjian yang bertujuan untuk mengakumulasi emas atau keuangan negara.
- 3) *Bhumisam̄dhi*: terjadi ketika dua negara menandatangani perjanjian aliansi untuk pemindahan/transfer/penyerahan tanah atau wilayah
- 4) *Karmasam̄dhi*: perjanjian untuk menggunakan tentara untuk kepentingan bersama, atau pertukaran militer. Pada zaman modern ada beberapa contoh aplikasi dari *karmasam̄dhi* seperti pada tahun 1956 di mana Inggris dan Perancis berusaha mengirim pasukan ke Terusan Suez untuk “melindungi Terusan Suez dari konflik Israel-Mesir” dan mempertahankan kendali atas kanal yang dinasionalisasi oleh

Presiden Mesir Nasser. Contoh lainnya adalah Perjanjian Indo-Srilanka pada 1988 di mana baik India dan juga srilanka memutuskan untuk bersama-sama menggunakan pasukan tentaranya untuk menghilangkan kelompok pemberontak Macan Tamil di Sri Lanka.

- 5) *Anavasitasam̐dhi*: perjanjian aliansi yang dibuat untuk membantu menjajah tempat yang tidak didiami.

Bagian kedua dari *ṣāḍgunya* adalah *vigraha*. *Vigraha* merujuk pada kebijakan yang menunjukkan permusuhan kepada negara tetangga atau negara lain. Karena negara selalu ada dalam posisi yang saling berperang (berebut pengaruh) dan mencari kekuasaan maka kebijakan luar negeri yang bermusuhan terhadap beberapa negara yang sama kuat atau pun berada pada posisi subordinat itu tetap diperlukan.⁹⁸ Kebijakan ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi defensif dan juga offensif. Defensif merujuk kepada keadaan di mana negara memiliki keyakinan akan kekuatannya untuk menghalau serangan musuh. Sedangkan sisi offensif merujuk kepada keadaan di mana negara memiliki keyakinan bahwa posisi mereka cukup aman dan dapat menghancurkan musuhnya, dan atau merebut wilayah musuh, karena ia terlibat dalam medan pertempuran yang lain.⁹⁹ Namun hal yang kemudian perlu digaris-bawahi adalah Chanakya sangat cemas terkait dengan untung-rugi dari kebijakan ini. Maka dari itu, Chanakya lebih menekankan perjuangan diplomatik (*saṁdhi*) daripada konflik bersenjata (*vigraha*). Chanakya menyatakan bahwa tetangga selayaknya selalu diserang dengan serangan-serangan diplomatik.¹⁰⁰

Bagian ketiga dari *ṣāḍgunya* adalah *asana*. Kebijakan ini diambil ketika negara memilih untuk menunggu dengan harapan musuh mereka melemah dengan sendirinya atau menemui kesulitan/malapetaka. Misalnya

⁹⁸ Chandrashekharan, Pravin. *Op.Cit.* hlm. 13

⁹⁹ Karad *Op.Cit.* hm. 328-9

¹⁰⁰ Chakraborti, *Op. cit* hlm. 12

musuh terlibat perang dengan front lain dengan demikian kekuatannya semakin melemah dan dengan sendirinya sang vijigīṣu menjadi lebih kuat dari musuh itu sendiri.¹⁰¹ Secara alami, kebijakan ini sering kali sejalan dengan kebijakan *saṃdhi*. Tetapi pada saat yang sama dapat dikuatkan dengan kebijakan *vigraha*. Misalnya, dengan merayu subyek musuh dari kesetiaan mereka dengan sarana pertikaian dan propaganda, seseorang akan mencoba melemahkan musuh secara diam-diam.¹⁰²

Bagian keempat dari *śāḍgūnya* adalah *yana*. *Yana* berarti kesiapan untuk bergerak. Pasukan penyerbu dapat mulai bergerak melakukan pawai hanya jika mereka telah benar-benar menjaga wilayah negaranya (kondisi negara aman). Sang vijigīṣu juga selayaknya hanya melakukan *yana* kalau dia yakin dapat menghancurkan lawannya (kemenangan sudah dapat dipastikan).

Bagian kelima dari *śāḍgūnya* adalah *samsraya*. Ini adalah kebijakan perlindungan di mana negara yang lebih kuat mengintervensi dan melindungi negara yang lemah. Chanakya mendukung kebijakan ini, ketika negara yang lebih kuat membutuhkan perisai untuk melindungi dirinya dari kekuatan yang setara. Negara dapat menggunakan kebijakan perlindungan ini baik untuk negara ketiga dan atau menggunakan aliansi ini untuk mempertahankan diri dari musuh potensial. Kebijakan ini terutama direkomendasikan untuk raja lemah yang diserang atau diancam akan diserang oleh musuh yang kuat.

Bagian keenam dari *śāḍgūnya* adalah *dvaiddibhava*. *Dvaiddibhava* merupakan kebijakan tujuan ganda, di mana *saṃdhi* mencari bantuan dalam bentuk perbendaharaan dan pasukan dari satu raja untuk melancarkan permusuhan terhadap raja lain. Kebijakan ini ditujukan untuk raja yang sama-sama kuat posisinya dengan musuh dan dia tidak dapat memenangkan pertempuran tanpa kekuatan tambahan dari sekutunya.¹⁰³

¹⁰¹ Arthashastra 7.1.34

¹⁰² Arthashastra 7.4.5-12

¹⁰³ Arthashastra 7.1.13-18

Salah satu aplikasi dari *dvaiddibhav* pernah dilakukan oleh Henry Kissinger. Ia membuat strategi di mana Amerika Serikat mendekati Cina dan membuat aliansi sedemikian rupa sehingga mempersempit kemungkinan hubungan Rusia dan Cina akan lebih dekat daripada hubungan antara Cina dan Amerika Serikat. Dalam kerangka teori Mandala Chanakya menyatakan bahwa *Dvaiddibhav* terbagi ke dalam lima kategori:

- a. *Mithyachitta* merupakan jenis kebijakan ganda dengan cara memasang *mithya* atau wajah palsu atau kesadaran semu. Dalam prakteknya itu seperti berpura-pura ramah walaupun sebenarnya ia tidak menyukai seseorang/ negara tersebut.
- b. *Mithyavachanasamyam* merupakan jenis kebijakan ganda dengan berbicara suatu hal namun dalam pikirannya adalah hal yang berlainan. Contohnya adalah Perjanjian non agresi antara Nazi Jerman dan Polandia di tahun 1933 di mana Hitler mengatakan bahwa ia tidak berniat menyerang Polandia. Sementara yang dilakukan adalah kebalikkannya di mana pada September 1939 Hitler justru menginvasi Polandia yang berujung pada pecahnya Perang Dunia Kedua.
- c. *Mithyakarana* merupakan jenis kebijakan ganda dengan melakukan suatu hal yang tampaknya untuk kepentingan negara lain namun menumbangkan hal yang sama untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Contohnya adalah Presiden Sri Lanka Jaya Wadene yang menipu Rajiv Gandhi agar India terlibat dalam krisis LTTE (Macan Tamil). India terjebak dalam trik tersebut. Tentara India harus berurusan dengan peperangan, kekacauan, pengungsi, bahkan Rajiv Gandhi membayar hal tersebut dengan sangat mahal, ketika milisi Macan Tamil berhasil membunuhnya. Sementara disisi lain Presiden Sri Lanka Jayawardene berhasil mempertahankan keamanan wilayahnya melalui darah orang-orang India.
- d. *Ubhayavetana* merupakan jenis kebijakan ganda dengan menerima upah dari musuh secara diam-diam saat sedang bertugas melayani

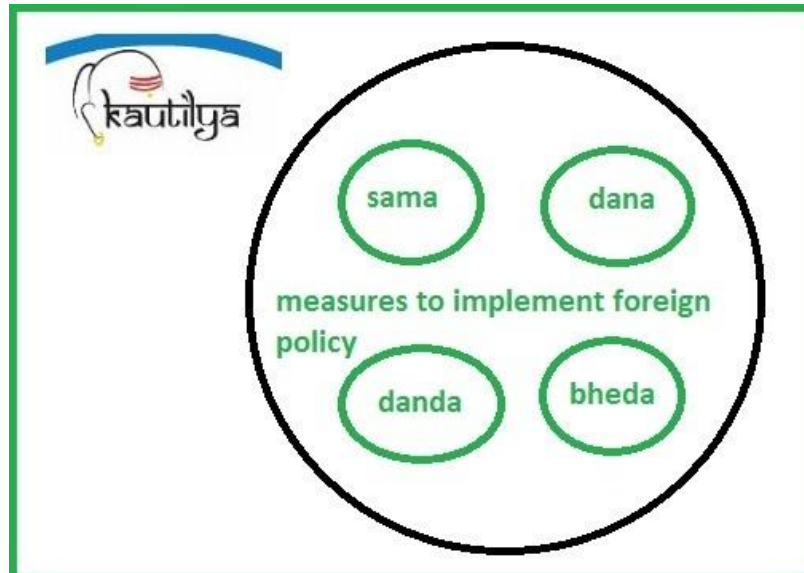
tuannya. Bahasa mudahnya adalah agen ganda yang bekerja untuk kedua belah pihak dalam ranah spionase.

- e. *Yugmaprabhritaka* merupakan jenis kebijakan ganda dengan berpura-pura mengumpulkan kekuatan dan uang untuk sebuah ekspedisi namun justru membelanjakan hal tersebut untuk kepentingannya sendiri. Contohnya pada tahun 1950 David Ben Gurion dari Israel meminta Kanselir Konrad Adenauer uang sejumlah satu miliar dollar sebagai bentuk “kompensasi atas kekejaman Nazi terhadap orang Yahudi, namun ia justru menghabiskan uang itu untuk membeli senjata yang dipakai untuk melawan orang-orang Arab.

Ṣāḍgunya atau *six fold Foreign Policy* merupakan kebijakan yang dapat diambil oleh penguasa negara dalam kerangka hubungan antar negara. Untuk menjalankan keenam kebijakan ini terdapat empat cara atau jalan (*catur upaya*) yang umumnya ditempuh dalam diplomasi menurut Chanakya.

Catur Upaya merupakan empat pendekatan atau cara untuk mencapai tujuan nasional atau bisa dikategorikan sebagai empat metode diplomasi sebuah negara. *Catur upaya* ini telah dijelaskan dalam *Dharmashastra*. *Catur upaya* terdiri dari empat bagian berbeda. Pertama, *sama (conciliation)* perdamaian, konsiliasi atau penyesuaian. Kedua, *dama (gift)* pemberian, kado atau hadiah. Ketiga, *bedha (rupture)* perpecahan atau perselisihan. Dan keempat adalah *danda (force)* kekerasan, atau pemaksaan. Aplikasi dilapangan yang terjadi adalah adanya tumpang-tindih dari keempat upaya ini dan enam kebijakan luar negeri, tergantung dari keadaan lingkungan strategis sang *vijigīṣu* saat itu. Namun Kangle (1986) menyatakan *ṣāḍgunya* itu merujuk hanya pada penggunaan kebijakan luar negeri semata. Sementara *catur upaya* merujuk pada aplikasi yang lebih luas dan bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan lain yang mungkin tak

berkaitan dengan negara sama sekali, seperti tujuan perseorangan.¹⁰⁴ Ilustrasi mengenai *catur upaya* dapat dilihat pada gambar 4.7.



Gambar 4.7 Ilustrasi *Catur Upaya* menurut Chanakya
<https://www.quora.com/2015>

Konsiliasi (*sama*) dicapai dengan memuji keunggulan dari kualitas negara/seseorang, pekerjaan, sifat, atau kekayaan, dengan memuji hubungan umum, menjelaskan keuntungan yang akan diperoleh bagi kedua belah pihak, dan bisa juga dilakukan dengan pemberian suatu kehormatan atau peringkat tinggi. Menenangkan lawan ataupun kawan dengan pemberian hadiah (*dana*) dicapai dengan memberi imbalan dengan uang, memberikan bantuan, membebaskan dari pajak, dan memberikan pekerjaan. Menurut Chanakya, terdapat lima jenis hadiah yang bisa diberikan untuk memenangkan hati lawan maupun kawan. Pertama, menghapuskan hutang mereka yang dipinjam dari kita. Kedua, melanjutkan pembayaran hutang mereka yang sudah dilakukan sebelumnya. Ketiga, mengembalikan sesuatu yang diterima. Keempat, memberikan sesuatu

¹⁰⁴ Kangle, R.P. 1986. *Op.cit.* hlm. 251.

yang baru dari kekayaan seseorang. Kelima, adalah izin untuk mengambil sesuatu dari musuh.¹⁰⁵

Menabur perselisihan (*bheda*) dilakukan di antara musuh dengan menciptakan kecurigaan bersama di antara mereka atau dengan mengancam salah satunya. *Force (danda)* dapat digunakan untuk merampas harta, kebebasan, atau kehidupan seseorang, dan didalamnya melakukan termasuk penjarahan, pelecehan, bahkan pembunuhan. Konsep-konsep ini dapat digunakan secara terpisah atau kombinasi secara bersamaan, tergantung pada situasi. Misalnya, Chanakya merekomendasikan penggunaan konsiliasi dan penenangan dengan hadiah untuk seorang putra atau saudara. Bagi warga negara, atau anggota tentara, menenangkan dengan hadiah dan/atau menabur perpecahan yang terbaik. Untuk pangeran tetangga, tabur pertikaian dan penggunaan kekerasan dianjurkan. Sementara itu untuk melawan musuh/negara lain Chanakya menyarankan penggunaan *catur upaya* ini pula.

In the enemy's country, those who are easily subverted shall be won over by conciliation (sama) and gift (dama). Those who are not easily subverted shall be tackled by sowing dissension (bedha), use of force (danda) or by pointing out to them the defects of their own king. (Arthashastra 1.14.12)

Chanakya menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus sekutu dan musuh, kombinasi metode memastikan keberhasilan sebagai teknik yang berbeda saling memperkuat. Beberapa metode ideal, dalam kasus tertentu, dan lainnya tidak diperlukan. Perdamaian cukup untuk berurusan dengan menteri musuh yang kesetiaannya tidak pasti, sementara menenangkan dengan hadiah untuk menteri musuh yang tidak jujur (pengkhianat) bisa manjur. Perselisihan sangat efektif terhadap konfederasi, dan kekuatan-benar diterapkan di paling menguntungkan kali-sering berhasil melawan kuat (yang mungkin menemukan pembalasan atau melanjutkan biaya

¹⁰⁵ Kangle. 2010. *The Kautilya Arthashastra* buku 9, bab 6 and ayat 24 dalam bahasa Sanskrit menjelaskan mengenai jenis-jenis hadiah yang dapat diberikan untuk menciptakan situasi tertentu. Lihat Kangle, *The Kautiliya Arthasastra*, Part 2, hlm. 423.

permusuhan tidak efektif). Metode menciptakan perselisihan paling efektif terhadap konfederasi, dan kekuatan - ketika diterapkan dengan benar dan di saat yang paling tepat - sering berhasil melawan yang berkuasa/paling kuat (yang mungkin bisa saja kemudian menemukan cara melakukan pembalasan dendam atau justru malah memilih untuk melanjutkan permusuhan yang tidak efektif).¹⁰⁶

Sementara enam ukuran kebijakan luar negeri digunakan oleh raja untuk mengatur negara, keempat konsep sikap memiliki penerapan yang lebih luas dan melintasi batas-batas semua. Sebagai contoh, Chanakya merekomendasikan bahwa penakluk yang telah memastikan pengajuan seorang raja harus memperlakukannya dengan hormat, kecuali raja menyimpan niat bermusuhan. Dengan memperlakukan bawahan secara tidak adil, ia tidak hanya menghadapi prospek pembalasan, ia cenderung menimbulkan murka lingkaran negara. Penakluk diminta untuk menghormati raja-raja lain di sekitar kerajaannya, atau mereka dapat bersatu dan menggagalkan aspirasi penakluk penaklukan dunia¹⁰⁷.

Chanakya sendiri berpendapat bahwa ada dua acara yang dapat ditempuh oleh *vijigīṣu*¹⁰⁸ guna mencapai tujuannya, yaitu perang atau diplomasi. Ada beragam strategi diplomasi yang dijabarkan oleh Chanakya dalam Arthashastra, salah satunya adalah *atisamdhāna* yang merujuk pada pembuatan pakta atau perjanjian dengan pihak lain (negara lain) dan menggunakan perjanjian-perjanjian ini untuk mengecoh dan mengguguli pasangan potensial mereka. Bentuk sederhana dari istilah ini kemudian

¹⁰⁶ The Kautilya *Arthashastra* buku 9, bab 5 and ayat 12-28 dalam bahasa sansekerta menjelaskan penggunaan perselisihan untuk memperoleh keuntungan. Lihat Kangle, *The Kautilya Arthashastra*, Part 2, hlm. 420-421.

¹⁰⁷ Kangle.1986. *op.cit.* hlm. 255

¹⁰⁸ Kautilya menjangkarkan idenya pada konsep Raja sebagai *vijigīṣu* (orang yang ingin menaklukkan), sebuah istilah teknis yang merujuk pada arti seorang penguasa yang menginginkan dan berkomitmen penuh untuk menaklukkan. Namun jika kita arahkan pada pengertian kekinian dengan situasi percaturan politik internasional *vijigīṣu* kemudian dapat dimaknai sebagai sebuah negara yang menginginkan untuk memperluas pengaruhnya (*power*) ke negara-negara lain secara terus-menerus.

dikenal dengan *saṃdhi* yang tergabung ke dalam bagian pertama dari *ṣāḍgunya* atau enam kebijakan politik luar negeri (*six fold foreign policy*).

Istilah *saṃdhi* sendiri merujuk kepada pembuatan pakta atau aliansi dengan penguasa lain (negara lain) untuk mencapai tujuan bersama, seperti misalnya menyerang pihak ketiga. Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut, Chanakya juga menginstruksikan untuk menggunakan aliansi sebagai peluang untuk tidak hanya mengalahkan musuh bersama dan mencapai tujuan bersama. Namun juga sebagai sebuah proses untuk melemahkan atau mengalahkan sekutu *vijigṛṣu* itu sendiri. Strategi ini kemudian terlihat seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Ini merupakan bagian dari “*Mantrayuddha*” atau “perang kecerdasan” yang dijabarkan oleh Chanakya pada keseluruhan isi dari bagian buku ke-XII nya¹⁰⁹.

Menariknya, Chanakya menempatkan *Mantrashakti* (diplomasi) sebagai sebuah kemampuan terkuat yang harus dimiliki dengan cakap oleh sebuah negara. Dalam ketiga *shakti*, *mantra shakti* ini paling penting dan paling kuat. Dengan demikian dapat dipastikan kecenderungan untuk menggunakan kekuatan narasi (menasehati, mempengaruhi, menarik dan mengkooptasi) negara-negara lain dalam kancah hubungan internasional seharusnya tidak luput dari perhatian negara. Chanakya mengibaratkan hal ini dalam sebuah ungkapan “*anak panah yang dilepaskan oleh seorang pemanah bisa saja membunuh satu orang atau bahkan justru tidak membunuh seorangpun. Namun kecerdasan yang dijalankan oleh orang bijak bahkan bisa membunuh anak yang ada di dalam kandungan*”.¹¹⁰

Arthashastra karya Chanakya sesungguhnya memberikan penekanan yang lebih kepada peranan diplomasi namun tidak memberikan preferensi atas perang. Hal ini kemungkinan besar karena sistem sosial masyarakat kerajaan Dinasti Maurya saat itu, yang menitikberatkan

¹⁰⁹ Patrick Olivelle, “Economy, Ecology and National Defence in Kautilya’s Arthashastra”, dalam *Indigenous Historical Knowledge: Kautilya and His Vocabulary*. (New Delhi: Pentagon Press and Institute for Defence Studies and Analyses, 2016), hlm. 10-11.

¹¹⁰ KA 10:6.51; Kangle, *The Kautiliya Arthashastra, Part II*, n. 5, hlm. 458; Rangarajan, *Kautilya: The Arthashastra*, n. 20, hlm. 625

pengelolaan negara pada kaum Ksatria, yang seolah-olah dilahirkan dan ditakdirkan untuk “berperang”. Diplomasi bagi Chanakya dijalankan untuk mencapai beberapa hal seperti menarik sekutu, menunda perang jika sebuah negara itu lemah dan mudah diserang dan untuk membuat *post war arrangements for a new order*.

Berdasarkan Arthashastra karya Chanakya, hubungan antar negara dibangun dan dibawa oleh *Duta* atau *Ambassadors*. Chanakya kemudian memberikan tiga kategorisasi mengenai Duta Besar. Pertama adalah duta besar berkuasa penuh (*plenipotentiary*), duta/utusan dengan kuasa negosiasi terbatas, dan seorang utusan yang bertugas membawa pesan saja. Perbedaan mendasar dalam tugas duta pada masa Chanakya dengan masa sekarang adalah perintah Chanakya yang mengharapkan para duta besar Kerajaan Maurya juga bertindak dalam spionase (kegiatan intelijen), tindakan sabotase bahkan yang paling penting adalah ikut aktif dalam menjalankan pembelotan dari tentara musuh, untuk menguntungkan negaranya sendiri.¹¹¹

Baik diplomasi maupun perang keduanya dijalankan oleh Chanakya dengan tujuan untuk memperoleh *power* yang lebih besar bagi negaranya. Namun yang kemudian perlu dicermati adalah penekanan Chanakya bahwa *power* bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai oleh negara. Justru *power* adalah alat yang digunakan untuk mencapai kepentingan yang lebih besar, yaitu *yogaksema* atau kebahagiaan, kesejahteraan dan keamanan rakyat.

*Strength is power, and happiness is the end. [...] hence a king shall always endeavour to augment his own power and elevate his happiness. Therefore, for the augmentation of power the general rule applies that whoever is inferior to another shall make peace with him; whoever is superior in power shall wage war.*¹¹²

Melalui sutra di atas, sangat jelas terlihat bahwa *power* bukanlah tujuan akhir, namun lebih kepada sebuah cara untuk memperoleh *power* yang

¹¹¹ Harjeet Singh, opcit. hlm. 25

¹¹² Harjeet Singh, opcit hlm 28-29. *Kautilya Arthashastra* 6.2.30; 6.2.35-37

lebih besar. *Power* yang lebih besar dalam sistem internasional saat itu¹¹³ dijadikan sebagai daya tangkal untuk negara tetangga dan negara-negara lainnya. Ketika sang *vijigīṣu* memiliki power yang besar, negara lain akan segan atau bahkan tidak berani menyerang sang *vijigīṣu*. Dengan demikian rakyatnya tidak menghadapi ancaman serangan dari negara lain. Keamanan membuat roda perekonomian mereka berjalan lebih lancar dan kesejahteraan akan hadir seiring berjalannya waktu. Ketika keamanan dan kesejahteraan ada di masyarakat maka masyarakat akan merasakan kebahagiaan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Konsep Pemetaan Ancaman dalam Arthashastra sebagai dasar Strategi Diplomasi Pertahanan

Pemetaan ancaman menurut Chanakya dalam Arthashastra merujuk kepada pembahasan pada sub-bab sebelumnya, mendefinisikan bahwa ancaman dapat berasal dari dalam negara ataupun dari luar negara. Ancaman dari dalam negara berupa pemberontakan, korupsi, kekeringan, kudeta, perampokan, kerusuhan, dan lain sebagainya yang ranah terjadinya berasal dari unsur yang terdapat di dalam negara seperti pejabat pemerintah yang membelot, kelompok yang tidak taat dengan raja/penguasa negara, dan pejabat yang tidak jujur. Sementara ancaman dari luar negara berasal disebutkan seperti invasi/upaya menaklukkan dari musuh, ataupun serangan intelijen negara asing untuk melemahkan elemen pembentuk negara (*saptanga*). Penjabaran ini berkenaan dengan teori ancaman, sebagaimana dibahas dalam *The Origin of Threats*¹¹⁴ bahwa ancaman bagi sebuah negara tidak hanya datang dari luar negara

¹¹³ Saat itu sistem internasional yang anarki membuat Chanakya berpikir bahwa hanya ada dua pilihan dalam sistem internasional, antara menaklukkan atau ditaklukkan. Agar negara tidak ditaklukkan oleh negara lain ia harus bisa lebih kuat dari negara yang hendak menaklukkannya. Sehingga pencarian power secara terus-menerus dilaksanakan untuk memastikan bahwa negara tidak akan diserang, dan walaupun diserang tidak akan menyebabkan kekalahan yang fatal/ hancurnya negara.

¹¹⁴ Banyu Perwita, *op. cit.* hlm. 123

(eksternal) namun juga dari dalam negara (domestik). Namun yang perlu kembali ditekankan adalah bagi Chanakya, tidak peduli dari mana asal ancaman, baik itu berasal dari eksternal maupun domestik, sepanjang ia dapat melemahkan salah satu atau beberapa elemen pembentuk negara (*saptanga*) maka ancaman tersebut harus segera ditanggulangi.

Tabel 4.1 Perbandingan Sistem Pemetaan Ancaman Antara Konsep Barat Dengan Pandangan Chanakya Dalam Arthashastra

Variable	Western concept	Chanakya dalam Arthashastra
Sumber ancaman	<p><i>The Origin of Threat:</i></p> <p>Konsep tradisional: Ancaman datang dari negara asing (luar negara)</p> <p>Konsep non-tradisional: Ancaman datang dari lingkungan domestik (dalam negeri) dan internasional (luar negeri)</p>	<p><i>Vyasana</i> : Malapetaka/ ancaman/ bencana.</p> <p>ancaman domestik: dari dalam negara seperti: pemberintakan, dekadensi penguasa, wabah penyakit, kelaparan pemberontakan, korupsi bencana alam dan kejahatan domestic.</p> <p>Bencana dari luar negara: invasi/ serangan negara lain, infiltrasi agen asing kedalam negara, sekutu yang membelot</p>
Sifat Ancaman	<p>Tradisional: ancaman bersifat militeristik, pendekatan terhadap ancaman mengutamakan peran militer atau penggunaan kekerasan</p> <p>Non-tradisional: ancaman bersifat kompleks, gabungan antara ancaman berdifat militeristik dan juga ancaman</p>	<p>Tradisional: ancaman bersifat militeristik, pendekatan terhadap ancaman mengutamakan peran militer.</p>

	terkait dengan ilpoleksosbudhankam,	
Aktor	Negara dan non negara (kelompok teroris, bandar narkoba, Transnational Organized Crime, dll)	Aktor negara beserta angkatan bersenjata dan intelejen negara)
Paradigma	Konstruktivis,	Realis
Pemetaan ancaman dari luar negara	Analisa SWOT, Geostrategi, Negara berkompetisi dan atau bekerjasama atas suatu isu	Teori Mandala, Konstelasi geopolitik , negara selalu bersiap melakukan penaklukan atau bersiap menghadapi upaya penaklukan dari negara lain

Sumber: Hasil Olah Peneliti dari berbagai sumber, 2018.

Merujuk pada tabel 4.1 mengenai perbandingan konsep pemetaan ancaman *western* dan berdasarkan pandangan Chanakya dalam karyanya, Arthashastra, maka terlihat jelas bahwa sesungguhnya pemetaan ancaman secara tradisional telah dipaparkan dalam arthasahstra yang dibuat pada 350-283 SM. Konsep arthasahstra dalam pemetaan ancaman ini masih merujuk pada *nature and origin of threat* yang bersifat tradisional (militeristik). Hal ini dapat dimengerti karena paradgima yang berkembang saat itu adalah realisme dan ancaman belum terproliferasi lebih kompleks seperti jaman modern. Terlepas dari hal tersebut, chanakya sudah meletakkan nilai-nilai dasar terkait ancaman yang non-tradisional pada terminologi *vyasana* yang berasal dari dalam negara seperti bencana alam, kelaparan, dekadensi penguasa, wabah penyakit, dll.

Chanakya memberikan penekanan yang cukup serius bagi ancaman eksternal. Dengan demikian untuk mencegah ancaman yang berasal dari luar negara tersebut Chanakya menjabarkan teori mengenai Mandala/ *circle of state*. Di mana sang *Vijigīṣu* memetakan negara mana yang menjadi musuh alamiahnya, musuh potensialnya, dan juga sekutu yang dapat membantunya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan bahwa negara

tetangga merupakan musuh alami, di mana ancaman terkait gesekan perbatasan dan kemungkinan untuk penyerangan terhadap sang *Vijigīṣu* jauh lebih tinggi. Untuk memahami penetapan teori ini, secara hermeneutik kita perlu menggunakan pemikiran hermeneutika Hans-Georg Gadamer (dalam Susanto, 2016) yakni teori kesadaran (*Historically Effected Consciousness*) di mana pemahaman seorang penafsir ternyata dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang melingkupinya, baik itu tradisi, kultur, maupun pengalaman hidupnya.¹¹⁵ Dengan demikian dalam upaya menafsirkan dan memahami teori Mandala yang dikemukakan oleh Chanakya ini diperlukan kesadaran penafsir bahwa kemungkinan situasi hermeneutiknya saat itu berpengaruh terhadap hasil penafsirannya.

Dalam proses penyusunan Arthashastra, Chanakya merujuk berbagai filsafat-filsafat politik yang telah ada kemudian memberikan penafsiran serta komentar sesuai dengan analisa lingkungan strategis Kerajaan Maurya saat itu. Dengan demikian, ketika penafsir hendak memahami ide-ide Chanakya, maka penafsir Arthashastra juga perlu mengantisipasi hal-hal tersebut. Dengan kata lain, dalam upaya untuk memahami paradigma berpikir serta maksud Chanakya pada beberapa teori yang dikemukakan, maka penafsir masa sekarang perlu melihat lingkup sejarah yang meliputi Chanakya saat itu. Lingkup sejarah ini merujuk pada beberapa aspek seperti pengalaman hidupnya, kecenderungan hubungan antar negara, dan kultur serta struktur sosial yang berkembang pada saat itu.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penetapan teori *circle of state* atau teori mandala ini merujuk pada keadaan dunia saat itu pada abad ke 4 SM. Saat itu situasi kerajaan Maurya bersifat *land-base*, di mana negara-negara tetangganya berbatasan secara darat sehingga mobilisasi pasukan dari satu negara untuk menyerang negara lain jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan negara yang dipisahkan oleh lautan. Selain itu,

¹¹⁵ Edi Susanto, *op.cit.* hlm 52

sistem internasional saat itu juga belum mengenal penghormatan atas kedaulatan negara.¹¹⁶ Hal tersebut membuat satu negara dapat menyerang negara lain disebelahnya untuk memperluas wilayah, menambah sumber daya alam dan pendapatan melalui pajak atau upeti dari negara yang telah ditaklukkan. Keadaan ini kemudian menjadi salah satu alasan mengapa negara yang bertetangga secara langsung adalah musuh alami karena mereka-lah yang paling mungkin melakukan penyerangan terhadap wilayah kekuasaan sang *vijigīṣu*. Maka dari itu, bagi Chanakya negara tetangga (yang menunjukkan sikap bermusuhan/selalu berselisih) adalah entitas politik yang paling perlu diwaspadai. Maka dari itu, adalah sebuah kewajiban yang bisa dimengerti ketika Chanakya merasa *insecure*, lalu kemudian mengaggap negara yang bertetangga merupakan musuh alami dan potensial untuk menyerang sang *Vijigīṣu*. Maka kemudian untuk meredam kekalahan jika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh musuh alami ini, negara harus memiliki militer, benteng, dan ekonomi yang kuat.

Namun pada praktek zaman sekarang, negara tidak lagi bisa menggunakan teori *circle of state* secara harfiah di mana negara yang bertetangga adalah musuh alamiah dan musuh paling potensial. Secara konstelasi geopolitik ancaman paling besar (perselisihan tapal batas, pelanggaran wilayah kedaulatan) memang sangat memungkinkan terjadi diantara negara yang saling bertetangga (berbatasan langsung). Namun kemudian yang perlu digaris-bawahi adalah bukan dengan serta merta menjadikan negara tetangga menjadi musuh sungguhan. Sebagaimana Chanakya kemudian melanjutkan penjelasannya bahwa tidak semua negara yang bertangga menjadi musuh. Posisi tersebut tergantung dari bagaimana sikap mereka (kebijakan yang diambil, respon terhadap isu yang berkembang) terhadap sang *Vijigīṣu* lah yang menentukan apakah mereka akan menjadi musuh (*aribhavin*) atau kawan (*mitrabhavin*). Keadaan ini yang membuat negara kemudian bisa membentuk konstelasi

¹¹⁶ Sebagaimana diatur dalam traktat Westphalia

mandala yang saling-tumpang-tindih dengan negara tetangga dan negara lainnya berdasarkan isu, kebijakan ataupun kepentingan yang sedang diperjuangkan oleh negara tersebut.

Jika kemudian diarahkan terhadap pemetaan ancaman yang dilakukan oleh Indonesia, maka dapat terlihat bahwa Indonesia juga mengantisipasi ancaman yang paling potensial muncul dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Hal yang perlu dicermati kemudian adalah cara Indonesia untuk “menghadapi” negara-negara tetangganya dalam konstelasi geopolitik (ASEAN, Australia dan juga Pasifik). Indonesia sejauh ini tampaknya berupaya menempatkan negara-negara yang berbatasan langsung dengannya pada posisi mitra. Hal ini terlihat dari *range* urutan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia menempatkan negara yang berbatasan langsung sebagai negara-negara yang harus diberikan prioritas lebih dulu dalam porsi kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia¹¹⁷.

Upaya yang dilakukan Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk penggalangan kekuatan, di mana kompetitor potensial (negara tetangga) digalang dan dikondisikan agar tidak melakukan serangan terhadap Indonesia. Pembuatan pakta-pakta kerjasama dan upaya memunculkan *common interest* dengan negara tetangga ini dapat dilihat sebagai upaya pencegahan agar negara tetangga tidak melakukan serangan terhadap Indonesia, karena mereka juga memiliki kepentingan di Indonesia dan dengan melakukan serangan tidak hanya akan menimbulkan kerugian pada Indonesia semata, namun juga kerugian di pihak mereka. Keunikan ini kemudian dapat tercermin dari salah satu jargon politik luar negeri yang berkembang pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni *Zero Enemy Thousand Friends*. Di mana Indonesia mengambil peranan sebagai negara cinta damai yang berupaya selalu

¹¹⁷ Wawancara Dirjenstrahan Kemhan tahun 2014-2017, Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto (1 November 2018); Kasubdit Multilateral Dirjenstrahan Kemhan, Klo. Kav. Oktaheroe Rasmi (27 September 2018), Ricky E.V. Ichsan (Kepala Subdit Perlucutan Senjata Pemusnah Masal dan Senjata Konvensional Kemlu RI (6 November 2018).

membuat pertemanan dengan negara-negara lain di dunia, dan tidak menetapkan satu negara pun secara resmi sebagai musuhnya. Jika dipandang dalam paradigma realisme hal ini terkesan utopis, di mana tidak ada satupun negara yang tidak memiliki musuh atau tiada satupun negara yang tidak berselisih paham dengan negara lain.

Namun Indonesia nampaknya konsisten dengan jargon politik luar negeri ini. Terbukti dari beberapa kasus-kasus di mana Indonesia berselisih paham dengan beberapa negara tetangganya seperti Malaysia¹¹⁸ ataupun Australia¹¹⁹. Secara teoretis selisih paham yang terjadi antar negara ini sangat mungkin memicu permusuhan atau setidaknya dijadikan dasar untuk membuka peluang terhadap konflik politik. Namun yang perlu digaris-bawahi kemudian adalah hal-hal tersebut tidak membuat Indonesia serta merta menyebut mereka sebagai musuh secara resmi. Ketegangan politik dan dipomatik memang terjadi pada masa-masa tersebut, namun tidak sampai membuat Indonesia mendeklarasikan mereka sebagai musuh lalu mengibarkan permusuhan diplomatik yang berkepanjangan. Tensi politik dan diplomatik antara negara ini dipandang cukup cepat mengalami normalisasi pasca bersitegang karena beberapa masalah tersebut.

Jika dihadapkan dengan pandangan dalam Arthashastra terkait posisi negara yang bertetangga pada konstelasi teori mandala, sesungguhnya Indonesia telah menetapkan konstelasi mandala yang unik. Hal ini bukan hanya karena Indonesia berupaya menempatkan negara-negara tetangganya pada posisi *mitrabhavin* (bersahabat) bukan *aribhavin* (bermusuhan). Namun juga karena jargon politik luar negeri *Zero Enemy Thousand Friends* secara tidak langsung telah meniadakan posisi “musuh” dalam konstelasi geopolitik mandala Indonesia. Deklarasi dan juga

¹¹⁸ Indonesia sempat bersitegang dengan Malaysia terkait dengan blok Ambalat, klaim beberapa kebudayaan Indonesia oleh Malaysia, sengketa perbatasan di Kalimantan, dan lain sebagainya.

¹¹⁹ Indonesia sempat bersitegang dengan Australia terkait hukuman mati yang diberikan kepada WN Australia yang membawa Narkoba ke Indonesia, dan juga terkait dengan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhono dan kerabatnya.

penerapan kebijakan di era pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono secara tidak langsung juga telah meletakkan dasar-dasar idealis dalam hubungan antar negara. Sekaligus juga menciptakan jalan bagi Indonesia untuk membentuk mandala negara netral yang membangun konstelasi bukan berdasarkan kawan dan lawan, namun sebagai mitra dan mitra (antar kawan) yang berjuang bersama demi tercapainya kepentingan bersama.

Keadaan ini sesungguhnya memberikan insight yang positif bagi Indonesia. Jargon politik luar negeri *Zero Enemy Thousand Friends* dapat dipandang sebagai upaya "*trust building*" dengan negara-negara lain. Jika dianalisa lebih jauh sesungguhnya ini merupakan bentuk Grand Strategi yang bersumber dari Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif untuk menghalau ancaman dari negara luar (ancaman eksternal). Menggalang musuh alamiah dan potensial untuk menjadi mitra atau kawan merupakan cara cerdas untuk meminimalisir bahkan meniadakan ancaman. Indonesia menjadikan negara tetangga yang berbatasan langsung dengannya sebagai mitra utama dalam berbagai kerjasama, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Dengan demikian negara-negara tetangga yang berbatasan langsung ini memiliki *common interest* di Indonesia yang perlu dijaga bersama. *Common interest* ini memberikan *side-effect* di mana ketika potensi ancaman muncul dari negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia, negara-negara itu akan mempertimbangkan kembali tindakannya. Hal tersebut terjadi karena tindakan negara-negara ini dapat berdampak negatif terhadap *common interest* yang telah dibangun. Selain itu prinsip resiprokal (timbang-balik) dalam norma hubungan antar negara di dunia internasional, membuat sebuah negara selayaknya memperlakukan negara lain sebagaimana ia diperlakukan. Dengan demikian ketika Indonesia memperlakukan negara lain sebagai kawan, bukan sebagai lawan, maka bentuk resiprokal yang negara tersebut lakukan adalah memperlakukan Indonesia sebagai kawan pula.

Hal yang kemudian juga perlu dikritisi dari pola penetapan ancaman pada Arthashastra adalah keberadaan ancaman yang terlalu menitik-beratkan pada sifat-sifat ancaman yang militeristik, sehingga hanya terkooptasi pada ancaman yang bersifat tradisional semata. Hal ini tercermin dari statemen dalam sutra-sutra pada Arthashastra yang membahas dengan begitu detail apa yang harus dilakukan jika musuh menyerang negara, dan bagaimana jika musuh melakukan operasi intelijen. Sifat ancaman yang tradisional ini pun disikapi dengan cara-cara yang juga tradisional atau militeristik sehingga strategi berperang, strategi menipu lawan, strategi melemahkan tentara lawan, bagaimana memperkuat militer dan Alutsista, bagaimana mendapatkan power yang lebih besar, merupakan berbagai permasalahan yang berusaha dicarikan solusi oleh Chanakya dalam Arthashastra.

Sifat atau *nature* ancaman yang bersifat *military oriented* ini tentu akan sedikit berselisih dengan pemahaman modern di mana *nature* ancaman tidak lagi hanya bersifat *military oriented* atau tradisional, namun juga non tradisional, sebagaimana diungkapkan oleh Perwita (2006: 124-5) bahwa konsep ancaman telah berkembang tidak lagi hanya *military oriented* namun juga ancaman nir-militer, ancaman non-tradisional yang mencakup berbagai aspek seperti ideologi, ekonomi, politik sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam).¹²⁰ Maka dari itu untuk memahami kesenjangan yang nampak dari keadaan ini teori asimilasi horizon dan lingkaran hermeneutik oleh Hans-Georg Gadamer (dalam Susanto, 2016) dapat dipergunakan.

Gadamer menyatakan bahwa dalam proses penafsiran seseorang harus sadar bahwa ada dua horizon yakni (1) cakrawala (pengetahuan) atau horizon dalam teks dan (2) cakrawala (pemahaman) atau horizon pembaca. Di mana seorang pembaca teks memulai pemahamannya melalui cakrawala hermeneutiknya, namun dia juga harus memperhatikan bahwa teks juga mempunyai horizonnya sendiri yang mungkin saja berbeda dengan horizon yang dimiliki pembaca. Sehingga dengan kata lain pembaca harus

¹²⁰ Banyu Perwita *Op.cit*, hlm 123-125

memperhatikan horizon historis, di mana sebuah teks itu muncul, diungkapkan atau ditulis. Interaksi antar kedua horizon ini yang disebut sebagai “lingkaran hermeneutik”. Lebih lanjut, horizon pembaca hanya berperan sebagai titik pijak seseorang dalam memahami teks, yang dapat berupa “pendapat” ataupun kemungkinan” bahwa teks ini berbicara mengenai suatu hal. Namun yang perlu ditegaskan adalah titik pijak ini tidak boleh dibiarkan memaksa pembaca agar teks harus berbicara sesuai dengan titik pijaknya. Justru sebaliknya, titik pijak pembaca ini harus bisa membantu memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh teks. Sehingga terbentuk sebuah pertemuan antara subjektivitas pembaca dan objektivitas teks, di mana makna objektivitas teks lebih diutamakan.¹²¹

Kesenjangan pemahaman mengenai *nature of threat* terlihat ketika pemahaman modern membagi sifat ancaman yakni ancaman tradisional (*military oriented*) dan non tradisional (ipoleksosbudhankam), sementara teks Arthashastra lebih menitik-beratkan kepada *nature of threat* yang bersifat militeristik. Untuk memahami hal tersebut kita harus melihat cakrawala historis saat teks Arthashastra disusun oleh Chanakya. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa sifat ancaman yang militeristik disebabkan karena cakrawala historis dari Chanakya saat itu di mana hal-hal non militer memang belum teralu dipandang sebagai sebuah ancaman yang krusial bagi kerajaan. Selain itu sangat kecil kemungkinannya pada saat itu bila ancaman non militer berasal dari eksternal atau luar negara. Maka dari itu, upaya untuk menghalau ancamannya pun menjadi *military heavy*, hal ini berdampak pada *military expenditure* kerajaan Maurya yang sangat besar. Kerajaan Maurya saat itu menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat yang bahkan mampu menghalau invasi *The Great Alexander* dari Yunani.¹²²

Keadaan pandangan Chanakya dalam Arthashastra yang terlalu *militaristic oriented* inilah yang kemudian membuat Arthashastra tidak bisa serta-merta diaplikasikan dalam strategi diplomasi pertahanan masa kini.

¹²¹ Susanto, 2016. *Op.cit.* hlm 53-4

¹²² Radha Kumud Mookerji, *Chandragupta Maurya and His Times.* (New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pltd., 1999) hlm. 65-9

Karena saat ini ancaman telah terproliferasi sedemikian luas. Ancaman tidak lagi bersifat tradisional atau militeristik semata, namun telah berkembang menjadi ancaman non-tradisional pula. Ancaman non-tradisional meliputi ancaman *cyber*, *transnational organized crime*, narkoba, terorisme, bencana alam wabah penyakit, dan lain sebagainya. Memang benar bahwa dalam bab kedelapan Arthashastra Chanakya menjabarkan penanganan mengatasi bencana seperti kekeringan, wabah penyakit dan bahkan dalam bab keempatbelas menjabarkan mengenai penggunaan senjata kimia seperti racun dan ilmu hitam untuk mengalahkan musuh, tetap saja cara-cara tersebut dipandang belum mampu membawa Arthashastra untuk menghadapi masalah-masalah non-tradisional/non militer yang berkembang saat modern ini. Dengan demikian, ketika ingin mengaplikasikan Arthashastra saat ini, diperlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu, terutama terkait dengan strategi menghadapi ancaman non militer/non tradisional.

Dalam Arthashastra karya Chanakya rakyat diposisikan sebagai subjek yang dilindungi dan tidak terlibat secara langsung dalam pertahanan negara. Karena pertahanan negara menjadi tanggung jawab para *ksatria varna*¹²³. Keadaan ini menjadi berbeda jika dibandingkan dengan sistem pertahanan yang dilaksanakan di Indonesia yang mengikutsertakan rakyat. Indonesia melalui sistem pertahanan rakyat semesta, tidak menjadikan rakyat hanya sebagai subjek yang dilindungi dan tidak terlibat secara langsung dalam pertahanan negara. Di Indonesia pertahanan dan keamanan negara secara *de facto* dan *de jure* menjadi

¹²³ Pada zaman dinasti Maurya terdapat sebuah sistem sosial yang membagi masyarakat ke dalam empat kelompok masyarakat/*catur varna*. Pertama adalah Brahmana, yaitu para pendeta, guru, penasehat kerajaan, dan para filsuf (mereka yang menjalankan kewajibannya menjaga masyarakat melalui ilmu pengetahuan). Kedua adalah Ksatria, yaitu para tentara, administrator negara, diplomat, intelijen, politisi (mereka yang menjalankan kewajibannya menjaga masyarakat melalui kekuasaan, kecerdasan dan keberanian). Ketiga adalah Vaisya adalah para pedagang (mereka yang menjalankan kewajiban menjaga masyarakat melalui kecerdasan dan kemampuan menjalankan perekonomian negara). Keempat adalah Sudra adalah para pekerja/buruh (orang-orang yang memiliki kekuatan fisik tetapi tidak memiliki kapabilitas tiga kelompok masyarakat lainnya, sehingga bertugas untuk membantu mereka).

tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia serta aparat keamanan. Dalam Sistem pertahanan rakyat semesta, rakyat juga diposisikan sebagai bagian dari komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara. Walaupun RUU yang mengatur mengenai komponen cadangan dan komponen pendukung ini belum disahkan, tetapi posisi rakyat yang memiliki hak dan kewajiban dalam pertahanan dan keamanan negara telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa "*setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara*". Demikian pula dengan Pasal 30 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara*". Keadaan ini sesungguhnya membuat secara teoretis sistem pertahanan negara Indonesia menjadi lebih holistik jika dibandingkan dengan sistem pertahanan yang tergambar dalam Pustaka Arthashastra.

Dalam pemetaan ancaman secara teoretis Indonesia juga terlihat lebih holistic. Sistem pemetaan ancaman sebagaimana dijabarkan dalam buku putih pertahanan terbagi menjadi ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Ancaman nyata merujuk pada bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya, meliputi terorisme dan radikalisme, bencana alam, separatisme, pemberontakan bersenjata, pencurian kekayaan alam, pelanggaran wilayah perbatasan, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, perompakan dan juga penyalahgunaan narkoba. Ancaman belum nyata merujuk pada ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional yang menghadapkan kekuatan angkatan bersenjata negara-negara yang berkonflik¹²⁴.

Hal ini disebabkan karena sistem pemetaan ancaman yang ada di Indonesia telah memadukan nature ancaman yang bersifat tradisional dan juga tradisional. Ketika dihadapkan dengan konsep pemetaan ancaman yang terdapat di dalam buku putih pertahanan Indonesia, maka dapat di

¹²⁴ Buku Putih Pertahanan Negara, hlm. 22-23

terlihat perbedaan yang mencolok karena perbedaan situasi lingkungan strategis yang dihadapi Indonesia dan juga di hadapi oleh Kerajaan Maurya. Pada masa Dinasti Chandragupta, Kerajaan Maurya invasi dari negara lain dan perang konvensional merupakan sebuah ancaman nyata yang dapat terjadi kapan saja. Sementara bentuk lain seperti bencana alam, pemberontakan senjata, wabah penyakit memang di bahas sebagai salah satu ancaman domestic yang dapat membahayakan kerajaan, namun tidak mendapatkan prioritas yang terlalu besar. Hal ini terlihat dari bagaimana Arthashastra karya Chanakya lebih rinci dan detail dalam membahas berbagai strategi untuk mencegah ancaman dari luar dan strategi perang melawan negara-negara lainnya.

Namun terlepas dari hal itu, konsep Mandala sesungguhnya sangat dapat dijadikan dasar strategi pada diplomasi pertahanan. Konstelasi geopolitik negara dalam teori mandala mengharuskan sebuah negara mengidentifikasi mana negara yang dapat menjadi musuh alami, musuh potensial, sekutu dekat, ataupun sekutu jauh. Negara mana yang dapat memenuhi syarat sebagai *mitra* (rekan kerja/sekutu), negara mana yang berpotensi untuk berselisih pendapat dalam sebuah isu. Dengan demikian negara dapat melihat secara holistik negara mana yang perlu di-*lobby* lebih keras karena posisinya akan bersebrangan dan negara mana yang sudah bisa dipastikan akan berada dipihaknya. Mandala ini membuat negara melihat peta kekuatan geopolitiknya dalam memenangkan sebuah isu yang berkaitan dengan upaya mencapai kepentingan nasional negaranya.

Misalkan Indonesia melihat bahwa ketegangan di Laut Cina Selatan dapat berdampak pada keamanan regional serta tensi politik di wilayah ASEAN, maka diperlukan sebuah formula untuk menurunkan tensi politik di *dispute area* tersebut. Masalah lain adalah ketiadaan otoritas yang bertanggung jawab jika terjadi permasalahan kemanusiaan di *dispute area* tersebut. Maka kemudian Indonesia mengajukan gagasan mengenai operasi bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana (*Humanitarian*

Assistance and Dissaster Relief) di wilayah *dispute area* yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Laut Cina Selatan.

Mandala teori di sini berfungsi untuk mengetahui negara mana saja yang akan resisten terhadap isu ini, dan negara mana yang akan setuju dengan dilaksanakannya isu ini. Kemudian setelah terpetakan, Indonesia harus menggunakan *lobbying* yang lebih gencar terhadap negara-negara yang dinilai akan resisten terhadap isu ini. Ketika telah yakin lebih dari tiga perempat pemangku kepentingan setuju dengan isu ini¹²⁵, maka pertemuan yang membahas isu operasi terkait *humanitarian assistance and disaster relief* di Laut Cina Selatan dapat dijalankan.

Terdapat nilai positif dari Pustaka Arthashastra karya Chanakya dengan pendekatan pemetaan ancaman yang militeristik. Nilai tersebut adalah kewaspadaan dan upaya negara untuk selalu menempatkan militer mereka dalam keadaan yang prima. Terlihat dari *expenditure* negara dalam militer yang tinggi. Negara mengupayakan para tentaranya hidup berkecukupan, dan mengupayakan mereka memperoleh pelatihan yang menambah kemampuan dan kapabilitas yang dibutuhkan. Negara memberikan porsi keuangan untuk mewujudkan alutsista yang terbaik dan terbaru. Negara memiliki konsern yang tinggi terhadap perlindungan informasi negara dan juga jaringan intelejen melalui telik sandi serta agen-agen yang loyal terhadap negara. Pembangunan *hard power* dan *soft power* negara sehingga akumulasi *power* yang dimiliki oleh negara dapat memberikan efek daya tangkal terhadap negara, di mana negara lain menjadi segan atau bahkan takut untuk melakukan serangan terhadap sang *Vijigṛsu*¹²⁶.

Namun yang perlu dikritisi adalah konsep pemetaan ancaman dalam Arthashastra dipandang masih terlalu militeristik. Hakikat ancaman terhadap negara masih bersifat tradisional. Keadaan ini perlu

¹²⁵ Kemungkinan memenangkan perundingan diatas 75-80-%

¹²⁶ Ashvini Agrawal, *Rise and Fall of the Imperial Guptas*, (Delhi: Motilal Banarsidass Publisher Pltd., 1989), hlm. 142

dikembangkan dengan mengikutsertakan pemetaan ancaman non-tradisional. Dengan demikian, bisa didapatkan sebuah pemetaan ancaman yang lebih holistik.

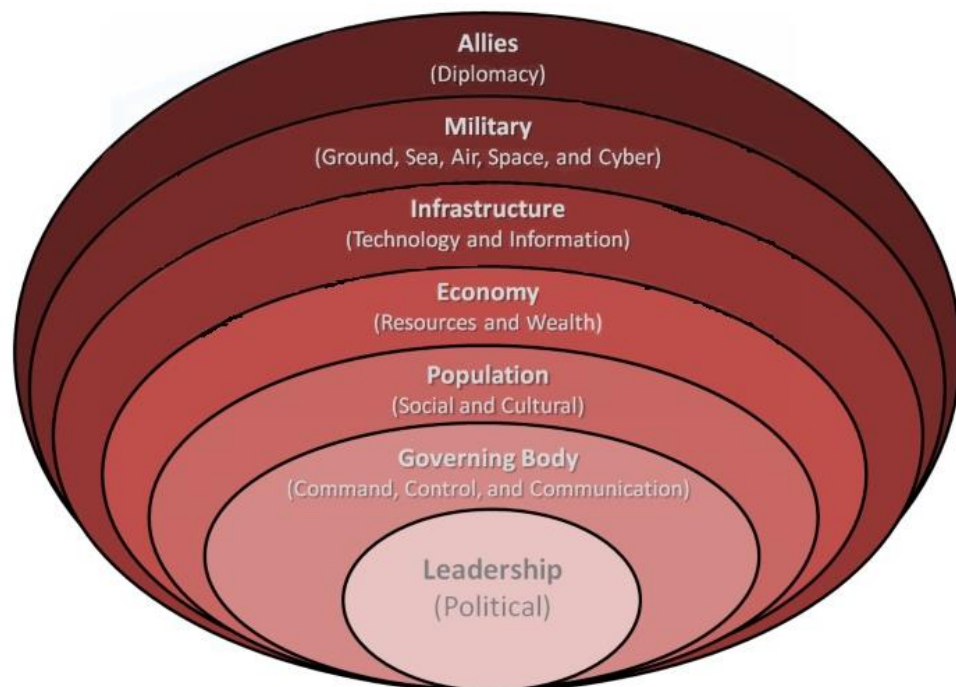
4.2.2 Konsep Tata Pemerintahan (*Statecraft*) dalam Arthashastra Sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan.

Teori *Saptanga* dalam Arthashastra menjelaskan bahwa terdapat tujuh elemen yang diperlukan oleh negara untuk menjadi negara yang kuat yakni pertama pemimpin yang memiliki kualifikasi sifat *astabrata*; kedua, penasehat raja/menteri/anggota dewan; ketiga, teritori, populasi, sumber daya alam; keempat, ibu kota yang dibentengi; kelima, perbendaharaan, perekonomian negara; keenam angkatan bersenjata/tentara; dan ketujuh adalah sekutu. Sebagian besar elemen ini masih relevan hingga saat ini, namun ada satu elemen yang perlu diinterpretasikan kembali seiring dengan perkembangan zaman, dan teknologi, yakni *Durga* atau ibu kota yang dibentengi.

Dalam upaya memberikan penafsiran terhadap suatu teks, Hans-Georg Gadamer mengemukakan sebuah teori yang disebut sebagai Teori Penerapan (*Application*). Menurut Gadamer, seorang pembaca disamping harus memahami dan menafsirkan teks, ada satu hal lagi yang dituntut, yakni “penerapan” atau (*anwendung*) dari pesan-pesan ataupun ajaran ajaeen pada masa ketika teks tersebut ditafsirkan. Menurut Gadamer, pesan yang harus ditafsirkan pada masa penafsir bukanlah makna literal atau harfiah dari teks tersebut. Melainkan lebih kepada *meaningful sense* atau makna yang berarti, ataupun pesan yang lebih berarti dari sekadar makna literal teks.¹²⁷ Dengan demikian dalam upaya memahami kembali dan membawa teori saptanga Arthashastra pada konteks kekinian diperlukan upaya penerapan *meaningful sense* dari masing-masing elemen pembentuk saptanga itu sendiri.

¹²⁷ Edi Susanto, *Op. cit.* hlm. 54-55.

Interpretasi ulang terhadap *saptanga* dilakukan oleh Wing Commander Vinay Vittal dalam tesisnya yang berjudul “*Arthashastra: A Timeless Grand Strategy*”. Menurut Vittal ketujuh elemen ini memberikan framework dengan signifikansi yang sangat penting. Menurut Chanakya Power yang diperlukan oleh sebuah negara dalam mengembangkan interestnya itu berlawanan dengan negara lain tergantung dari seberapa dekat dengan konstituen idealnya. Oleh karena itu, sebelum memulai melakukan operasi militer, adalah penting untuk memanfaatkan perbedaan kekuatan dari sekutunya dan disaat yang bersamaan melemahkan lawan. Oleh karena itu, strategi besar dan baik harus memasukan instrumen *saptanga* ke dalam kekuasaan nasional seperti politik, ekonomi, militer, sosial, informasi dan diplomatik.



Gambar 4.8 Elemen pembentuk Kekuatan Nasional pada Grand Strategy
Sumber: Vittal 2011

Dalam Gambar 4.8 mengenai pembentukan Kekuatan Nasional pada Grand Strategi di atas, kita lihat bahwa enam dari tujuh interpretasi *saptanga* yang dikemukakan oleh Chanakya tidak mengalami perubahan

berarti dan hanya diberikan penajaman dalam fokus kekiniannya. *Swami* dimaknai sebagai kepemimpinan utamanya dalam hal politik. Sebuah negara yang kuat layaknya memiliki pemimpin dengan kualitas *astabrata*, mampu memaksimalkan *soft power* dan juga *hard power* dari negaranya dan mengejawantahkannya menjadi *smart power*.

Amatya dimaknai tidak hanya sebagai *councilor* (penasehat) atau *minister* (menteri) tapi lebih kepada *governing body* yang memiliki kuasa atas komando, kontrol dan komunikasi negara. Dengan kata lain, negara yang kuat juga harus memiliki pemerintahan yang bersih, jujur, tidak korup, professional, akuntable, dan peduli terhadap rakyat.

Janapada tidak hanya dimaknai sebagai teritori dan populasi namun juga berfokus kepada sosial-budaya. Sebuah negara yang kuat harus memiliki rakyat yang sejahtera, melek politik, taat pada peraturan, beradab, dan senantiasa membantu mengkritisi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan dampak positif terhadap negara dan rakyat. Mampu menjaga identitas dan akar budayanya. Memiliki kohesi sosial yang baik, rasa kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme terhadap kemajuan negara.

Durga tidak hanya dimaknai sebagai ibu kota yang dibentengi, namun lebih kepada infrastruktur negara, utamanya teknologi dan informasi. Infrastruktur baik fisik maupun digital menjadi hal yang krusial saat ini. Kemajuan sebuah negara saat ini salah satunya berdasar dari bagaimana infrastruktur di negara tersebut dapat menunjang kehidupan masyarakatnya baik dari segi sosial-budaya maupun perekonomian. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan interkoneksi antar wilayah yang kemudian dapat berujung pada upaya saling menguatkan antar wilayah dalam negara. Sementara infrastruktur teknologi dan informasi merupakan hal mutlak diperlukan sebuah negara saat ini. Globalisasi dan revolusi industri 4.0 telah menciptakan *disruption* tersendiri di tengah masyarakat dunia. Hal ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian sebuah negara.

Kosa bukan hanya berarti perbendaharaan negara, namun juga perekonomian, utamanya kekayaan negara dan sumber daya yang dimiliki negara. Perbendaharaan negara menjadi hal yang penting. Bagaimana negara mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nya, keseimbangan neraca perdagangan, pendapatan negara akan sangat mempengaruhi kesejahteraan dan kekuatan ekonomi sebuah negara. Sudah menjadi kepastian umum, bahwa negara dengan leverage ekonomi yang tinggi akan memiliki kekuasaan/power yang lebih tinggi pula dalam percaturan politik internasional dan hubungan antar negara. Negara juga harus mampu mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Kekayaan negara baik dalam bentuk sumber daya alam hayati maupun mineral tambang, harus dapat diidentifikasi dan juga dimanfaatkan secara bijaksana sehingga keberlangsungan atau *sustainability*-nya terjaga.

Danda tidak hanya dimaknai sebagai militer/angkatan bersenjata saja namun juga upaya militer melindungi kedaulatan darat, laut, udara, angkasa dan *cyber* nya. Negara yang kuat harus memiliki militer yang handal yang mampu melindungi keutuhan dan kedaulatan negaranya baik di darat, laut udara dan bahkan dari ancaman *cyber* sekalipun.

Sementara *Mitra* dimaknai sebagai sekutu yang memfokuskan pada kemampuan diplomasi sebuah negara di dalamnya. Bagaimana negara dapat memainkan diplomasinya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara lain, menjalin hubungan baru dan memanfaatkan power yang diperoleh melalui modal sosial (pertemanan dengan negara lain) untuk mencapai kepentingan negaranya.

Seiring dengan kemajuan teknologi, maka yang perlu dicermati dari pemaknaan ketujuh elemen ini adalah fokus mereka terhadap hal-hal baru yang muncul bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi, seperti misalnya pemaknaan pada ibukota yang dibentengi. Pada zaman kerajaan, pusat data dan pemerintahan berada di ibukota sehingga keberadaan benteng menjadi sangat krusial sebagai bagian dari pertahanan. Namun konteks zaman sekarang benteng yang diperlukan

tidak hanya berbentuk fisik lagi, terlebih karena keberadaan data-data negara dengan adanya teknologi digital, tidak lagi hanya disimpan dalam bentuk fisik (data di atas kertas) saja, namun juga dalam bentuk data digital. Data-data digital inilah yang kemudian perlu dijadikan *concern* oleh pemerintah pula. Karena tidak dapat dipungkiri kejahatan siber (pencurian data-data pemerintah, penyalahgunaan data masyarakat, *hacking*, *malware*, virus, dll) kian hari menjadi sebuah ancaman yang nyata dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Benteng siber untuk menjamin kerahasiaan data dan sistem keamanan teknologi digital serta informasi negara menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera dibentuk dan dijalankan. Contoh nyata adalah serangan *cyber ransomware* “*wanna cry*” yang menginfeksi lebih dari 75.000 komputer di lebih dari 99 negara pada bulan Mei 2017 para *hacker* yang menamai diri *The Shadow Brokers* meretas ribuan sistem komputer di dunia, mengenkripsi file dalam komputer dan meminta sejumlah uang tebusan untuk dapat mengembalikan komputer tersebut pada keadaan semula.¹²⁸ Di Indonesia, *ransomware* *wanna cry* ini menginfeksi sejumlah komputer di berbagai rumah sakit umum pemerintah dan meminta uang tebusan sebesar Rp. 4.000.000 untuk mengembalikan komputer ke keadaan sediakala.¹²⁹ Benteng pertahanan siber ini harus terkoordinasi secara komprehensif antara satu kementerian dan lembaga lainnya.

Menurut Abhisek Kumar (2003: 68) Teori Saptanga, atau elemen pembentuk negara ini sesungguhnya memiliki kesamaan dengan konsep kontemporer mengenai dimensi internal dari kekuasaan nasional (sebagaimana terlihat pada tabel 4.2 Teori Statecraft dan kekuatan nasional menurut pandangan Chanakya dalam Arthasahstra dengan konsep

¹²⁸ Joseph Cox, "A Massive Ransomware 'Explosion' Is Hitting Targets All Over the World". *Motherboard* dalam https://motherboard.vice.com/en_us/article/a-massive-ransomware-explosion-is-hitting-targets-all-over-the-world. (2017-05-12). diakses pada 20 November 2018

¹²⁹ Selena Larson, "Massive ransomware attack hits 99 countries". *CNN*. dalam <http://money.cnn.com/2017/05/12/technology/ransomware-attack-nsa-microsoft/>, (2017-05-12), diakses pada 20 November 2018

western. Dari perspektif negara modern (kolom tabel kedua) kita dapat menghubungkan masing-masing elemen yang dikemukakan Chanakya dengan variabel esensial dari kekuatan nasional kontemporer.

Tabel 4.2 Perbandingan Teori Statecraft Dan Kekuatan Nasional Menurut Pandangan Chanakya Dalam Arthasahstra Dengan Konsep Barat

<i>Prakrti</i> atau elemen pembentuk negara berdasarkan teori <i>saptanga</i>	Elemen pembentuk negara menurut Chanakya dalam perspektif negara modern	Model kekuatan nasional berdasarkan Teori Transisi Kekuatan	Model kekuatan nasional berdasarkan Tellis <i>et al</i>
<i>Swami</i> – Pemimpin negara	Kepemimpinan Politik	Kemampuan politik (dampak jangka pendek pada perubahan kekuatan nasional)	Sumber daya nasional : - Teknologi - Perusahaan - Sumber daya manusia - Sumber daya modal/ keuangan - Sumber daya fisik
<i>Amatya</i> – Dewan Menteri atau pejabat negara	Legislative dan birokrasi		
<i>Janapada</i> – wilayah dan populasi	Sumber daya nasional	Produktivitas ekonomi penduduk (dampak jangka menengah pada perubahan kekuatan nasional)	Kinerja Nasional - Kendala Eksternal - Kapasitas infrastruktur - Sumber daya ideasional
<i>Durga</i> – kota yang dibentengi	Pertahanan negara dan sumber daya perkotaan		
<i>Kosha</i> – Perbendaharaan	Sumber daya ekonomi		
<i>Danda</i> – angkatan bersenjata	Militer	Populasi (dampak jangka panjang pada perubahan kekuatan nasional)	Kapabilitas Nasional - Sumber daya strategi dan kemampuan konversi = kemampuan tempur
<i>Mitra</i> – Sekutu	Sekutu		

sumber: Kumar, Abhisek (2003)

Lebih lanjut, jika kita berupaya melihat persamaan dari tabel ini, baik model yang digambarkan oleh Chanakya ataupun model dari Tellis *et al*, keduanya mendiskusikan bahwa sumber daya nasional dan juga kemampuan militer menjadi kontributor utama kekuatan nasional. Ketiga model ini melihat keterkaitan antara berbagai elemen pembentuk negara.

Selain itu, teori Saptanga merujuk pada power negara yang tidak lagi abstrak, besarnya relatif namun merupakan keseluruhan dari variabel yang material maupun immaterial.¹³⁰ Bersamaan dengan hal tersebut, power dari negara bisa dievaluasi dan diperkirakan secara memadai. Termasuk di dalamnya penilaian tren perkebangan baik positif atau negatif dari ketujuh elemen tersebut. Apakah mengalami penurunan, kenaikan atau justru mengalami stagnasi.¹³¹ Merujuk pada pemahaman *statecraft* sebagaimana disampaikan oleh Dr. John Lenczowski, bahwa *statecraft* merupakan seni dalam menggunakan instrumen kekuatan nasional untuk mencapai tujuan membela kepentingan nasional yang vital, melancarkan Hubungan Internasional dan akhirnya menjadi penyebab perdamaian di dunia.¹³² Jika merujuk pada teori ini maka ketujuh elemen dalam *saptanga* ini merupakan bagian integral dalam seni memerintah pada zaman kerajaan Maurya. Di mana *saptanga* ini di akumulasikan dan digunakan untuk mencapai *yogakshema* (kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan rakyat).

Konsep dari Chanakya, sebagaimana telah dijelaskan di atas, mengenai kekuatan negara sebagai keseluruhan dari ketujuh elemen pembentuk negara, secara teoretis homolog dengan konsep kekuatan nasional dari Morgenthau. Morgenthau mengukur kekuatan negara melalui populasi, sumber daya alam (bahan mentah), pertanian, potensi industri dan kekuatan bersenjata negara. Morgenthau juga memasukkan faktor

¹³⁰ Michael Liebig, "Kautilya's Relevance for India Today", *India Quarterly* volume 69 Number 2, 2013, hlm.99-116

¹³¹ Kangle, RP. *Kautilya Arthashastra* (Part II). (New Delhi: Motilal Banarsidass, 1992) Note 1, hlm.884 (buku 7. Bab 18. Ayat 43)

¹³² Toby S. James, "Neo-Statecraft Theory, Historical Institutionalism and Institutional Change", *University of East Anglia*. 2016. Dalam https://ueaeprints.uea.ac.uk/54729/1/James_GOV_for_web.pdf. diakses pada 18 Desember 2018

immaterial seperti karakter nasional, moralitas nasional, dan kualitas dari pemerintah serta diplomasi.¹³³

Bentuk *statecraft* dalam pandangan Chanakya terlihat tidak jauh berbeda jika disandingkan dengan konsep trias politika. Dalam trias politika kekuasaan dipisahkan kedalam tiga lembaga berbeda, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif dan juga yudikatif¹³⁴. Bentuk trias politika ini tercermin dalam pustaka Arthashastra karya Chanakya. Kekuasaan legislative merujuk pada elemen *amatya* atau para Menteri yang memberikan nasehat dan membantu terkait pengaturan negara. Kekuasaan eksekutif merujuk pada elemen *swami* atau pemimpin negara. Sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan berdasarkan empat dasar hukum berupa *dharma* (*established law* atau hukum yang berlaku), *Charita* (*customary law* atau hukum adat), *Rajasasana* (*edicts, announced law* atau maklumat, hukum yang diumumkan, bisa berbentuk titah raja), *vyavahara* (*evidence, conduct* atau kesaksian, perilaku)¹³⁵. Praktik penegakkan hukum ini dijalankan oleh setiap pengadilan dengan tiga *Pradeshtri* (*magistrate* atau hakim setingkat menteri)¹³⁶.

Perbedaan dengan sistem tata negara yang sekarang adalah kekuasaan raja lebih luas daripada pemimpin negara dalam sistem presidensial. Para menteri atau *amatya* berperan untuk membantu menjalankan tata pemerintahan dan memberikan nasehat terhadap keputusan yang akan diambil oleh Raja atau pemimpin negara. Namun keputusan tertinggi ada pada raja, dan raja berhak memberikan titah atau keputusan yang kemudian berfungsi sebagai hukum mengikat yang berlaku pada seluruh warga kerajaan. Sementara para *amatya* atau menteri tidak

¹³³ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, (New York: Alfred A. Knopf. 1978) hlm. 107-170

¹³⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm.53

¹³⁵ Arthashastra, 3.1. 39-40

¹³⁶ Arthashastra 3.1.1

dalam posisi dapat menganulir keputusan yang dibuat oleh raja¹³⁷. Hal ini yang menjadi perbedaan dengan sistem trias politika modern saat ini, dimana kekuasaan antara tiga badan bersifat sama rata bukan hirarki, sehingga legislatif memiliki wewenang untuk menganulir keputusan yang telah diambil oleh eksekutif, jika kebijakan tersebut tidak tepat dan merugikan rakyat banyak.

Saptanga teori yang dikemukakan oleh Chanakya ini dapat menjadi sebuah bagian integral yang penting dalam strategi diplomasi pertahanan. hal ini disebabkan karena elemen dalam *saptanga* dapat terukur secara agregat sebagai sebuah kekuatan negara. Maka dari itu, hal ini tentu dapat dijadikan alat teoretis yang baik untuk analisis intelijen yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai lawan ataupun kawan yang akan diajak bekerja sama dalam kerangka diplomasi pertahanan sebuah negara.

Penilaian intelijen terhadap kapabilitas negara dapat didasarkan pada kriteria substantif dan obyektif. Kekuatan negara ditentukan oleh totalitas dan konektivitas dari tujuh elemen (*praktis*). Ketika kita melihat potensi kekuatan negara, kita dapat menemukan bahwa faktor kekuatan militer negara ini tampaknya sangat kuat: angkatan bersenjata secara kuantitatif besar. Tetapi analisis intelijen dapat mengungkap bahwa negara yang sama ini agak lemah dalam kekuatan ekonomi dan sumber daya keuangan yang diterjemahkan ke dalam gaji yang hilang, peralatan kelas rendah dan persediaan yang tidak mencukupi¹³⁸ — menghalangi kekuatan tempur tentara.

Sebaliknya, negara kecil yang secara teritorial dan demografis dengan angkatan bersenjata yang sederhana dapat menjadi negara yang kuat dalam rentang waktu yang relatif singkat. Itu bisa terjadi jika faktor negara *swami* dan *amatya* memiliki kualitas yang sangat baik, yang berarti

¹³⁷ Thomas R. Trautmann, *Arthashastra: The Science of Wealth*, (India: Penguin Books, 2012) hlm. 134-9

¹³⁸ Persediaan alutsista

mempromosikan dan memperluas ekonomi di pedesaan (*janapada*) dan di kota (*durga*) sehingga meningkatkan pendapatan pajak (*kosa*) yang memungkinkan angkatan bersenjata untuk ditingkatkan (*danda*) dan melakukan kebijakan luar negeri yang bijaksana (*amatya*).¹³⁹

Jika kemudian diarahkan dalam aplikasi Strategi Diplomasi Pertahanan elemen dalam saptanga ini merupakan variabel data yang dapat digunakan sebagai data awal sekaligus bahan pertimbangan dalam pembuatan strategi ataupun kebijakan diplomasi pertahanan sebuah negara. Hasil penilaian dan analisis dari intelijen terkait elemen saptanga negara dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum memutuskan jenis/bentuk kerjasama yang akan dilakukan serta cara pendekatan dalam negosiasi agar kerjasama membawa *mutual benefit* bagi kedua belah pihak.

4.2.3 Konsep Diplomasi dalam Arthashastra Sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan Negara

Konsep diplomasi dalam Arthashastra merupakan hal yang penting untuk diketahui jika peneliti hendak menjadikan Arthashastra sebagai dasar strategi diplomasi pertahanan. Konsep diplomasi dalam arthashastra di jabarkan kedalam terminologi *Mantrashakti*. Penerapan dari diplomasi dalam arthashastra di jabarkan kedalam dua teori besar. Pertama adalah enam kebijakan luar negeri (*ṣāḍgunya*). Kedua adalah empat metode diplomasi (*catur upaya*).

Setelah pengertian mengenai konsep diplomasi di peroleh, peneliti kemudian mengkonstruksi konsep diplomasi pertahanan menurut pandangan Chanakya dalam karyanya, Arthashastra. Konsep diplomasi pertahanan negara dalam Arthashastra diperoleh melalui analisa terhadap pandangan Chanakya pada teori diplomasi (*mantrashakti*, *ṣāḍgunya*, dan *catur upaya*), *teori mandala*, *saptanga*, dan *tri shakti*. Kemudian, konsep

¹³⁹ Michael Liebig, "Statecraft and Intelligence Analysis in the Kautilya- Arthashastra" dalam *Indigenous Historical Knowledge: Kautilya and His Vocabulary*, volume 3. (New Delhi : Institute for Defence Studies and Analysis (IDSA), 2017) hlm.53-4

diplomasi pertahanan menurut pandangan Chanakya dalam Arthashastra ini harus dilihat kembali relevansinya.

4.2.3.1 Analisis Konsep Diplomasi Pertahanan dalam Arthashastra Sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan Negara


Diplomasi dalam pandangan Chanakya merupakan bagian dari strategi besar mempertahankan eksistensi dari negara. Penekanan mengenai diplomasi dalam pandangan Chanakya berada pada beberapa konsep besar seperti *mantrashakti* (*power* negara yang digunakan untuk mempengaruhi negara lain dan termasuk diplomasi di dalamnya); *ṣāḍgunya*, enam kebijakan luar negeri yang digunakan secara paralel dengan teori *mandala* dan juga hasil penilaian dari *saptanga* sebuah negara; dan *catur upaya* atau empat cara yang digunakan secara umum dalam melaksanakan diplomasi antar negara.

Lebih lanjut, ketika kita melihat dan menganalisis secara holistik mengenai konsep-konsep yang dijabarkan oleh Chanakya, baik itu dalam teori *mandala*, *ṣāḍgunya*, *saptanga*, dan juga *catur upaya*, kita dapat melihat sebuah pola di mana sesungguhnya Chanakya memberikan penekanan yang cukup besar terhadap pentingnya sebuah negara memiliki *allies* atau sekutu.

Doktrin dari pemikiran Chanakya memanfaatkan konsep aliansi sebagaimana dijelaskan dalam teori keseimbangan kekuasaan. Chanakya mengaitkan aliansi antar negara menggunakan berbagai jenis perjanjian damai (*Samdhi*). Dalam menganalisis berbagai jenis aliansi, saran Chanakya bergantung pada kekuatan relatif antara negara-negara bagian. Pilihan kebijakan Chanakya tentang *Samsraya* (mencari perlindungan) mirip dengan konsep kontemporer mengenai *bandwagoning* sementara kebijakan *Yana* (mempersiapkan perang), *Dvaidhibhava* (kebijakan ganda), dan *Samdhi* (perdamaian) analog dengan keseimbangan internal dan eksternal suatu negara.

Sementara itu dalam menghadapi keadaan internasional yang anarki Chanakya menitik beratkan pada pelaksanaan *ṣāḍguṇya* dan *catur upaya*. jika kita bandingkan dan analisis antara *ṣāḍguṇya* dengan *contemporary instrument of power* yakni DIME (*Diplomacy, Information, Military and Economy*) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.2 tentang Perbandingan DIME, *Ṣāḍguṇya* dan *Power Option*, maka dapat terlihat bahwa sebagian besar kebijakan dalam *ṣāḍguṇya* terletak pada domain diplomasi. Hal ini sesungguhnya berkorelasi dengan analisis dari Chanakya bahwa untuk menilai kekuatan relatif antar negara kekuatan intelektual sebuah bangsa (kekuatan nasihat dan diplomasi) atau *mantrashakti* itu jauh lebih penting daripada kekuatan militer (*prabhava-shakti*) ataupun kepemimpinan (*utsaha-shakti*).

Tabel 4.3 Perbandingan DIME, *Ṣāḍguṇya* dan *Power Option*

Instrument Power kontemporer	Enam kebijakan Luar negeri Chanakya <i>Ṣāḍguṇya</i>	Jenis Perang menurut Chanakya	Peperangan sebagai <i>hard power</i>
Diplomasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sandhi – Membuat Perdamaian - Dvaidibhava – Kebijakan Ganda - Samsraya – mencari perlindungan - Asana – Netral 	<ul style="list-style-type: none"> - Perang Rahasia menggunakan langkah-langkah penghianatan dan psikologis - Perang diplomatic menggunakan langkah-langkah diplomatic offensive - Perang yang tidak di deklarasikan, menggunakan metode kladestin, pembunuhan rahasia dan gen rahasia - Perang terbuka pada waktu dan tempat yang ditentukan 	Intensitas yang lebih rendah
Informasi			
Militer	<ul style="list-style-type: none"> - Yana – Bersiap untuk perang - Viragaha - Perang 		
Ekonomi			

Sumber: Kumar, Abhishek (2016)

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa *śāḍgunya* menekankan lebih banyak pada diplomasi ketimbang militer dalam DIME. Namun bukan berarti dua bagian lainnya tidak mendapatkan perhatian penting. *Information* mendapatkan peranan penting pula namun bukan sebagai bagian integral dari *śāḍgunya*. *Information* dalam Arthashastra menjadi bagian yang seolah berdiri sendiri dalam kerangka kerja intelijen. Namun hasil *assesement* intelijen dalam bentuk telik-sandi dan informasi rahasia menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam range *śāḍgunya* ini. Antara diplomasi atau militer, antara damai atau perang.

Dalam *śāḍgunya* kepentingan ekonomi tidak terlalu nampak. Namun bukan berarti Chanakya tidak memberikan perhatian pada bagian ini. Menurut Chanakya, perekonomian merupakan elemen kekuatan negara yang penting bagi negara. Posisi perekonomian sama penting dengan porsi militer, bahkan dalam beberapa kasus perekonomian jauh lebih penting daripada militer itu sendiri.

Sesungguhnya tentara berakar pada perbendaharaan negara. Jika tidak ada perbendaharaan negara, tentara akan menyebrang ke musuh atau membunuh raja sendiri. Dan Perbendaharaan-lah yang menjamin keberhasilan semua usaha, tetapi sesuai dengan tempat, waktu dan kerja, salah satu diantara perbendaharaan dan tentara akan menjadi penting. Karena tentara merupakan alat untuk memperoleh dan melindungi perbendaharaan negara, perekonomian adalah alat dari perbendaharaan dan tentara. Oleh karena menghasilkan semua obyek, maka bencana perbendaharaan itu lebih gawat. (Arthashastra 8.1. 47-52)¹⁴⁰

Sutra ini menegaskan bahwa perekonomian atau perbendaharaan negara lebih penting keberadaannya. Karena perbendaharaan negara ini akan mempengaruhi berbagai sektor dan atau elemen negara yang lain, kemudian berpengaruh terhadap *power* negara secara agregat.

Chanakya juga menegaskan dalam Arthashastra 2.12.37 bahwa *“dari perbendaharaan kekuatan angkatan bersenjata dibangun. Dengan*

¹⁴⁰ Made Astana dan CS. Adiputro, *op.cit.* hlm 498-9

*perbendaharaan dan angkatan bersenjata, tanah diperoleh dengan perbendaharaan sebagai hiasannya*¹⁴¹. Dalam hal ini Chanakya merujuk pada pembangunan kekuatan militer itu dilakukan dengan bantuan perbendaharaan negara. Ketika kekuatan angkatan bersenjata negara prima, mereka dapat menambah kekayaan dengan cara mengakuisisi atau menaklukkan kerajaan lainnya (merujuk pada pemaknaan tanah) dan juga mendapatkan perbendaharaan (dari negara lawan), bisa dalam bentuk upeti, pajak, atau penguasaan sumber daya alam dan tambang dari wilayah yang diakuisisi sebagai bonus yang diperoleh (hiasannya).

Pada kenyataannya, Chanakya percaya bahwa bangsa-bangsa bertindak dalam kerangka pencapaian kepentingan politik, ekonomi maupun militer mereka. Chanakya berpikir bahwa kebijakan luar negeri ataupun diplomasi akan dipraktekkan selama itu bermanfaat bagi kepentingan mereka karena setiap negara pada dasarnya bertindak sedemikian rupa untuk memaksimalkan *power* mereka dan juga mencapai kepentingan negaranya. Chanakya, sebagai seorang realis memikirkan bahwa dunia internasional ini berada dalam keadaan yang sedemikian rupa di mana setiap kerajaan/negara sesungguhnya sedang berperang atau mempersiapkan perang dengan negara lainnya dan diplomasi merupakan senjata lain yang digunakan dalam peperangan yang konstan ini.¹⁴²

Chanakya mendefinisikan diplomasi sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh kerajaan/negara sehingga ia memperoleh kekuatan dan akhirnya mampu menaklukkan negara melalui hubungan diplomatik yang dibuat. Menurut Chanakya perjanjian dibuat sedemikian rupa sehingga menguntungkan dan bermanfaat bagi kerajaan/negara.¹⁴³ Dengan kata lain, pada dasarnya Chanakya menyarankan bahwa dalam menjalankan diplomasi tidak ada posisi (baik sekutu ataupun musuh) yang

¹⁴¹ *Ibid.* hlm. 127

¹⁴² Tentu perang disini tidak merujuk semata pada perang fisik yang melibatkan militer saja.

¹⁴³ Pravin Chandrasekaran, *Kautilya: Politics, Ethics and Statecraft*. (Harvard Kennedy School: Munich Personal RePEc Archive, 2006.) hlm. 18

permanen/abadi. Karena ketika keadaan lingkungan strategis berubah, maka sikap diplomatik juga harus menyesuaikan (berubah). Dalam upaya memahami kerangka berpikir Chanakya ini diperlukan sebuah teori yang disebut oleh Gadamer sebagai *preunderstanding*.

Gadamer (dalam susanto, 2016) mengatakan bahwa “pra-pemahaman” atau *preunderstanding* ini merupakan posisi awal penafsir yang memang pasti ada ketika dia membaca teks. Keharusan ini maksudkan agar seorang penafsir mampu mendialogkan pra-pemahaman yang dimiliki dengan isi teks yang ingin ditafsirkan. Namun kemudian pra-pemahaman ini harus terbuka untuk dikritisi, direhabilitasi dan dikoreksi oleh penafsir itu sendiri ketika ia sadar atau mengetahui bahwa prapemahamannya tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh teks yang ditafsirkan. Hasil dari rehabilitasi atau koreksi terhadap pra-pemahaman itu kemudian disebut dengan istilah *Volkemmenheit des Vorverstandnisses* atau kesempurnaan pra pemahaman.¹⁴⁴

Dengan demikian, untuk dapat memahami gagasan-gagasan filsafat politik yang dikemukakan oleh Chanakya seorang penafsir harus memiliki pra-pemahaman mengenai berbagai paradigma yang berkembang dalam filsafat politik itu sendiri. Untuk kemudian mengerti berada pada spektrum paradigma apa, gagasan yang dibangun oleh Chanakya. Pra-pemahaman tersebut kemudian dapat dijadikan dasar untuk menelaah spektrum paradigma dari gagasan-gagasan filsafat politik Chanakya. Melalui pra-pemahaman inilah penafsir kemudian dapat mengerti bahwa sebagian besar gagasan filsafat politik Chanakya berada pada spektrum paradigma realisme politik.

Paradigma realisme yang sangat kental dalam tercermin dalam konsep-konsep yang dikemukakan oleh Chanakya. Secara positif, ini membuat negara akan selalu waspada akan setiap kemungkinan terburuk yang dapat terjadi. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga

¹⁴⁴ Edi Susanto, 2016 *op.cit.* 52-3

membawa dampak negatif, demikian pula dalam menjalankan diplomasi. Anand Krishna, seorang Tokoh Hindu, menekankan secara khusus bahwa diplomasi yang dibangun oleh Chanakya berada pada tataran *fear base*, atau didasari oleh ketakutan.¹⁴⁵

Perasaan *insecurity* bahwa negaranya bisa diserang kapan saja oleh siapa saja, sehingga untuk mencegah serangan dari negara lain, sekaligus menjaga keamanan, keselamatan dan kesejahteraan negara, negara harus memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan besar ini yang kemudian dimanfaatkan, baik untuk menambah kekuatan ataupun menakuti negara lain/musuh agar tidak berani untuk menyerang negaranya. Semacam efek daya tangkal/*dettrence* dalam konsep hubungan internasional modern saat ini. Tapi ada hal mendasar dan sangat penting untuk disadari bahwa konsep ini tidak lagi bisa berlaku sama pada abad modern ini. *Fear base* dalam relasi antar negara itu tidak cukup. Pendekatan persahabatan bisnis, ekonomi ataupun perdagangan memerankan peranan yang lebih dominan saat ini pembuatan perdamaian pada abad ini lebih sering dilakukan dengan *sharing comodity* untuk mencapai *common interest* masing-masing negara.

Namun sesungguhnya jika melihat lebih jauh mengenai upaya mencapai kepentingan nasional dan juga penaklukan, maka sesungguhnya paradigma Chanakya tidak dapat dikategorikan sepenuhnya menjadi realis semata. Berdasarkan analisa kedua hal tersebut justru ambiguitas akan terlihat antara paradigma realisme dan juga idealisme. Dari perspektif idealis, fokus Chanakya bukan pada penaklukan hegemonik terhadap seluruh dunia, tetapi pada kemajuan ekonomi, stabilitas, dan keamanan negara. Berfokus lebih pada stabilitas dan keamanan, Chanakya membatasi wilayah penaklukan *Vijigishu* ke batas-batas Benua India, daripada menciptakan motivasi untuk penaklukan hegemonik yang tak ada habisnya.

¹⁴⁵ Wawancara 18 November 2018.

Sementara itu dari paradigma realisme Chanakya mendukung kebijakan hegemonik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan/kepentingan negara. Terlebih dalam interaksi antarnegara pencarian *power* dan keamanan yang maksimal merupakan hal yang naluriah terjadi. Meskipun menjelaskan mengenai pentingnya *ally* atau sekutu, Chanakya selalu menekankan untuk tidak bergantung pada aliansi atau sekutu dalam upaya membantu dan memajukan negara. Karena hal itu tidak berada dibawah kendali mereka secara langsung dan penuh. Chanakya meminta penguasa negara untuk berfokus mengoptimalkan *saptanga* karena *saptanga* berada dibawah kendali mereka langsung. Tidak seperti sekutu yang lebih sering tidak berada dibawah kendali penguasa negara secara langsung. Pemikiran realis yang berikutnya adalah Chanakya hanya memikirkan kepentingan negara sang *vijigṛṣu*. Kepentingan negara berada lebih di atas daripada kemajuan kemanusiaan global.

Lebih jauh, jika kita berupaya menganalisis mengenai pentingnya sebuah negara memiliki sekutu atau aliansi maka hal ini seolah-olah akan agak bersebrangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dan non-blok. Di mana Indonesia tidak pernah membangun aliansi dengan negara manapun, dan secara tegas Indonesia menjadi negara yang tidak memihak antara blok barat dan blok timur pada masa perang dingin berlangsung. Indonesia tidak membangun aliansi dengan negara manapun karena pandangan bahwa dalam setiap aliansi yang dibuat akan ada konsekuensi yang ditanggung bersama sebagai sebuah aliansi. Semisal salah satu negara dalam aliansi terlibat dalam konfrontasi dengan negara lain, maka Indonesia sebagai aliansinya kemudian memiliki “tanggung jawab moral” untuk membantu apapun yang terjadi, walau itu bersebrangan dengan keinginan dan kepentingan negara. Keadaan ini membuat Indonesia akan berada pada posisi negara netral dalam lingkaran konstelasi geopolitik mandala dari negara lain.

Namun hal yang juga perlu dikritisi lebih lanjut adalah pemaknaan dari kata *mitra* dalam Arthashastra. *Mitra* dimaknai sebagai aliansi atau

sekutu. Pada masa kerajaan keberadaan sekutu ini dipandang sebagai sesuatu yang nyaris abadi sepanjang kepentingannya masih sejalan. Sementara dalam perkembangan Hubungan Internasional saat ini nampaknya diperlukan sebuah pemaknaan baru terhadap kata *mitra* dalam Arthashastra. *Mitra* tidak hanya merujuk pada artian aliansi/sekutu namun juga dapat berarti pihak/negara yang diajak bekerjasama. Dengan demikian pemaknaan *mitra* menjadi lebih luas. Karena jika hanya dimaknai sebagai sekutu semata, maka cenderung akan memberikan kesempatan yang lebih sedikit untuk terjadi, terlebih karena sekutu dalam hubungan antar negara menuntut konsekuensi yang lebih besar dari sekedar rekan kerja. Pemaknaan mitra dari sekutu menjadi rekan kerja atau pihak yang diajak bekerjasama dapat membuka aksesibilitas penggunaan konsep ini pada zaman sekarang.

Ketika pemaknaan mitra ini telah diperluas menjadi rekan kerja/pihak yang diajak bekerja sama maka bentuk-bentuk kerjasama antar negara yang terjadi dalam kerangka regionalisme (ASEAN) bahkan kerjasama bilateral dan multilateral dapat dikategorikan sebagai upaya negara membangun/menjadi mitra. Dalam konteks politik luar negeri bebas aktif, maka sesungguhnya Indonesia telah menjadi negara dengan jaringan mitra yang luar biasa besar. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa melalui politik bebas aktif dan komitmen sebagai negara non-blok Indonesia memiliki modal sosial yang ditinggi dimata negara-negara lain di dunia.

Upaya Indonesia membangun jaringan dan modal sosial ini terlihat jelas dalam pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif Indonesia selama satu dekade ke belakang. Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif di masa Kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yoedhoyono di bukan lagi mengedepankan "*Rowing between the Two Reefs*" (medayung diantara dua karang). Dibawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, Polugri Indonesia berada pada prinsip "*Navigating a Turbulent Ocean*" (Mengarungi samudra bergejolak) dengan Doktrin Natalegawa yang disebut sebagai "*Dynamic Equilibrium*" (keseimbangan dinamis).

Dalam doktrin ini, Marty Natalegawa mendefinisikan *Dynamic Equilibrium* sebagai keselarasan dalam melakukan kerjasama antar negara dalam interaksi yang dilakukan secara damai. Dengan demikian, hal tersebut dapat menghasilkan rasa saling menguntungkan, namun tidak menimbulkan dominasi kekuatan tunggal dalam kawasan.¹⁴⁶ Secara garis besar doktrin ini merupakan pendukung kebijakan *Zero Enemy Thousand Friends* pada masa pemerintahan SBY. Dapat dikatakan demikian karena, esensi dasar doktrin ini adalah menciptakan kerangka kerjasama multilateral yang bersifat *win-win solution* untuk menciptakan *trust building* dan mengikis potensi munculnya konflik antar negara. Upaya meredam konflik antar negara melalui kerjasama yang *win-win solution* merupakan cara “mendulang banyak kawan” dan “meniadakan musuh”.

Sementara itu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Politik Luar negeri Indonesia masih berlandaskan Politik Bebas-Aktif, namun pendekatan kebijakannya diarahkan pada Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum*). Kebijakan ini ditujukan untuk membangun kembali martabat Indonesia sebagai negara maritime. Slogan yang digunakan adalah Indonesia cinta perdamaian namun lebih cinta kemerdekaan. Dengan artian Indonesia akan bersahabat dengan negara manapun, namun jika kepentingan, martabat, dan kedaulatan negara diganggu, Indonesia tidak akan tinggal diam. Dalam hubungan antar negara Indonesia berposisi sebagai *Honest Broker*, jembatan penghubung antara negara-negara yang berkonflik.¹⁴⁷ Kebijakan luar negeri yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sesungguhnya adalah

¹⁴⁶ Steven, Yohanes. “Telaah Doktrin Natalegawa, ‘Dynamic Equilibrium’ Terhadap Kepentingan Ekonomi Indonesia: Studi Kasus Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011.” (2011) dalam <https://stevenyohanes.wordpress.com/2013/12/19/telaah-doktrin-natalegawa-dynamic-equilibrium-terhadap-kepentingan-ekonomi-indonesia-studi-kasus-keketuaan-indonesia-di-asean-tahun-2011/#comments> diakses pada 16 Desember 2018

¹⁴⁷ Muhammad Tri Andika dan Allya Nur Aisayah, “Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan EKonomi dan Kedaulatan?”, *Indonesian Perspective*. Volume 2, Number 2 (Juli-Desember 2017) hlm 161-179

upaya melanjutkan warisan modal sosial yang telah dilakukan pada masa pemerintahan SBY. Terlihat dari jenis kerjasama yang mengedepankan *win-win solution* dengan berbagai negara, namun dengan penekanan terhadap diplomasi maritime dan juga martabat serta kedaulatan negara¹⁴⁸.

Konsep Diplomasi dalam Pustaka Arthashastra karya Chanakya dijabarkan dalam *Mantrashakti* sebagai kekuatan ucapan, narasi lisan maupun tulisan untuk mencapai tujuan negara. *Mantrashakti* dalam Arthashastra merupakan bagian integral dan paling penting dari kekuatan yang harus dimiliki negara. Konsep *Mantrashakti* dapat menjadi paradigma dasar dalam diplomasi pertahanan di mana diplomasi diletakkan sebagai salah satu kekuatan terpenting yang harus dimiliki secara mumpuni oleh sebuah negara. Diplomasi digunakan sebagai *first line* dan *last line of defense* yang diejawantahkan dalam kebijakan luar negeri terhadap negara-negara yang ada dalam perpolitikan internasional. *Samdhi*, *dvaiddibhava*, *samsraya*, dan *asana* di gunakan sebagai *first line* (upaya *preventive*) untuk menggalang kekuatan dan memastikan negara lain tidak menyerang/bersebrangan negara sang *vijigīṣu*. Sementara *Samdhi* dan *samsraya* dapat digunakan sebagai *last defense* ketika perang tidak dapat dielakkan dan kedamaian diupayakan untuk mengurangi efek destruktif dari perang terhadap masyarakatnya. Dalam melaksanakan poin-poin *Ṣādguṇya* ini *catur upaya* di jalankan melalui *sama*, *dama*, *bedha*, dan *danda*.

4.2.3.2 Korelasi konsep Diplomasi Pertahanan dalam Pandangan Chanakya Arthashastra dan Praktik Diplomasi Pertahanan Negara Republik Indonesia

Diplomasi pertahanan dalam pandangan Chanakya Arthashastra dapat dijabarkan dalam kerangka sebagai berikut. Diplomasi menurut

¹⁴⁸ Terlihat dari ketegasan Indonesia dalam menghadapi *illegal fishing* dengan melakukan penggelaman kapal-kapal nelayan negara asing yang kedapatan mencuri ikan di wilayah Kedaulatan Indonesia. Ketegasan ini dipandang tidak tampak pada Era presiden SBY utamanya ketika kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Presiden SBY dan Pejabat Tinggi Negara RI lainnya.

Chanakya dalam Arthashastra disebut sebagai *Mantrashakti*. Diplomasi sebuah negara dipengaruhi oleh dua hal besar. Pertama adalah konsep pemetaan ancaman, utamanya ancaman eksternal yaitu teori mandala/*circle of state*. Kedua adalah hasil penilaian atau assesment dari tujuh elemen yang membentuk sebuah negara/teori *saptanga*. Dalam menjalankan diplomasi ini maka terdapat enam kebijakan luar negeri/*ṣāḍgunya* yang diaplikasikan dengan memperhitungkan teori mandala dan juga teori *saptanga*. Adapun aktor utama yang terlibat dalam *ṣāḍgunya* ini antara lain pemimpin negara/raja, pimpinan angkatan bersenjata, dan diplomat (yang juga berperan ganda sebagai agen intelijen negara).

Dari *ṣāḍgunya* ini kemudian strategi diplomasi pertahanan yang diinginkan untuk dijalankan dengan sebuah negara dimunculkan. Adapun bentuk kegiatannya antara lain: *join march*¹⁴⁹, *join excercise*¹⁵⁰, pembelian alutsista, pelatihan prajurit, dan pembuatan pakta pertahanan¹⁵¹. Kemudian cara-cara dalam menjalankan diplomasi pertahanan ini dilaksanakan menggunakan *catur upaya*, yaitu *sama*, *dama*, *bedha* dan *danda*.

Karena dijiwai oleh pemikiran realis diplomasi pertahanan yang dijalankan berdasar pandangan Chanakya dalam Arthashastra berujung pada terciptanya *prabhava shakti* atau yang pada ilmu hubungan internasional modern dikenal sebagai *effect deterrence* atau efek daya tangkal. *Prabhava shakti* sebagai bentuk *power* bukanlah akhir yang ingin dicapai oleh Chanakya. Kepemilikan *prabhava shakti* ini ditujukan untuk mewujudkan *yogakshema* atau kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan dan kemakmuran rakyat sebuah negara.

Kerangka diplomasi pertahan dalam pandangan Chanakya dalam magnum opusnya, Arthashastra dapat dilihat pada gambar 4.9 mengenai

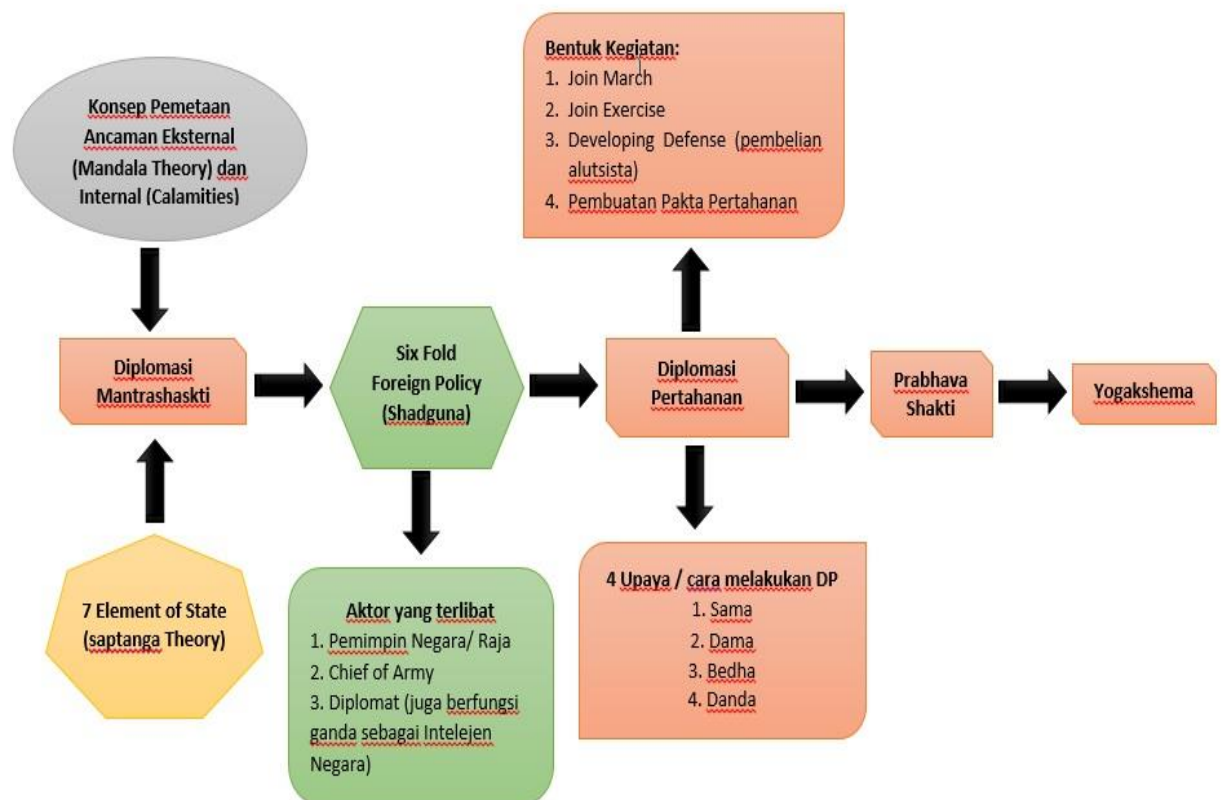
¹⁴⁹ *Join march* merujuk pada keadaan di mana sang vijigisu bersama sekutunya melakukan *march* bersama untuk melawan negara musuh

¹⁵⁰ Merujuk pada keadaan di mana sang vijigisu bersama negara mitra/ sekutu melakukan latihan bersama baik dengan latihan perang bersama ataupun latihan strategi bersama

¹⁵¹ Pakta pertahanan bisa dibuat dengan mitra ataupun musuh. kerajaan Maurya dibawah pemerintahan Chandragupta tercatat pernah membuat pakta pertahanan dengan Seloucos Nicator (Penguasa Yunani di Asia Barat)

Konstruksi Diplomasi Pertahanan Negara dalam pandangan Chanakya-Arthashastra.

Diplomasi Pertahanan Dalam Pandangan Chanakya Arthashastra



Gambar 4.9. Konstruksi Diplomasi Pertahanan Negara dalam pandangan Chanakya-Arthashastra

Sumber: Hasil Olah Peneliti dari berbagai sumber terkait Arthashastra, 2018

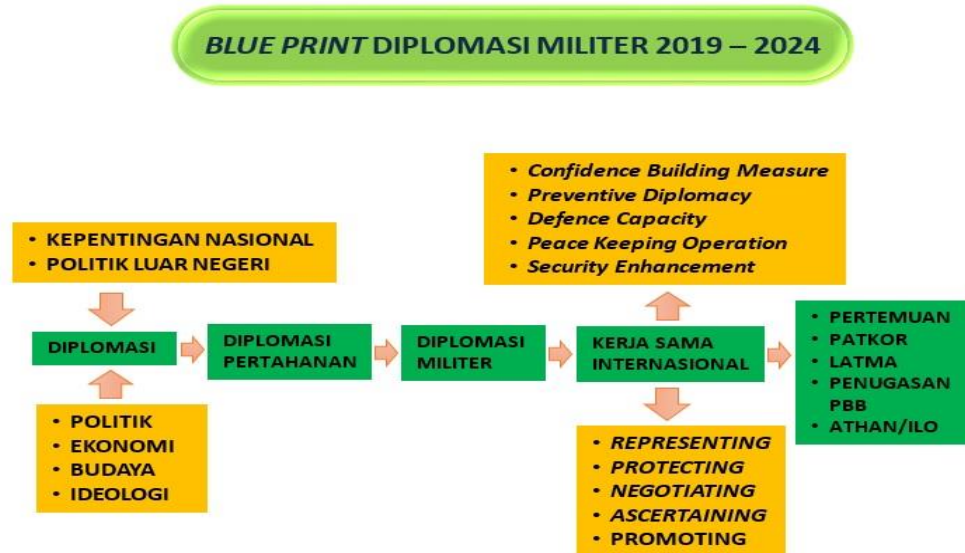
Konstruksi diplomasi pertahanan negara berdasarkan pandangan Chanakya dalam Pustaka Arthashastra berada pada lingkup paradigma realisme. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam menghadapi perkembangan politik internasional saat ini, pendekatan realis yang terlalu murni sebagaimana dijabarkan Chanakya dalam Arthashastra ini dipandang tidak cukup sempurna. Diperlukan penyesuaian pada beberapa bagian termasuk pemberian interpretasi baru, sehingga pendekatan Chanakya dapat dijadikan sebuah *grand* strategi yang tak lekang oleh zaman.

Paradigma Diplomasi Pertahanan berdasarkan padngan Chanakya dalam Arthashastra ini terlalu militeristik. Hal ini dapat dimengerti karena sifat ancaman yang berkembang pada masa itu adalah ancaman bersifat tradisional. Ancaman berasal dari luar negara berupa invasi dari negara lain.¹⁵² Maka dari itu kemudian sistem pertahanan negara dan reaksi terhadap penanggulangan ancaman yang menimpa negara masih bersifat tradisional (militeristik). dengan demikian ketika hendak mengaplikasikan paradigma ini ke masa sekarang diperlukan pendekatan yang lebih holistic. Pendekatan holistik ini tidak hanya melibatkan unsur militer dalam pertahanan negara, baik dalam pemetaan dan penaggulangan ancaman, diplomasi, termasuk di dalamnya pada pembuatan strategi dan kebijakan pertahanan. Keberadaan unsur non-militer akan menghasilkan sebuah pendekatan yang lebih holistik.

Jika dianalisa lebih jauh sesungguhnya kerangka kerja diplomasi pertahanan menurut pandangan Chanakya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan diplomasi militer Indonesia yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia. Hal ini disebabkan karena memang diplomasi pertahanan dalam kerangka Chanakya merupakan kerangka yang *military heavy* dan berfokus pada ancaman yang masih bersifat tradisional. Namun jika dilihat secara lebih holistik, maka akan terlihat bahwa terdapat beberapa perbedaan antara kerangka kerja diplomasi pertahanan menurut pandangan Chanakya dalam Pustaka Arthashastra dengan kerangka kerja diplomasi pertahanan Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dalam diplomasi pertahanan Indonesia yang berkembang saat ini, unsur-unsur nir-militer telah terlibat pada porsi tertentu. Unsur-unsur nir-militer ini muncul sebagai reaksi atas proliferasi ancaman yang dihadapi oleh Indonesia.

¹⁵² Pada saat arthasahstra disusun kerajaan Maurya juga sedang menghadapi invasi yang dilakukan oleh The Great Alexander.

Kerangka diplomasi militer Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.10 tentang Blueprint Diplomasi Militer 2019-2024.¹⁵³



Gambar 4.10 Blueprint Diplomasi Militer 2019-2024

Sumber: Adji, Saptono, 2018

Dalam *blueprint* ini terlihat bahwa diplomasi militer sebagai bagian dari diplomasi pertahanan, di mana militer menjadi aktor yang memainkan peranan signifikan di dalamnya. Berdasarkan bagan ini pula dapat diketahui bahwa diplomasi pertahanan Indonesia tidak dapat hanya diidentikkan dengan diplomasi militer, di mana aktornya hanya militer dan kementerian pertahanan. Hal ini terlihat dari mesin diplomasi Indonesia yang digerakkan oleh kepentingan nasional, politik luar negeri, politik dalam negeri, ekonomi, budaya dan juga ideologi. Hal ini membuat militer tidak menjadi *single fighter* dalam arena diplomasi pertahanan di Indonesia. Setidaknya dalam setiap aktivitas diplomasi pertahanan terdapat dua unsur kementerian yang selalu terlibat, yaitu kementerian pertahanan (termasuk TNI di dalamnya) dan juga kementerian luar negeri. Sedangkan secara umum untuk kasus-kasus tertentu, aktor lain seperti kementerian lembaga

¹⁵³ Paparan Brigjen TNI Saptono Adji, Direktur B BAIS TNI. Dalam Focus Group Discussion Pusat Studi Diplomasi Pertahanan, 19 Juli 2018.

terkait juga menjadi subjek diplomasi pertahanan Indonesia. Seperti misalnya dalam kerjasama pertahanan pembelian shukoi dengan metode imbal dagang, maka Bappenas dan Kementerian Perdagangan beserta Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar negeri yang menjadi aktornya.¹⁵⁴ Intinya dalam Diplomasi Pertahanan Indonesia seluruh sektor di kementerian ataupun di lembaga terkait menjadi sebuah kesatuan yang saling melengkapi dan saling mendukung demi tercapainya tujuan negara.

Terdapat perbedaan praktik diplomasi pertahanan dalam pandangan Chanakya arthashastra dengan praktik diplomasi pertahanan modern yang berlaku saat ini. perbedaan maupun persamaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4 tentang Perbandingan konsep Diplomasi Pertahanan dalam Pandangan Chanakya Arthashastra dengan Konsep Diplomasi Pertahanan Modern yang dilaksanakan pada masa sekarang.

Tabel 4.4 Perbandingan Konsep Diplomasi Pertahanan

Variabel	Diplomasi Pertahanan menurut Chanakya Arthashastra	Diplomasi Pertahanan Modern
Aktor	Negara (Raja, Angkatan Bersenjata, Diplomat, Intelejen)	1. Negara (Pemimpin Negara, kementerian/ Lembaga militer dan non militer, angkatan bersenjata) 2. Non Negara (Industri pertahanan / bisnis Pertahanan)
Nature	Militeristik	Hybrid (militer dan non militer)
Platform kerjasama	Antar negara saja / government to government	1. Government to Government, 2. Government to Bussiness, 3. Bussiness to Bussiness (dibawah pengawasan negara)

¹⁵⁴ Wawancara Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, Dirjen Strahan Kemhan 2014-2017 dan Kol. Kav. Oktaheroe Ramsi, Kasubdit Multilateral Dirjenstrahan Kemhan.

Paradigma	Realis	Neo-realis, Konstruktivisme
<i>Interstate relation</i>	Konflikual; saling curiga; negara tetangga merupakan musuh alami dan potensial, namun derajat hubungan tergantung dari sikap dan reson negara tetangga terhadap negara yang bersangkutan (<i>vijigisu</i>)	Sebagian besar menganut paham regionalisme; kerjasama untuk mewujudkan kepentingan bersama (<i>common interest</i>)
Bentuk kegiatan	<i>Join March; join exercise; Developing defense</i> (Alutsista dan SDM); pakta perdamaian	Pertukaran perwira, latihan bersama, patrol bersama, kerjasama industri pertahanan, pengiriman pasukan perdamaian.
Tujuan diadakan Diplomasi Pertahanan	Prabhava shakti, terbentuknya <i>deterrence effect</i> negara yang kuat sehingga negara bisa mencapai <i>yogakshema</i> (keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat)	Terbentuknya <i>Confidence Building Measure</i> (CBM), rasa saling percaya antar negara, sehingga negara bisa mencapai kepentingan nasionalnya sekaligus dengan terciptanya keamanan bersama di region

Sumber: Konstruksi Penulis dari berbagai sumber, 2018

Jika ditelaah lebih jauh, sesungguhnya konsep-konsep Arthashastra perdasarkan pandangan Chanakya dapat dijadikan bahan kajian dalam upaya membangun strategi diplomasi pertahanan Indonesia. Prinsip dasar Chanakya dalam Pustaka Arthashastra adalah upaya membangun kesejahteraan negara dengan membangun sejumlah elemen. Salah satu hal yang sangat penting adalah mendapatkan dan menggunakan SDM yang unggul untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara. SDM unggul di bidangnya sangat penting, terlebih untuk hal-hal yang sangat serius seperti pertahanan. Chanakya juga berbicara tentang *political ethic* yang sangat penting dikaji untuk dapat diterjemahkan dengan sistem di Indonesia.

Konsep *Mantrashakti* dapat diadopsi dan dikembangkan dalam pola Diplomasi Pertahanan Indonesia. Jika dikaji lebih jauh, *mantrashakti* merupakan kekuatan yang dibangun di atas kecerdasan (pikiran/*manana*, urat kata dari *mantra*) dan secara umum mantra berarti ucapan. Jadi *mantrashakti* merupakan upaya kekuatan yang dibangun di atas kecerdasan dan kekuatan narasi manusia termasuk perkataan dan tulisan. *Mantrasahakti* dalam Arthashastra dikenal sebagai *soft power diplomacy*, yakni menasehati, mengarahkan, sesuatu melalui kekuatan lisan yang membuat seseorang (dalam hal ini Raja Chandragupta) rela mengambil tindakan yang dibutuhkan demi tujuan besar peradaban. Untuk hal ini, Indonesia memerlukan *patern* mendidik putra-putri bangsa yang memiliki keunggulan dibidang ini. *Mantrashakti* juga menyangkut narasi non lisan, dalam hal ini berupa tulisan. Menurut data perbukuan di Indonesia, selain minat baca yang kurang, jumlah publikasi juga sangat rendah sehingga kekuatan *mantrashakti* harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Narasi tertulis juga memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menimbulkan persepsi bagi warga dunia tentang Indonesia. Dominasi barat atas narasi tulisan harus dihentikan jika ingin membangun *mantrashakti* dan Indonesia harus memperhatikan hal ini. Dalam Bahasa Veda, intelektualitas menjadi kunci dan penentu diplomasi. Bahkan dalam Bahasa Chanakya, intelektualitas ini dapat melakukan 'pembunuhan' masal bahkan bayi dalam kandungan sekalipun.

India tampaknya menggunakan kekuatan ini tanpa terdeteksi oleh Barat, setidaknya pada awal program ini. India telah berhasil secara perlahan menguasai kancah ilmiah dunia dengan menempatkan para ilmuwan India pada berbagai bidang seperti NASA dan perusahaan raksasa berbasis teknologi. Dengan mudah, India dapat membangun *mantrashakti* tanpa harus berupaya keras menunjukkan keunggulan militer negaranya. Ketika ada perseteruan antar dua negara, India dengan mudah memainkan isu menarik ilmuwan yang membuat dunia tersadar betapa banyak sektor yang dipegang dan dikendalikan oleh India. Hal ini akan menjadi lebih kuat

ditambah dengan penanaman ideologi kesetiaan terhadap tanah air *Bharatavarsha* kepada masyarakat India walau sudah berganti kewarganegaraan. India dengan mudah tetap memberikan akses ke negaranya guna memperkuat hubungan emosi warga keturunan India walau secara resmi tidak lagi menjadi warga negara India dalam konteks negara modern¹⁵⁵.

Jadi satu hal penting yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam membangun Diplomasi Pertahanan kedepannya adalah mantrashakti yang dijabarkan dalam beberapa elemen dan ukuran yang harus dibangun, yakni SDM yang memiliki intelektualitas unggul yang mampu melakukan diplomasi baik melalui narasi/wacana baik melalui keunggulan retorika maupun tulisan yang dapat membangun persepsi baik masyarakat dunia terhadap Indonesia, selain itu juga membangun hubungan baik terhadap warga dunia yang memiliki pertalian darah dengan Indonesia, sebagai sebuah kekuatan besar yang tidak tampak, namun akan memberikan dampak luar biasa bagi pembangunan dan modal diplomasi yang sangat baik. Dari pengamatan, selama ini negara tidak membangun hubungan baik dengan warga negara lain yang sesungguhnya memiliki pertalian darah dengan Indonesia dan relative ada pengabaian. Pola berpikir bahwa warga negara hanyalah yang secara resmi menjadi warga negara sesungguhnya sama dengan pola berpikir Chanakya dalam menafsirkan negara sebagai sebuah daratan semata. Ini menjadi titik lemah yang mengakibatkan tidak langgengnya dinasti Maurya. Cina sesungguhnya telah membangun pola ini, walau secara kasar tetapi menguntungkan di mana keturunan Cina di seluruh dunia masih memiliki ikatan yang kuat dengan leluhurnya.

Sesuai dengan pendapat Zimmer (2011) fluktuasi pada situasi internasional modern ini menunjukkan bahwa teori-teori politik yang berkembang di India pada zaman purbakala mungkin sama sekali tidak ketinggalan zaman. Hal ini dimungkinkan karena teori politik India kuno

¹⁵⁵ Wawancara Dr. I Ketut Donder, Ph.D, 15 November 2018 dan Dr. (Cand) Ni Kadek Surpi 14 November 2018

memusatkan perhatian pada keselamatan dan kesejahteraan negara dan upaya diplomasi keluar untuk membangun keseimbangan. Kebijakan-kebijakan ini kedepan akan menjadi isu yang semakin santer dengan semakin maju dan berkembangnya pemikiran-pemikiran filsafat di Barat yang menginginkan semacam adanya *global ethic* di mana negara menghormati warga dunia dan membangun kesejahteraan bersama.¹⁵⁶

Selain itu, konsep utama dalam pertahanan dan kenegaraan, *satya* dan *virya*, dapat dibangun guna membangun kekuatan di Indonesia. India mengajarkan konsep *satya* yakni kesetiaan, kepatuhan yang tinggi terhadap negara termasuk pimpinan negara. *Virya*-keberanian dan daya tahan seorang ksatria, yang mampu membalikkan kekalahan menjadi kemenangan telah tertanam kuat dalam berbagai risalah politik India. Indonesia tampaknya harus membangun kekuatan ini guna membangun negara yang kuat, yakni *satya* dari segenap elemen warga negara dan *virya* terutama bagi para ksatria-nya. Sebab dalam risalah politik India, tidak ada negara yang kuat tanpa *virya*.¹⁵⁷

Menurut sejumlah informan¹⁵⁸, beberapa pola tampak bersesuaian dengan yang dijalankan di Indonesia, hanya menggunakan bahasa yang berbeda. Hal yang paling menonjol adalah politik luar negeri yang bebas aktif, memiliki kesamaan pola dengan risalah dan kebijakan India kuno. Dalam teks Veda, manuskrip tertua di muka bumi, yang juga menjadi inspirasi bagi Chanakya menulis risalah dan upaya membangun kesejahteraan negara, juga disertai dengan upaya membangun warga negara dunia. Kebijaksanaan Veda kuno mengajarkan untuk melakukan upaya membangun kesejahteraan dunia, menjaga keamanan dan menggunakan kecerdasan demi kemajuan bersama, bukan terikat territorial semata. Chanakya menjabarkan pola ini dengan membangun persahabatan dan kerjasama dengan kerajaan atau negara lain yang

¹⁵⁶ Heinrich. Zimmer, *Sejarah Filsafat India*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm.89

¹⁵⁷ Ibid.

¹⁵⁸ Wawancara Prof. Dr. I Made Titib

memenuhi syarat untuk dijadikan sahabat. Namun demikian, Chanakya mengajarkan kewaspadaan yang sangat tinggi karena selalu ada musuh yang mengintai. Kewaspadaan ini dapat diterjemahkan dengan berbagai cara seperti pola mengirimkan duta yang sekaligus merangkap agen rahasia atau seseorang yang ditugaskan secara total sebagai agen rahasia yang bekerja untuk negara.

Filsafat Politik Chanakya mengajarkan agar negara secara aktif membangun kesejahteraan warga dunia, bukan sekedar melakukan proteksi bagi negara semata, namun demikian harus ada pola yang kuat dalam penanganan kewaspadaan-atas musuh yang terlihat dan tidak terlihat. Hanya demikian, misi membangun perdamaian dunia sebagaimana tujuan besar dari Indonesia bisa terwujud sekaligus kewaspadaan atas musuh-musuh baik yang terlihat maupun musuh yang tidak terlihat. Membangun kesejahteraan dan kedamaian dunia tidak dapat dilakukan tanpa kewaspadaan yang tinggi mengingat karakter manusia atas kekuasaan yang sangat tinggi.

Selain itu, hal yang sangat penting saat ini adalah membangun dan mendidik warga negara untuk memiliki integritas, kesetiaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara ditengah upaya masuknya ideologi lain melalui jalur agama. Indonesia harus waspada dalam menghadapi tantangan ini dan membangun strategi yang tepat demi menyelamatkan bangsa dan negara. Saat ini yang harus diwaspadai oleh negara adalah bentuk-bentuk perang yang tidak terlihat tetapi memiliki daya rusak yang sangat dahsyat, diantaranya perang ideologi, perang berbalut ekonomi, membangun ketergantungan masyarakat pada suatu hal termasuk upaya menurunkan daya dan intelektualitas manusia dengan masuk dan dikonsumsi produk tertentu. Negara harus hadir untuk menyelamatkan warga negaranya dan mewaspadaai warga negara yang tidak setia atau menjual kesetiaannya demi keuntungan pribadi. Selain itu Indonesia memerlukan rumusan etika politik yang belakangan terlihat banyak politisi tidak mengindahkan etika politik. Negara tidak boleh lepas kontrol dalam

etika politik. Sebab seorang tokoh, walaupun figur buruk, ia tetap memberikan pengaruh, dalam Bahasa Chanakya menyebarkan racun kepada masyarakat dan masyarakat tertentu akan sangat gampang untuk mengikutinya.¹⁵⁹

Selain itu, Indonesia harus mempertimbangkan teori geometri politik yang merupakan prinsip dasar dalam Arthashastra. Mandala atau lingkaran politik harus dipertimbangkan dalam membangun kekuatan politik negara. Para penentu kebijakan politik harus mampu menganalisis secara hati-hati ring-ring tersebut dan menggunakannya sebagai dasar untuk mengambil langkah politik. Sebagai sebuah prinsip sosial dan universal *taken for granted*, masing-masing menunggu kejutan demi kepentingan tertentu. Negara harus mampu memetakan negara-negara di sekitarnya dalam susunan mandala sesuai dengan arah kepentingan ataupun isu-isu tertentu demi tercapainya tujuan negara yang telah ditetapkan baik itu tujuan jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang.

Jika ditelaah lebih jauh, saat ini Indonesia sesungguhnya telah memainkan konsep mandala dengan konstelasi geopolitik mitra-mitra. Sebuah konstelasi geopolitik dimana Indonesia berupaya merangkul negara-negara yang bertetangga langsung dan juga major power sebagai mitra dalam kerjasama, baik dalam hal pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial-budaya dan lain sebagainya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu¹⁶⁰ menyatakan bahwa Indonesia melalui kemhan, saat ini mengadopsi Diplomasi Pertahanan Empat Poros. Diplomasi pertahanan empat poros ini merujuk pada upaya diplomasi pertahanan Indonesia untuk menjaga keseimbangan hubungan antara Amerika Serikat, Rusia, China dan juga ASEAN. Hubungan kerjasama ini dipandang sebagai hal yang sangat strategis seiring dengan meningkatnya

¹⁵⁹ Wawancara Dr. (Cand) Ni Kadek Surpi, M.Fil. dan Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D.

¹⁶⁰ Kuliah Umum Menteri Pertahanan Republik Indonesia di hadapan Civitas Akademika Universitas Pertahanan, Auditorium Universitas Pertahanan, Sentul, tanggal 19 September 2018.

kesamaan cara pandang di dalam upaya mewujudkan *Mutual National Interest* di tengah kompleksitas dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia-Pasifik saat ini. Melalui diplomasi empat poros ini, Indonesia berharap akan tercipta persatuan dan kerjasama yang kuat antar negara dan antar kawasan sehingga cita-cita mulia bersama, yaitu terwujudnya dunia yang lebih aman, damai dan sejahtera. Cita-cita tersebut merupakan esensi dan titik nol arah kompas yang harus selalu di kalibrasi, disesuaikan dengan keadaan situasi serta kondisi actual dari lingkungan strategis kawasan¹⁶¹.

Demikian pula, teori enam cara mendekati tetangga harus dikaji untuk membangun kekuatan politis tersendiri bagi Indonesia. Indonesia harus membangun sistemnya sendiri, namun dapat menjadikan sejumlah teori kuno sebagai pijakan dan inspirasi dan diterjemahkan ke dalam Bahasa dan konteks kekinian. Indonesia harus ramah, tetapi tidak boleh lengah. Teori maya, misalnya, sangat halus untuk melakukan upaya menaklukkan atau ditaklukkan. *Maya* berarti penipuan, menggelapkan dan prestasi diplomatis. Maya, dalam diplomasi juga menggunakan topeng, kebenaran agama dan kepribadian yang beradab, yang telah terbukti sebagai senjata ampuh dalam sejarah Barat tahun 1940-an, di mana para pemimpin perang harus mencari dukungan dari public yang diturunkan menjadi filsafat kewajiban moral, bukannya serangan yang tak kenal malu.¹⁶²

Dalam konteks Diplomasi, maya juga berarti gerakan halus yang tidak terlihat namun memiliki kekuatan yang dahsyat. Dalam tradisi Hindu, maya dinyatakan sebagai kekuatan jahat yang tak kasat mata tetapi mampu mempengaruhi pola pikir, tindakan bahkan keputusan seseorang. Maya sebagai pengendali yang tidak terlihat. Maya bahkan dinyatakan mampu meruntuhkan karakter. Indonesia harus mewaspadaai teori maya dan sekaligus menggunakan teori ini untuk memenangkan diplomasi. Menurut

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Zimmer, 2011 *Op.cit.* Hlm 117-118

pengamatan, teori maya digunakan secara luas di abad modern ini, di mana guna memenangkan sesuatu menggunakan kekuatan yang tidak tampak sehingga sangat sulit untuk dilawan atau ditangkal. Mayashakti benar-benar sebagai kekuatan yang sangat sulit untuk dihadapi.¹⁶³ Tetapi aktor negara harus mampu merumuskannya dan menggunakan untuk membangun negara dan sekaligus memukul lawan. Kekuatan yang tak tampak ini lebih sulit dihadapi dan sekaligus jika digunakan juga sulit ditangkal oleh pihak lain. Diplomasi yang bermartabat dalam politik bebas aktif Indonesia, harus mewaspadaikan teori maya yang digunakan pihak lain guna memenangkan kepentingannya. Indonesia juga dapat menggunakan teori ini guna memenangkan diplomasi. Dalam sejarah peperangan di dunia, penggunaan teori maya terbukti memenangkan pertempuran yang sulit dengan mudah.

Secara teoretis konsep strategi diplomasi pertahanan Indonesia terlihat lebih komprehensif jika dibandingkan dengan konsep diplomasi pertahanan menurut pandangan Chanakya dalam Arthashastra. Hal ini terlihat dari pelibatan unsur-unsur nir-militer berupa kementerian/ lembaga terkait (non-pertahanan) dalam perumusan maupun eksekusi kebijakan diplomasi pertahanan. Ini merupakan sebuah langkah maju yang signifikan dalam menghadapi proliferasi ancaman pada masa globalisasi saat ini. Namun yang perlu menjadi catatan adalah kerangka *military heavy* yang dimiliki oleh Chanakya dalam Arthashastra ini alangkah baiknya juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun strategi diplomasi pertahanan kedepannya. Penguatan kapasitas dan kapabilitas militer Indonesia (alutsista, SDM, maupun teknologi), harus diberikan porsi yang lebih banyak. Dalam hal ini ketersediaan dana untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas militer selanjutnya menjadi catatan penting dalam APBN Indonesia kedepannya.

¹⁶³ Wawancara Dr. (cand.) Ni Kadek Surpi Ayadharma dan Prof. Dr, I Made Titib,.

Praktik berikutnya yang patut dicontoh oleh Indonesia dari gagasan-gagasan Chanakya adalah kewaspadaan yang tinggi, dan upaya untuk selalu mengedepankan pencapaian tujuan negara. Dengan kata lain, dalam setiap *move*/pergerakan (kebijakan, kesepakatan, keputusan, kerjasama) yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain selayaknya mampu memberikan dampak positif terhadap kemajuan bangsa (baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan). Indonesia harus lebih cekatan dalam mengambil peluang-peluang baik yang dapat memberikan *power leverage* (peningkatan kuasa) terhadap bangsa di kancah internasional. Sejauh ini posisi Indonesia dalam diplomasi pertahanan di regional ASEAN nampaknya sudah mencerminkan upaya tersebut. Indonesia dipandang sebagai *pioneer* dalam berbagi gagasan-gagasan terhadap dengan upaya pertahanan dan keamanan kawasan regional ASEAN. Terbukti dari berbagai gagasan program seperti *Trilateral Patrol* di Laut Sulu, Patroli Terkoordinasi di Selat Malaka, dan yang terbaru adalah gagasan mengenai *Operation on Humanitarian Assistance and Disaster Relief* di wilayah *Dispute Area* Laut Cina Selatan. Gagasan-gagasan di atas merupakan salah satu bentuk yang menunjukkan diplomasi pertahanan Indonesia di wilayah ASEAN itu cukup mumpuni.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Arthashastra merupakan kompendium yang disusun oleh Acharya Chanakya pada akhir abad ke-4 SM. Risalah mengenai politik dan kesejahteraan ini telah meletakkan dasar-dasar nilai yang dapat dipergunakan sebagai sebuah grand strategi hingga masa kini. Sejumlah gagasan dalam Pustaka Arthashastra karya Chanakya dipandang masih relevan dengan aplikasi politik internasional saat ini. Konsep mengenai diplomasi pertahanan dalam Arthashastra diperoleh melalui analisa hermeneutik terhadap beberapa gagasan-gagasan Chanakya, khususnya terkait pemetaan ancaman (*mandala* teori), *statecraft* (*saptanga* teori) dan juga teori diplomasi (teori *Mantrashakti*, *Ṣāḍgunya* dan *catur upaya*). Konsep Diplomasi Pertahanan dalam Pandangan Chanakya berada pada spektrum Paradigma realisme yang bersifat *military heavy*.

Pola Penetapan ancaman dalam Pustaka Arthashastra karya Chanakya menitik-beratkan pada sifat-sifat ancaman yang militeristik, sehingga hanya terkooptasi pada ancaman yang bersifat tradisional semata. Sifat ancaman yang tradisional inipun disikapi dengan cara-cara yang juga tradisional atau militeristik. Keadaan konsep pada Arthashstra karya Chanakya yang terlalu *militeristic oriented* inilah yang kemudian membuat konsep tersebut tidak bisa serta-merta diaplikasikan dalam strategi diplomasi pertahanan masa kini. Karena saat ini ancaman telah terproliferasi sedemikian luas. Ancaman tidak lagi bersifat tradisional/ militeristik semata, namun telah berkembang menjadi ancaman non-tradisional pula. Maka dari itu, ketika ingin mengaplikasikan pemikiran Chanakya yang terdapat dalam konsep-konsep di Pustaka Arthashastra saat ini, diperlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu, terutama terkait dengan strategi menghadapi ancaman non militer/ non tradisional.

Konsep Mandala sesungguhnya dapat dijadikan dasar strategi dalam melakukan diplomasi pertahanan. Konstelasi geopolitik negara dalam teori mandala mengharuskan sebuah negara mengidentifikasi mana negara yang dapat menjadi musuh alami, musuh potensial, sekutu dekat, ataupun sekutu jauh. Negara mana yang dapat memenuhi syarat sebagai *mitra* (rekan kerja/ sekutu), negara mana yang berpotensi untuk berselisih pendapat dalam sebuah isu. Dengan demikian negara dapat melihat secara holistik negara mana yang perlu di-*lobby* lebih keras karena posisinya akan bersebrangan dan negara mana yang sudah bisa dipastikan akan berada dipihaknya.

Konsep Tata Pemerintahan (*Statecraft*) dalam Pustaka Arthashastra karya Chanakya dijabarkan ke dalam seni dalam memaksimalkan kekuatan negara melalui tujuh elemen pembentuk negara (*saptanga*). Ketujuh elemen ini yakni *Swamin* (Pemimpin negara); *Amatya* (anggota dewan/mereka yang mewakili institusi negara); *Janapada* (sumber daya negara, termasuk wilayah dan penduduk); *Durg* (Ibukota yang dibentengi); *Kosa* (Perbendaharaan); *Danda/Bala* (Angkatan bersenjata/ militer); dan *Mitra* (teman dan sekutu negara). Chanakya menggambarkan ketujuh elemen pembentuk negara itu sebagai eksposisi dari teori Mandala (*circle of state*) yang kemudian membentuk dasar dari kebijakan luar negeri di lingkungan yang didominasi oleh ekspansionisme teritori atau penaklukan teritori.

Sebagian besar elemen ini masih relevan hingga saat ini, namun ada satu elemen yang perlu diinterpretasikan kembali seiring dengan perkembangan zaman, dan teknologi. Pada zaman kerajaan, pusat data dan pemerintahan berada di ibukota, sehingga keberadaan benteng di ibukota menjadi sangat krusial sebagai bagian dari pertahanan. Namun konteks zaman sekarang benteng yang diperlukan bukanlah berbentuk fisik lagi, terlebih karena keberadaan data-data negara dengan adanya

teknologi digital, tidak lagi hanya disimpan dalam bentuk fisik (data di atas kertas) saja, namun juga dalam bentuk data digital.

Saptanga teori yang dikemukakan oleh Chanakya ini dapat menjadi sebuah bagian integral yang penting dalam strategi diplomasi pertahanan. Hal ini disebabkan karena elemen dalam *saptanga* dapat terukur secara agregat sebagai sebuah kekuatan negara. Dengan demikian hal ini tentu dapat dijadikan alat teoretis yang baik untuk analisis intelejen. Karena analisis intelejen sangatlah dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang lebih komprehensif. Utamanya mengenai kawan ataupun lawan yang akan diajak bekerjasama dalam kerangka diplomasi pertahanan negara

Konsep Diplomasi dalam Arthashastra karya Chanakya dijabarkan sebagai *Mantrashakti*, kekuatan yang dibangun di atas kecerdasan dan kekuatan narasi manusia termasuk perkataan dan tulisan. Dalam memperoleh mantrashakti ini Chanakya kemudian menetapkan enam kebijakan luar negeri (*Ṣāḍguṇya*) dan empat upaya (*Catur Upaya*) untuk melancarkan diplomasi. *Ṣāḍguṇya* teori ini merupakan enam kebijakan yang diterapkan oleh negara sesuai dengan keadaan lingkungan strategis dari negara tersebut terhadap negara-negara lain dalam lingkup percaturan politik internasional. Keenam kebijakan itu antara lain: *saṃdhi*, *vigraha*, *asana*, *yana*, *samsraya* dan *dvaiddibhava*. Sementara jika terkait dengan aplikasi dan pendekatan dari diplomasi itu sendiri, Chanakya menjabarkannya ke dalam *Catur Upaya*, yaitu: *sama*, *dama*, *bedha*, *danda*.

Konsep Diplomasi menurut Pustaka Arthashastra karya Chanakya dijabarkan dalam konsep *Mantrashakti* sebagai kekuatan ucapan, narasi lisan maupun tulisan untuk mencapai tujuan negara. *Mantrashakti* menurut Pandangan Chanakya dalam Pustaka Arthashastra merupakan bagian integral dan paling penting dari kekuatan yang harus dimiliki negara. Konsep *Mantrashakti* dapat menjadi paradigma dasar dalam diplomasi pertahanan di mana diplomasi diletakkan sebagai salah satu kekuatan terpenting yang harus dimiliki secara mumpuni oleh sebuah negara.

Diplomasi digunakan sebagai *first line* dan *last line of defense* yang di ejawantahkan dalam kebijakan luar negeri terhadap negara-negara yang ada dalam perpolitikan internasional. *Samdhi*, *dvaiddibhava*, *samsraya*, dan *asana* digunakan sebagai *first line* (upaya *preventive*) untuk menggalang kekuatan dan memastikan negara lain tidak menyerang/bersebrangan dengan negara sang *vijigīṣu*. Sementara *Samdhi* dan *samsraya* dapat digunakan sebagai *last defense* ketika perang tidak dapat dielakkan dan kedamaian diupayakan untuk mengurangi efek destruktif dari perang terhadap masyarakatnya. Dalam melaksanakan poin-poin *Ṣāḍgunya* ini, catur upaya dijalankan melalui *sama*, *dama*, *bedha*, dan *danda*.

Sejumlah teori-teori klasik India, termasuk Chanakya Arthashastra relevan untuk dijadikan pijakan dan teori dasar dalam membangun pertahanan negara dan Diplomasi Pertahanan Indonesia. Konsep *mantrashakti*, *mayashakti* maupun teori politik *mandala* harus dipertimbangkan sebagai pijakan yang baik dalam membangun maupun memperkuat Pertahanan Negara Indonesia.

Konsep politik luar negeri bebas aktif, sejalan dengan konsep Veda yang berupa filsafat kewajiban moral untuk membangun masyarakat dunia, menjaga *bhumi* sebagai pertiwi yang suci bagi manusia. Dalam diplomasi Pertahanan, penggunaan konsep *mantrashakti* dan *mayashakti* semestinya menjadi penentu kemenangan Diplomasi Pertahanan Indonesia, walau untuk membangunnya tidak mudah dan memerlukan waktu.

5.2 Rekomendasi

1. Kepada Penstudi dan pemerhati Ilmu Pertahanan dan Hubungan Internasional, peneliti merekomendasikan agar dilakukan penelitian lebih lanjut tentang risalah Arthashastra guna memperkaya khasanah Ilmu pertahanan non-western. Terkait dengan pola penetapan ancaman selayaknya Pemerintah dapat menerapkan nilai-nilai yang terdapat

pada pandangan Chanakya dalam Arthashastra berupa kewaspadaan dan juga upaya untuk memperkuat kekuatan militer negara, seperti dengan meningkatkan rasio *military expenditure* dalam APBN.

2. Bagi para penstudi Diplomasi Pertahanan, pengkajian konsep Diplomasi Pertahanan dalam pandangan Chanakya pada Pustaka Arthashastra memberikan horizon baru *non-western oriented*, di mana selama ini, pendekatan yang digunakan banyak didominasi dalam kerangka *western oriented*. Penelitian ini dapat dijadikan pijakan awal guna melakukan penelitian lebih lanjut untuk benar-benar dapat diterapkan menjadi kajian keilmuan dalam Diplomasi Pertahanan. Terkait dengan konsep *statecraft* atau tata pemerintahan, Pemerintah Indonesia selayaknya dapat menjadikan nilai-nilai dalam konsep saptanga berupa upaya penguatan tujuh elemen negara (pemimpin negara; pemerintah/parlemen; wilayah dan populasi; infrastruktur dan teknologi; perekonomian dan perbendaharaan; militer dan angkatan bersenjata; dan teman/ aliansi/ mitra kerjasama) guna mencapai kekuatan nasional yang komprehensif.
3. Bagi para Diplomat dan anggota parlemen yang bertugas dalam ranah hubungan luar negeri, pertahanan dan Diplomasi, penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan guna memperkaya berbagai strategi, metode maupun pengetahuan dalam pertahanan negara dan hubungan luar negeri. Pengetahuan ini menjadi sangat penting dalam membangun kekuatan wacana dan diplomasi (*mantrashakti*) dan kekuatan intelektual (*intellectual investment*), keluasan wawasan di mata internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agrawal, Ashvini. 1989. *Rise and Fall of the Imperial Guptas*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.
- Astana, Made dan Anomdiputro, C.S. 2015. *Kautilya (Cāṇakya) Arthaśāstra: Masalah Politik, Ekonomi, Hukum, Budaya dsbg., Buku Pegangan Para Pemimpin Negara*. Surabaya: Paramita
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya. Insan Cendekia.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budi dan Syahmin A.K. 1986. *Suksesi Negara dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional*. Bandung: Remaja Karya.
- Bungin, M. Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. (edisi kedua)*. Jakarta: Kencana.
- Butterfield, Herbert. 1967 *The Statecraft of Machiavelli*. New York: Collier Books.
- Chandrasekaran, Pravin. 2006. *Kautilya: Politics, Ethics and Statecraft*. Harvard Kennedy School. Munich Personal RePEc Archive
- Chaturvedi, B.K. 2012. *Chanakya Neeti: Chanakya Aphorism on Morality*. New Delhi: Diamond Books.
- Cottey, Andrew dan Anthony Foster. 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Adelphi Paper No. 365. London: IISS.
- Cresswell. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. (ed. Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Das, P.K. dan M.K. Singh. 2012. *Chanakya unparalleled Diplomat*. New Delhi: Mahaveer Publishers.
- G. Adityakiran, 'Kautilya's Pioneering Exposition of Comprehensive National Power in the Arthashastra', in P. K. Gautam, Saurabh Mishra and Arvind Gupta (eds), *Indigenous Historical Knowledge*:

- Kautilya and His Vocabulary*, Vol I. New Delhi: IDSA, Pentagon Press, 2015
- Haryanto, Agus dan Isman Pasha. 2016. *Diplomasi Indonesia: Realistas dan Prospek*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Jackson, Robert dan George Sorensen. 1999. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma. Yogyakarta
- _____. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kangle, R.P. 1986. *The Kautilya Arthashastra, Part 3*. Motilal Banarsidass Publication.
- _____. 2010. *Kautilya Arthashastra (Part II)*. New Delhi: Motilal Banarsidass, Note 1,(7.18.43)
- Kanwal, Gurmeet. 2016. *The New Arthashastra: A Security Strategy for India*. New Delhi: Harper Collins Publishers.
- Kautilya. 2003. *Arthashastra*, Surabaya: Paramita.
- Koentjaraningrat. 2008. *Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia. Jakarta
- Krippendorff, Klaus. 2004. *Content Analysis: An Introduction to its methodology*, Second Edition. California: Sage Publication.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Liebig, Michael. 2017. "Statecraft and Intelligence Analysis in the Kautilya-Arthashastra" dalam *Indigenous Historical Knowledge: Kautilya and His Vocabulary vol. 3*. New Delhi : Institute for Defence Studies and Analysis (IDSA).
- Locke, L.E. Spirduso, W.W. & Silverman, S.J. 2007. *Proposals That Work: A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals (5th ed.)* Thousand Oaks, CA: Sage.
- Max Weber, 1978. "Politics as a Vocation," dalam Weber: *Selections in Translation*, ed W.G. Runciman, trans. Eric Matthews (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 212–225.

- Moertono, Soemarsaid. 2018. *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mookerji, Radha Kumud. 1999. *Chandragupta Maurya and His Times*. New Delhi: Motilal Banarsidass
- _____. 2007. *The Gupta Empire*. New Delhi: Motilal Banarsidass
- Morgenthau, Hans J. 1978. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A. Knopf. New York
- Nasution. 2003. *Metode Research*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Perwita, B., dan Yani, Y.M. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Poespoprodjo. 2004. *Hermeneutika*. Bandung: Pustaka Setia
- Ramesh, Tantrik Yogi. 1997. *Ethics of Chanakya: Chanakya Neeti*. Delhi: Sahni Publication
- Rangarajan, L.N.. 1992. *The Arthashastra: Edited, Rearranged, Translated and Introduced*. New Delhi, India: Penguin Books India Ltd.
- Ricoeur, Paul. 2012. *Teori Interpretasi: Memahami Teks, Penafsiran dan Metodologinya*. IRCiSoD, Yogyakarta
- Setiadi. 2007. *Konsep dan Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta : Graha
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama
- Singh, Harjeet. 2012. *The Military Strategy of The Arthashastra*. New Delhi: Petagon Press
- Sobur, Alex 2006. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukra. 2012. *Sukraniti*, Mumbai: Khemraj Shrikrisnadass.
- Sumaryono, E. 2018. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius
- Suryokusumo, Suryanto, dkk. 2016. *Konsep Sistem Pertahanan Non Militer: suatu sistem Pertahanan Komplemen Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Tim Penyusun. 2017. *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Universitas Pertahanan*. Bogor: Universitas Pertahanan Press.
- Titib, I Made. 1996. *Veda Sabda Suci: Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita.
- Trautmann, Thomas R. 2012. *Arthashastra: The Science of Wealth*. India: Penguin Books.
- Usman, Husaini dan Purnomo. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Zimmer, Heinrich. 2011. *Sejarah Filsafat India*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Acharya, Amitav. 2011. "Dialogue and Discovery: In Search of International Relations Theories". *Millenium Journal of International Studies* vol. 39. (3). Sage Publication
- Andika, Muhammad Tri dan Allya Nur Aisayah. 2017. Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan EKonomi dan Kedaulatan?. *Indonesian Perspective*. Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2017) hal 161-179
- Behera, Navnita Chadha. 2011. 'Re-imagining IR in India', *International Relations of the Asia-Pacific*, 7(3), 2007, pp. 341–368.
- Boesche, Roger. 2002. "Moderate Machiavelli? Contrasting The Prince With The Arthashastra of Kautilya", *Critical Horizon*, vol.3 (2). Leiden.
- _____. 2003. Kautilya's Arthasastra on War and Diplomacy in Ancient India. *The Journal of Military History*, Vol. 67 No.1 January 2003. Hal. 9-37

- Chakraborti, Tridib. 2016. Contemporary Relevance of Kautilya's Mandala Theory and Diplomacy. *Politico* Vol 3. No.2 2016.
- Dutta, Anusmita dan Manish S Dabhade. 2017. "Diplomatic Theory of Kautilya and Sun Tzu: Assessing Interpretations." *Journal of International Studies*. Vol. 51 (1-4). Sage Publication.
- Gautam, PK. 2013. Relevance of Kautilya's Arthashastra. *Journal of Strategic Analysis*, 37:1, Taylor and Francis. Page 21-28.
- Karad, Satish. 2015. Perspective of Kautilya's Foreign Policy: An Ideal of State Affairs. *Modern Research Studies*. Vol. 2. No.2/ June 2015.
- Liebig, Michael. 2013. Kautilya's Relevance for India Today. *India Quarterly* vol.69 No.2
- Mishra, Malay. 2016. "Kautilya's Arthashastra: Restoring its Rightful Place in the Field of International Relations", *Journal of Defence Studies*, Vol. 10. (2)
- Mishra, Malay. 2017. "Unique Approach to Comprehensive National Power through the Lens of Kautilya's Arthashastra." *Journal of the United Service Institution of India*, Vol. CXLVII No. 607, January-March 2017
- Saeri, M. 2012. "Teori Hubungan Internasional: Sebuah Pendekatan Paradigmatik". *Jurnal Transnasional* Volume 3, Nomor 2. Februari 2012.
- Set, Shounak. 2015. "Ancient wisdom for the Modern World: Revisiting Kautilya and His Arthashastra in the Third Millennium". *Journal of Strategic Analysis* Vol. 39. No.6, p.710-714. Routledge.

Website:

- Cox, Joseph (2017-05-12). "A Massive Ransomware 'Explosion' Is Hitting Targets All Over the World". *Motherboard* diakses dari https://motherboard.vice.com/en_us/article/a-massive-ransomware-explosion-is-hitting-targets-all-over-the-world. pada 20 November 2018, 13:41
- Larson, Selena (2017-05-12). "Massive ransomware attack hits 99 countries". *CNN*. diakses dari <http://money.cnn.com/2017/05/12/technology/ransomware-attack-nsa-microsoft/> pada 20 November 13:52
- Lenczowski, John. 2017. *What is Statecraft*. The Institution of World Politics. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=GdN4Sh1RjKU>

Shamasastri, R. 2013. Kautilya's Arthashastra. p 447-8 diakses dari https://archive.org/details/Arthashastra_English_Translation/page/n1

Steven, Yohanes. 2011. Telaah Doktrin Natalegawa, "Dynamic Equilibrium" Terhadap Kepentingan Ekonomi Indonesia: Studi Kasus Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011. Diakses dari: <https://stevenyohanes.wordpress.com/2013/12/19/telaah-doktrin-natalegawa-dynamic-equilibrium-terhadap-kepentingan-ekonomi-indonesia-studi-kasus-keketuaan-indonesia-di-asean-tahun-2011/#comments> pada 16 Desember 2018

<https://www.quora.com/What-is-the-Mandal-theory-of-Kautilya>

<https://www.pursuitias.org/single-post/2018/03/01/Mauryan-empire-Part-II>

<http://usiiofindia.org/Article/?pub=Journal&pubno=607&ano=2933>

<http://www.defencestudies.co/2017/11/kautilyas-saptang-theory-of-state.html>

Sumber Lain

Coates, Breena dan Col. Jeffrey Caton. 2010. *The Ultimate Pragmatist: Kautilya's Philosophy on SMART Power in National Security*. International Society for Military Ethics (ISME) program, University of San Diego.

Hartono, Budi. 2016. *Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Arms Trade Treadty (ATT) di Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Bogor: Tesis Prodi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

James, Toby S. 2016. *Neo-Statecraft Theory, Historical Institutionalism and Institutional Change*. University of East Anglia. Diakses dari https://ueaeprints.uea.ac.uk/54729/1/James_GOV_for_web.pdf

Kaur, Mohinder. 2011: *Political and Administrative Ideas of Manu and Kautilya: A Comparative Study*. Dissertation. Patiala: Department of Political Science, Punjabi University

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kuliah umum yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri RI 2015-2019, Retno L.P Marsudi. "*Diplomasi Pertahanan: Dua Sisi Mata Uang*" yang disampaikan di Auditorium Universitas Pertahanan, Rabu, 25 Oktober 2017.

- Kuliah Umum yang diberikan oleh Menteri Pertahanan RI 2015-2019, Ryamizard Ryacudu. “*Kalibrasi Ulang Konsep Strategi Pertahanan RI Menghadapi Disrupsi Dinamika Perkembangan Lingkungan Strategis*” yang disampaikan di Auditorium Universitas Pertahanan, Rabu 19 September 2018
- Kumar, Abhishek. 2015. *The Arthashastra: Assessing the Contemporary Relevance of an Ancient Indian Treatise on Statescraft*. Tesis. Faculty of U.S Army Command and General Staff College
- Ministry of Defence. 2014. *Defence Diplomacy*, United Kingdom Ministry of Defence Policy Paper No.1.
- Nurjana, Agung. 2016. Model Diplomasi Pertahanan Indonesia. Tesis Universitas Pertahanan Indonesia.
- Rajagopalan, Pillai Rajeswari. 2008. *Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*. Diakses dari https://www.academia.edu/17696780/Military_Diplomacy_The_Need_for_India_to_Effectively_Use_In_Its_Conduct_of_Diplomacy
- Salim. 2012. *Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Maritim Seskoal
- Suharono. 2012. *Strategi manajemen dan kepemimpinan Soeharto pada masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia: Studi eksploratori formatif dan kepustakaan*. Disertasi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
- Vittal, Vinay. 2011. *Kautilya’s Arthashastra: A Timeless Grand Strategy*. Alabama: Thesis of School of Advanced Air and Space Studies Maxwell Airforce Base. Hal. 11
- Wolfgang, Koerner. 2006 “Security Sector Reform: Defence Diplomacy” (Parliamentary Information and Research Service: Library of Parliament), Diakses dari [https://lop.parl.ca/Content/LOP/Research Publications/prb0612-e.pdf](https://lop.parl.ca/Content/LOP/Research_Publications/prb0612-e.pdf)
- Yasuhiro, Matsuda. (2006). *An Essay on China’s Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*. Japan. NIDS Security Reports No. 7. December 2006. Hal 1-40

LAMPIRAN

Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/2260 / IX / 2018

Bogor, 04 September 2018

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan izin penelitian dan
permintaan data

Kepada

Yth. Pejabat Dalam Lampiran

di

Tempat

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
- b. Kalendar Akademik Program Studi Diploması Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2017/2018.

2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:

- a. Sebagai persyaratan kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
- b. Mahasiswa Program Studi Diploması Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan atas nama Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari NIM: 120170103020, bermaksud menyusun tesis dengan judul: Analisis Diploması Pertahanan Negara Dalam Pandangan Chanakya (Studi Teks Arthashastra Sebagai Dasar Strategi Diploması Pertahanan)

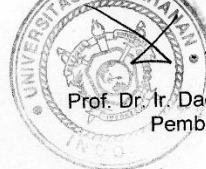
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon mahasiswa dimaksud diizinkan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara.

4. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari NIM: 120170103020, nomor HP. +6285935101166, e-mail : nikki.ayu@idu.ac.id dan ayunikkia@gmail.com.

5. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan

Wakil Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M. Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

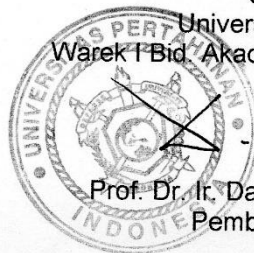
1. Menu RI
2. Rektor Unhan
3. Dirjen Strahan
4. Dekan FSP Unhan
5. Karo Aka. dan Kemahasiswaan Unhan
6. Ses Prodi Diploması Pertahanan FSP Unhan.

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : B/ 22 60 /IX/2018
Tanggal : 04 September 2018

DAFTAR NAMA PEJABAT:

1. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI
2. Direktur Jenderal Informasi Dan Kebijakan Publik, Kementerian Luar Negeri RI
3. Direktur Kerjasama Internasional, Direktorat Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI
4. Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Gunawan
Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M. Eng
Pembina Utama IV/e

Panduan Wawancara Para Ahli Arthashastra
Analisis Diplomasi Pertahanan Negara dalam Pandangan Chanakya
(Studi Teks Arthashastra Sebagai Dasar Strategi Diplomasi
Pertahanan)

Narasumber :

Tanggal/Waktu:

Tempat :

Pewawancara memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Pewawancara memohon izin untuk merekam percakapan, jika tidak berkeberatan, hasilnya hanya ditujukan untuk kegiatan penelitian. Pewawancara membuka sesi wawancara dengan menyampaikan isu terkait Diplomasi Pertahanan Negara terkini dan brief Singkat mengenai Arthashastra, dilanjutkan dengan pertanyaan berikut

Bagian I. Konsep Pemetaan Ancaman dalam Arthashastra

No	Pertanyaan Kunci	Jawaban
1	Bagaimana Konsep Pemetaan Ancaman dalam arthashastra?	
2	Bagaimana Penjabaran teori Mandala dalam memetakan ancaman terhadap negara?	
3	Bagaimana posisi sebuah negara dalam konstelasi Mandala sebagai upaya menangkai ancaman terhadap negara?	
4	Seberapa penting konsep pemetaan ancaman dalam perumusan strategi pertahanan negara menurut Arthashastra, khususnya mengenai diplomasi pertahanan negara?	
5	Apakah Teori Mandala masih dapat diaplikasikan pada masa sekarang?	
6	Nilai-nilai apa saja dalam teori Mandala yang dapat menjadi dasar terkait dengan pemetaan ancaman dalam perumusan strategi diplomasi pertahanan?	

Bagian II. Konsep Statecraft dalam Arthashastra

No	Pertanyaan Kunci	Jawaban
1	Bagaimana konsep tata pemerintahan/ statecraft dalam arthashastra?	
2	Bagaimana Penjabaran teori saptanga mengenai tata pemerintahan / statecraft dalam arthashastra?	
3	Bagaimana posisi teori saptanga terhadap kekuatan nasional sebuah negara?	

4	Seberapa penting teori saptanga dalam perumusan strategi pertahanan negara menurut Arthashastra, khususnya mengenai diplomasi pertahanan negara?	
5	Apakah teori saptanga masih relevan dengan keadaan masa sekarang?	
6	Nilai-nilai apa saja dalam teori saptanga yang dapat menjadi dasar terkait dengan statecraft dalam perumusan strategi diplomasi pertahanan	

Bagian III. Konsep Diplomasi dalam Arthashastra

No	Pertanyaan Kunci	Jawaban
1	Bagaimana konsep diplomasi dalam arthashastra?	
2	Bagaimana konsep Mantrashakti dalam arthashastra?	
3	Bagaimana teori sadguna dalam arthashastra?	
4	Bagaimana konsep catur upaya dalam Arthashastra?	
5	Bagaimana relevansi teori sadguna, konsep mantrashakti dan catur upaya dihadapkan dengan konsep diplomasi masa kini?	
6	Bagaimana posisi militer dalam diplomasi sebuah negara menurut arthashastra?	
7	Bagaimana konsep diplomasi pertahanan dalam arthashastra?	
8	Apakah konsep diplomasi pertahanan berdasarkan pandangan Chanakya dalam Arthasashtra masih relevan dengan tantangan jaman kekinian?	

Panduan Wawancara Dirjenstrahan Kemhan
Analisis Diplomasi Pertahanan Negara dalam Pandangan Chanakya
(Studi Teks Arthashastra Sebagai Dasar Strategi Diplomasi
Pertahanan)

Narasumber :

Tanggal/Waktu:

Tempat :

Pewawancara memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Pewawancara memohon izin untuk merekam percakapan, jika tidak berkeberatan, hasilnya hanya ditujukan untuk kegiatan penelitian. Pewawancara membuka sesi wawancara dengan menyampaikan isu terkait Diplomasi Pertahanan Negara terkini dan brief Singkat mengenai Arthashastra, dilanjutkan dengan pertanyaan berikut:

No	Pertanyaan Kunci	Jawaban
1	Bagaimana konsep diplomasi pertahanan indonesia?	
2	Bagaimana aplikasi diplomasi pertahanan indonesia?	
3	Bagaimana konsep pemetaan ancaman menurut Indonesia berdampak pada diplomasi pertahanan Indonesia?	
4	Hal apa saja yang menjadi dasar dalam membuat strategi diplomasi pertahanan di Indonesia	
5	Bagaimana peranan kemhan (dirjen Strahan kemhan) dalam perumusan strategi diplomasi pertahanan indonesia?	
6	Dalam penyusunan strategi diplomasi pertahanan Indonesia hal-hal apa saja yang dijadikan bahan pertimbangan oleh dirjen Strahan kemhan?	
7	Bagaimana peranan kemhan (dirjen Strahan kemhan) dalam aplikasi diplomasi pertahanan Indonesia?	

Panduan Wawancara Direktorat KIPS Kemlu
Analisis Diplomasi Pertahanan Negara dalam Pandangan Chanakya
(Studi Teks Arthashastra Sebagai Dasar Strategi Diplomasi
Pertahanan)

Narasumber :

Tanggal/Waktu:

Tempat :

Pewawancara memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Pewawancara memohon izin untuk merekam percakapan, jika tidak berkeberatan, hasilnya hanya ditujukan untuk kegiatan penelitian. Pewawancara membuka sesi wawancara dengan menyampaikan isu terkait Diplomasi Pertahanan Negara terkini dan brief Singkat mengenai Arthashastra, dilanjutkan dengan pertanyaan berikut:

No	Pertanyaan Kunci	Jawaban
1	Bagaimana konsep diplomasi pertahanan indonesia?	
2	Hal apa saja yang menjadi dasar dalam membuat strategi diplomasi pertahanan di Indonesia?	
3	Bagaimana aplikasi diplomasi pertahanan indonesia?	
4	Bagaimana konsep pemetaan ancaman menurut Indonesia berdampak pada diplomasi pertahanan Indonesia?	
5	Bagaimana peranan kemlu RI dalam aplikasi diplomasi pertahanan Indonesia?	

Transkrip Jawaban I Ketut Donder, Ph.D Secretary General of World Hindu Parisad, Dosen Pascasarjana IHDN Denpasar

Gedung Pascasarjana IHDN Denpasar, 5 Desember 2018, 13.34

Pertanyaan:

Bisakah Bapak jelaskan bagaimana konsep pemetaan ancaman yang dibahas dalam arthashastra, Pak?

Jawaban:

Baik, jadi begini, dalam Arthashastra itu ancaman di jabarkan pada bab kedelapan. Terminologi yang digunakan adalah *vyasana*. Nah itu artinya ancaman, bencana, malapetaka. Jenisnya ada banyak. Tapi dikategorikan menjadi dua. Ancaman domestic, itu sumber nya dari dalam negara. Kalau yang eksternal dari luar negara. *Vyasana* bagi Chanakya ini juga artinya semua hal yang memperlemah elemen-elemen pembentuk negare atau saptanga itu. Ancaman domestik itu macam macam. Jabarkan oleh Chanakya seperti pejabat yang korup, pemberontakan, penghianatan yang dilakukan oleh bangsawan/ pejabat negara, pemberontakan oleh kelompok-kelompok masyarakat terhadap raja, kelaparan, kekeringan, banjir, dan macam-macam lagi disebutkan di buku kedelapan itu. sementara kalau ancaman yang dari luar itu baru melibatkan negara lain, mialnya kalau negara tetangga itu mau menyerang negaranya Chanakya, kerajaan maurya, mau menginvasi, membuat operasi intelejen di kerajaan maurya, nah itu yang berusaha ditangkal, dihalau oleh *Acharya* Chanakya.

Pertanyaan:

Lantas bagaimana kedudukan teori Mandala atau *circle of state* dalam pemetaan ancaman di kerajaan maurya?

Jawaban:

Teori mandala itu didasarkan pada konstelasi wilayah. Seperti yang adik baca di Arthashastra itu. Teori mandala dijelaskan sama Chanakya bahwa negaranya adalah negara yang memiliki komitmen untuk menaklukkan, bukan ditaklukkan. Sementara negara yang berbatasan langsung atau

kerajaan tetangga mu itu adalah musuh alaminya. Lalu negara disebarnya si musuh ini bisa dijadikan kawan. Inti konsep nya musuh alami itu negara atau kerajaan yang akan nyerang Kerajaan Maurya. Terus negara yang bersekutu sama negara itu juga jadi musuh Kerajaan Maurya. Sementara negara yang tidak sepaham sama negara itu, harus diajak sebagai sekutu, dan negara lain yang sepaham sama negara sekutu kita ini juga di jadikan sekutu. Terus begitu dia... sampai konstelasi mandalanya terbentuk. Bahasa mudahnya itu, musuh dari musuh mu adalah kawan mu. Kawan dari musuhmu adalah musuh mu.

Pertanyaan:

Lantas, Pak, apakah semua negara yang bertetangga itu otomatis menjadi musuh bagi Chanakya? Bagaimana sesungguhnya posisi sebuah negara dalam konstelasi mandala, sebagai upaya menangkal ancaman terhadap negara?

Jawaban:

Tidak mesti tetangga itu musuh ya.. Tidak mesti.. Karena coba kita lihat penjelasan Chanakya yang berikutnya di buku ketujuh, bab 18 sutra ke 29. Itu Chanakya jelas mengatakan bahwa memang biasanya... Biasanya para negara tetangga itu dianggap bermusuhan. Tapi ada kemungkinan mereka itu bersikap ramah, ada juga yang tunduk. Tapi ya ngga sedikit juga yang ngga ramah ato menunjukkan sikap bermusuhan. Nah posisinya tentu beda ini. Kalau dia ramah kan tidak dianggap sebagai musuh, maka konstelasi mandalanya berubah. Jadi Chanakya itu tidak setuju kalau penerapan ajarannya itu kaku. Dia mengatakan kalau dalam hubungan antar kerajaan atau kalo sekarang hubungan internasional negara berinteraksi itu kan untuk mendapatkan kepentingannya. Mencapai national interestnya toh.. Jadi mandala pun akan berubah-ubah mengikuti keadaan lingkungan dan kebijakan antar negara. Sehingga posisi negara itu tidak permanen dalam satu mandala saja. Bisa jadi akan terbentuk mandala berlapis yang bersinggungan antara satu isu dengan isu lainnya antara satu negara. Mandala bisa tumpang-tindih, kalau diperlukan untuk mencapai kepentingan nasional.

Pertanyaan:

Oh gitu Pak. Terus seberapa penting sih konsep pemetaan ancaman dalam perumusan strategi pertahanan negara menurut Arthashastra, khususnya mengenai diplomasi pertahanan negara?

Jawaban:

Ya tentu konsep untuk memetakan ancaman itu penting ya. Kalau nggak dipetakan dengan baik, maka antisipasi terhadap ancamannya tidak akan bisa maksimal itu. Makanya penilaian soal ancaman itu kan jadi dasar... Teori mandala itu dasar untuk memilih kebijakan mana yang akan diambil oleh Kerajaan Maurya, yang di jabarkan dalam shadgunya itu. Kan ada enam, penilaian konstelasi negara dalam teori mandala ini yang jadi dasar keputusannya. Mau pake *dvaiddibhav* atau maju perang, mau pilih netral ato bikin perjanjian damai. Itu tergantung semua sama posisi negaranya di mandala itu seperti apa. Bisa diajak kerjasama ga, kerjasamanya model seperti apa, nah itu dari penilaian dasar ini. begitu juga kalau dalam strategi diplomasi pertahanan. Saya rasa hal ini akan jadi penting juga ya. Karena kalau diplomasi pertahanan tu pasti butuh tau dulu kan, negara mana yang dihadapi, negara mana yang mau diajak kerjasama, betul kan? .. nah penetapan posisi ini kan bagian dari teori Mandala. Kalau negara tetangganya nggak ramah, suka ngajak ribut, selisih paham terus, ngancam mau nyerang terus, kan negara harus waspada. Lalu cek. Kira-kira negara mana nih, yang bisa diajak kerjasama untuk menghentikan si negara tetangga ini biar nggak ribut terus. Begitu.

Pertanyaan:

Nah, kalau begitu, menurut Bapak apakah Teori Mandala masih dapat diaplikasikan pada masa sekarang?

Jawaban:

Kalau bicara soal relevansi tentu saja masih bisa. Tapi bukan berarti 100 persen bisa sama persis seperti jaman kerajaan Maurya. Mungkin aplikasinya nggak semua bisa di pakai, misalkan saja semua tetangga yang menunjukkan sikap bermusuhan adalah musuh negara, boleh di serang, serang dia sebelum dia serang kita. Kan tidak bisa begitu lagi, sekarang. Ya sekarang ini kita lihat nggak usah jauh jauh.. lihat ASEAN saja. Atau lebih spesifik lah, hubungan Indonesia sama Malaysia gitu misalnya. Bertetangga secara langsung kan? sering berselisih kan? Ya selisih paham

soal klaim klaim budaya, teritori, masalah perbatasan, tapi apa kemudian Indonesia bilang secara resmi Malaysia itu Musuhnya Indonesia? kan tidak. Apakah Indonesia jadi ngga mau bekerjasama sama Malaysia? Kan tidak juga. Ribut-ribut sedikit, naik tensi sedikit, tapi kan ngga memproklamirkan secara resmi “Malaysia Musuhnya Indonesia, Indonesia boleh menyerang Malaysia” kan tidak begitu. Malah yang terjadi kan rujuk lagi, kerjasama lagi.

Pertanyaan:

Siap, betul Pak. Lalu Menurut Bapak nilai-nilai apa saja dalam teori Mandala yang dapat menjadi dasar terkait dengan pemetaan ancaman dalam perumusan strategi diplomasi pertahanan?

Jawaban:

Kewaspadaan ya, saya rasa itu nilai kunci dasar dalam teori mandala kalau dikaitkan sama pemetaan ancaman ya. Negara itu harus waspada. Kenapa kemudian negara tetangga yang di jadikan katakanlah “musuh alami”, ya karena kewaspadaan itu, bahkan dengan yang paling dekat sekalipun kita harus waspada. Jangan hanya lihat musuh yang jauh jauh saja, musuh dekat tidak dikenali. Sudah di depan mata, didepan pintu, karena tidak waspada, kita digebuk duluan. Kan bahaya itu. Tetangga itu kan paling dekat, gampang buat dia serang kita. Makanya kita yang harus waspada. Terus, yang perlu di contoh adalah komitmen negara terhadap keamanan dan pertahanan negara. Chanakya ini serius soal pertahanan negara. Kenapa demikian? Karena di jaman itu kerajaan maurya menjadi kerajaan dengan porsi *military expenditure* yang paling tinggi di kawasannya. Dia gaji itu militer baik, dia beli peralatan terbaru, dan terancang di masa itu. Dia kasi pelatihan angkatan bersenjata, dia latih intelejennya. Itu penting sekali ditiru.

Pertanyaan:

Siap, Bapak. Lalu, menurut Bapak bagaimanakah konsep tata pemerintahan atau statecraft dalam arthasahstra? bisa tolong dijelaskan, Pak?

Jawaban:

Statecraft ya, itu, konsep dasarnya ada pada teori saptanga. Seni memerintah, apa saja bagian penting sebuah negara itu dijabarkan dalam

saptanga. Acharya Chanakya dalam teori saptanga, memandang bahwa negara itu terdiri dari tujuh elemen atau praktis berbeda. Tujuh ini saling melengkapi. Pemerintahan dianggap baik kalau tujuh elemennya ini kuat. Kalau salah satunya lemah akan mudah diserang itu. Jadi tujuh elemen itu apa saja, nah tujuh itu ada *swami* atau pemimpin. Itu yang pertama ya. Kedua itu menteri-menteri atau legislatifnya negara, pejabat-pejabatnya terminologinya *amatya*. Lalu yang ketiga itu *Janapada*, rakyat negaranya, populasinya, sumberdaya alamnya. Terus yang keempat ada *durga* ya, ibukota yang dibentengi, yang kelima ada *kosha*, perbendaharaan negara atau bisa juga perekonomian negara. Keenam itu *danda*, angkatan bersenjata atau militer kerajaan, dan yang terakhir itu *mitra*, artinya sekutu atau teman. Nah elemen-elemen ini harus kuat. Tujuannya supaya negara memiliki akumulasi kekuatan dan kekuasaan yang besar.

Pertanyaan:

Baik, Pak. Lantas bagaimana posisi teori *saptanga* terhadap kekuatan nasional sebuah negara?

Jawaban:

Begitu, tadi kan saya jelaskan bahwa ketujuh elemen dalam saptanga ini diperlukan untuk menghasilkan negara yang kuat. Kalau posisinya dengan kekuatan nasional ya, tujuh elemen ini juga pada akhirnya menjadi bagian-bagian dasar untuk menghasilkan kekuatan nasional itu ya. Kalau dalam Arthashastra kekuatan nasional itu ada tiga, disebut *trishakti*. Nah itu ada *Prabhavashakti*, *Utsaha Shakti* dan juga *Mantrashakti*. Keenam elemen dari saptanga itu, *amatya* nya, *janapada*, *durga*, *kosha*, *danda* dan *mitra* itu, dasarnya untuk membentuk *prabhava Shakti* ini. Kalau *prabhava shakti*nya bagus ya, negara lain jadi segan. Negara punya *prabhava*, kewibawaan, charisma, kuasa. Gitu. Sementara elemen *swami* ini mejadi bagian dari *utsaha Shakti*. Seberapa cakap rajanya, gimana dia mengelola negara supaya enam elemen lainnya ini kuat dan saling menguatkan, itu disebut dengan *utsaha Shakti*.

Pertanyaan:

Oh, begitu. Baik, lantas Pak Seberapa pentingkah teori saptanga dalam perumusan strategi pertahanan negara menurut Arthashastra, khususnya mengenai diplomasi pertahanan negara?

Jawaban:

Kalau menurut saya ini penting ya. Saptanga atau tujuh elemen ini kan yang .. Merupakan sebuah seni memerintah ya, bagaimana pemimpin negara mengatur negara, menjalankan negara, menghasilkan kekuatan nasional. Saya rasa karena ini dasar untuk membentuk kekuatan nasional, tentu ini .. *Saptanga* ini menjadi penting ya. Kalau soal strategi diplomasi pertahanan saya rasa ini juga jadi bagian dari bahan penilaian atau pertimbangan ya. Kemampuan untuk menilai saptanga dari negara lain, layak kah negara itu diajak bekerjasama, kalau iya, dibagian apa dia kuat, bisa diajak kerjasama di bidang apa, gitu.. Berlaku juga bagi negara sendiri. Penilaian saptanga ini menjadi dasar kan, mana elemen yang perlu lebih dikuatkan, kalau militer, perlu dikuatkan, di bagian apanya, negara mana yang kira-kira bisa membantu memenuhi tujuan itu. Jadi penilaiannya disitu. Saya rasa sih begitu.

Pertanyaan

Siap, Bapak. Lalu menurut Bapak Apakah teori saptanga masih relevan dengan keadaan masa sekarang?

Jawaban.

Saya rasa sebagian besar itu masih digunakan ya sampai sekarang. Dalam pemerintahan, seni memerintah, kecakapan pemimpin negara, bahkan sampai harus memiliki kualitas Astabrata kepemimpinan itu ya. Terus ada aparatur/ pejabat tinggi negara, rakyat dan sumber daya alam, perekonomian, militer, sekutu atau kawan, itu masih digunakan itu konsep nya sampai sekarang. Mungkin yang perlu di kritisi itu yang *durga* ya, ibukota yang di bentengi. Saya rasa sekarang sudah nggak begitu lagi. Sudah nggak ada itu ibukota pakai benteng jaman sekarang ya. Sisanya saya rasa masih relevan. Cuma itu ya, yang tidak relevan lagi ya itu, *durga* itu.

Pertanyaan:

Baik, lalu Pak, menurut Bapak nilai-nilai apa saja dalam teori saptanga yang dapat menjadi dasar terkait dengan statecraft dalam perumusan strategi diplomasi pertahanan?

Jawaban:

kalau nilai-nilai itu ya misalnya nilai kepemimpinan, bagaimana pemimpin itu punya kualitas astabrata, lalu bagaimana pejabat negara punya akuntabilitas. Bisa dipercaya, ngga korupsi. Lalu *janapada*, bagaimana masyarakatnya taat aturan, bermartabat, makmur bahagia, sejahtera, sumberdaya alam nya dijaga, tidak dieksploitasi besar-besaran, perekonomiannya baik, militernya kuat, disegani di kancah dunia internasional. Begitu.

Pertanyaan:

Lalu kalau menurut Bapak, Bagaimana konsep diplomasi dalam arthashastra?

Jawaban:

Konsep diplomasi, kalau dalam Arthashastra itu Chanakya menggunakan terminologi Mantrashakti dalam diplomasi. *Mantrashakti* ini mantra ya, kekuatan ucapan, bagaimana narasi, nasehat, kata-kata bisa mempengaruhi orang lain supaya mau ikut maunya kita. Dari ketiga *Shakti* itu Chanakya mengatakan *mantrashakti* ini yang paling kuat. Paling penting bagi negara. Karena *mantrashakti* ini melibatkan kecerdasan ya, makanya kemudian ada *mantrayudha*, perang kecerdasan. Chanakya itu bahkan menyebutkan satu anak panah bisa saja mengenai satu orang atau bahkan tidak sama sekali. Tapi kecerdasan orang yang digunakan secara tepat bahkan bisa membunuh bayi dalam kandungan sekalipun. Begitu hebatnya itu kecerdasan.filosofis sekali itu. Lalu dalam arthashastra yang berkaitan dengan diplomasi juga ada lagi disebut sadgunya dan catur upaya. *Sadgunya* ini enam kebijakan luar negeri. Kebijakan ini dijalankan berdasar hasil analisis dan pertimbangan dari teori mandala dan juga saptanga. Enam kebijakan ini pertama ada *samdhi*, membuat traktat atau perjanjian damai, kedua itu *vigraha*, menunjukkan permusuhan, ketiga, *asana*, memilih untuk diam, tidak merencanakan untuk maju berperang. Keempat itu *Yana*, ini kebijakan dimana negara memutuskan untuk bersiap-siap bergerak ke medan perang. Kelima ada *samsraya*, meminta perlindungan, ini dilakukan raja yang lemah kalau ada negara yang lebih kuat me nyerang, dia minta bantuan, minta perlindungan ke negara lain yang dinilai lebih kuat dari yang akan menyerang dia. Lalu yang keenam itu ada *Dvaidibhav*. Kebijakan ganda. Melakukan dua kebijakan sekaligus. Dengan negara A buat Pakta perdamaian dengan disaat bersamaan merancang pasukan untuk menyerang negara B. itu.. itu *sadgunya* ya. Lalu *catur upaya* ini lebih kepada cara yang digunakan ya. *Catur* itu empat, *upaya* itu artinya apa yang

dilakukan, upayanya. Tindakannya, strateginya. Begitu. Catur upaya ini *ada sama, dama, bedha dan danda*. *Sama* ini caranya dengan memuji keunggulan, membangga-banggakan, sedangkan *dana* ini dengan cara memberi hadiah, memberi imbalan, entah itu uang, bantuan, pembebasan pajak, dan lain lain ya. Lalu *bedha* ini caranya dengan menabur perselisihan, perbedaan diantara para musuh, jadi mereka saling curiga, ribut sendiri, bahkan bisa saling perang sendiri. Sementara yang terakhir adalah *danda*, atau dengan kekerasan, pemaksaan, misalnya dengan merampas harta, invasi dan lain lain.

Pertanyaan:

Baik, kemudian menurut Bapak, bagaimana relevansi teori *sadguna*, konsep *mantrashakti* dan *catur upaya* dihadapkan dengan konsep diplomasi masa kini?

Jawaban:

Saya rasa mungkin masih relevan ya, beberapa. Cuman mungkin bahasanya berbeda kalau sekarang. Terminologinya nggak seperti itu. dan sudah banyak ada penyesuaian dengan perubahan situasi dan kondisi yang ada ya. Kalau dalam hubungan internasional itu kerjasama yang berjalan sekarang kan mirip dengan *samdhi* ya. Lalu cara-cara yang digunakan dalam membuat hubungan baik dengan negara lain itu seperti menggunakan cara “sama” dan juga “dana” kan, dengan memuji, oh negara ini baik, pemimpin, mentrinya bersih dikasi *award*, oh negara ini miskin, butuh bantuan, kasi bantuan dana, oh negara ini abis kena bencana alam, dikasi bantuan dana, dikirim relawan untuk bantu. Kan begitu.

Pertanyaan:

Selanjutnya Pak, Bagaimana posisi militer dalam diplomasi sebuah negara menurut arthashastra?

Jawaban:

Posisi militer, dalam Arthashastra itu krusial ya. Militer digunakan untuk pertahanan dan pengamanan kerajaan. Seperti yang saya jelaskan militer atau *danda* ini kan bagian dari *prabhava sakti*. Jadi kalau dalam hubungan internasional kan sekarang militer itu dipakai sebagai *deterrence effect* ya. Dalam arthashastra itu seperti *prabhava Shakti* ya. Bagaimana militer ini

kemudian memberikan prabhava kepada negara, memberikan kesan citra bahwa negara ini kuat, ngga mudah diserang, jadi mereka segan untuk macam-macam dengan negara ini.

Pertanyaan:

Jadi menurut Bapak bagaimana konsep diplomasi pertahanan dalam arthashastra?

Jawaban:

Konsep diplomasi pertahanan ya, diplomasi pertahanan itu apa sih? Kalau terminologi jelas diplomasi pertahanan itu kan baru ya, jaman kerajaan maurya itu belum ada. Tapi kalau nilai-nilai dasarnya saya rasa sudah ada ya. Aplikasinya sudah berjalan. Misal kerajaan Chanakya itu sering melakukan latihan militer bersama, kerjasama pembelian senjata dan alutsista, terus ada penyerangan musuh bersama-sama, membuat kesepakatan damai, itu kan berarti sudah aplikasi dari diplomasi pertahanan ya.

Pertanyaan:

Baik, menurut Bapak apakah konsep diplomasi pertahanan berdasarkan pandangan Chanakya dalam Arthasashtra masih relevan dengan tantangan jaman kekinian?

Jawaban:

Menurut saya sih relevan dalam beberapa bagian, tapi perlu pengkajian lebih dalam lagi ya, ada beberapa hal yang sudah usang, ya tidak perlu dipakai. Kalau kita lihat diplomasi pertahanan dalam konsep Chanakya itu kan realis sekali ya, diplomasinya militer, pendekatannya juga militer, jadi perlu sentuhan non militer. Tapi soal kewaspadaan, konstelasi mandala negara untuk menghadapi isu-isu tertentu, penekanan terhadap pentingnya diplomasi daripada perang, saya rasa itu masih sangat relevan ya hingga kini. Termasuk juga upaya negara untuk memperkuat militernya itu juga relevan dan penting dilakukan.

selesai

Dokumen Pendukung



Gambar 1. Dokumentasi Wawancara

Keterangan: 1. Wawancara dengan I Ketut Donder Ph.D, 2. Wawancara dengan Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D, 3. Proses Wawancara dengan Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, M.BA, 4. Wawancara dengan Dr. Yoga Segara, 5. Wawancara dengan Brigjen TNI Dr. Rer. Pol Rodon Pedrason, 6. Wawancara dengan Letkol Ikhwan Solihin, 7. Wawancara dengan Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, M.BA,

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari, lahir di Jakarta pada 22 Januari 1994. Anak ke-3 dari pasangan Bapak I Made Dasuki R dan Ibu Ni Made Natariani. Menyelesaikan pendidikan di SDN 2 Ubung, Denpasar lulus tahun 2005, SMP Harapan Nusantara Denpasar lulus tahun 2008, SMAN 3 Denpasar lulus tahun 2011, Sarjana (S-1) Hubungan Internasional Universitas Udayana lulus tahun 2015, dan pada tahun 2017 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan.

Peneliti saat ini menjabat sebagai *Advanced Researcher* di *The Hindu Center of Indonesia*, mengawali karirnya sebagai asisten peneliti di Vivekananda Spirit Indonesia di tahun 2014. Berbagai karya tulis / buku yang pernah ditulis antara lain: *How to be a Leader: 50 Pernyataan tentang Kualitas untuk menciptakan Pemimpin Sejati* (Vivekananda Spirit Indonesia, 2014); Indrapuri: *Sejarah dan Eksistensi Hindu di Aceh* (Universitas Mahendradatta dan Vivekananda Spirit Indonesia Publishing, 2016); Tamil-Karo: *Sejarah dan Eksistensi Peradaban Hindu di Sumatera Utara* (Universitas Mahendradatta dan Vivekananda Spirit Indonesia Publishing, 2016); dan *Hindu di Bumi Melayu: Peradaban Siwa Buddha, Eksistensi dan Kontribusi Umat Hindu dalam Pembangunan di Provinsi Riau* (Universitas Mahendradatta dan Vivekananda Spirit Indonesia Publishing, 2018).